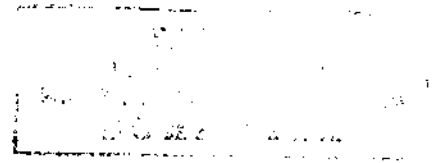


# BAB 1

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai alasan dan skala prioritas yang berbeda dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas hidup, pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur (*madani*) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional di bidang ekonomi yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Todaro (2000b : 14), pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga (inflasi), mengurangi pengangguran, mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan neraca pembayaran. Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah adalah menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan negara, di antaranya mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas kehidupan, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan usaha tersebut akan terjamin kesempatan yang sama bagi

seluruh masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan ekonominya, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pembangunan ekonomi di masa mendatang akan menghadapi perubahan eksternal dan internal yang cukup besar. Perubahan eksternal ini adalah konsekuensi dari arus globalisasi yang berimplikasi berupa berlakunya perdagangan bebas dan perubahan internal berupa diberlakukannya otonomi daerah. Secara lebih lengkap

*The Group of Lisbon* (1995:21) mendefinisikan :

“Globalisasi merupakan sebuah proses keterlibatan dan ketergantungan yang intensif antar negara-negara dan masyarakatnya dalam berbagai kegiatan kehidupan tanpa batas, namun dengan adanya globalisasi tidak berarti, bahwa setiap negara atau masyarakat menjadi satu dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain”.

Dalam hubungannya dengan globalisasi ekonomi, liberalisasi, privatisasi dan deregulasi merupakan tiga motor penggerak utama dari globalisasi. Liberalisasi dari aliran modal merupakan faktor terpenting yang mempercepat pencapaian kapitalisme global dan kesejahteraan dunia. Menurut Firdausy (2000), aliran modal ini terdiri dari tiga katagori utama, yakni :

1. Menyangkut aliran uang dan keuangan yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa , misalnya transaksi ekspor, impor dan pengeluaran wisatawan.
2. Penanaman modal asing langsung yang tidak hanya meliputi pengalihan modal, melainkan juga keterampilan manajemen dan teknologi.
3. Investasi portfolio (investasi tidak langsung) dan berbagai tipe transaksi finansial lainnya.

Dalam hal privatisasi sebagai faktor penggerak kedua globalisasi, telah dibuktikan, bahwa privatisasi dapat berfungsi dalam mengalokasikan secara baik sumber daya bagi kepentingan produsen dan konsumen melalui mekanisme pasar. Hal yang sama juga telah terbukti dalam memobilisasi kemampuan dan keinginan masyarakat untuk merespon permintaan pasar melalui dana dan investasi masyarakat.

Agar liberalisasi dan privatisasi dapat berjalan efisien dalam proses globalisasi, diperlukan unsur ketiga, yaitu deregulasi. Dengan adanya deregulasi ini peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan semakin berkurang, sehingga hanya kekuatan pasar yang diperlukan dalam mengatur seluruh kegiatan dari fungsi perekonomian nasional dan internasional pada tingkat lokal, regional dan global. Dengan demikian, deregulasi disatu pihak merupakan suatu fase transisi menuju terciptanya privatisasi penuh dan liberalisasi, sedangkan dilain pihak kebijakan deregulasi dapat berfungsi dalam mendorong privatisasi dan liberalisasi.

Bagi perekonomian nasional, menurut Firdausy (2000), dampak globalisasi ekonomi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. Dampak globalisasi pada kondisi internal.
2. Dampak globalisasi pada kondisi eksternal.

Bentuk dampak pada kedua kondisi ini dapat berupa dampak positif atau sebaliknya dapat berupa dampak negatif. Dalam hal dampaknya pada kondisi internal, globalisasi ekonomi dapat mengubah pola perilaku pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam proses di satu pihak dan perubahan struktur ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah di lain pihak. Perubahan dalam proses produksi antara lain dapat meliputi semakin tingginya penggunaan faktor produksi yang kompetitif dalam perdagangan dan investasi pada sektor yang *tradeables*, serta berkembang industri nasional yang kompetitif. Sedangkan perubahan struktural yang mungkin terjadi dapat meliputi perubahan dalam sektor ekonomi dan orientasi sektor tradisional menuju kepada sektor ekonomi modern. Perkembangan ini membawa implikasi pada

perubahan kebijakan ekonomi mikro perusahaan dan makroekonomi, kebijakan pasar dan lain-lain.

Keuntungan dari perubahan struktural dari globalisasi bagi perusahaan adalah mendorong perusahaan (pelaku-pelaku ekonomi) untuk melakukan kerja sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan adanya kerjasama antar perusahaan ini, maka akan diperoleh turunya biaya untuk kegiatan litbang (R & D), memperpendek daur hidup produk (*product life cycle*), terjadinya lompatan teknologi, kepastian kemudahan untuk perolehan teknologi, kerjasama dalam pembiayaan pengembangan teknologi, perolehan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi dan kemudahan memperoleh sumber-sumber dana bagi pembangunan serta masuknya teknologi informasi (Youngzheng, 2006).

Perubahan pada kondisi eksternal dapat meliputi perubahan dalam kebijakan perdagangan dan investasi internasional, sistem moneter internasional, dan hubungan ekonomi internasional lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ini selanjutnya tidak lagi dapat diidentifikasi sebagai kegiatan nasional, melainkan sudah bersifat global.

Dampak globalisasi akan cenderung menghasilkan eksternalitas negatif, jika suatu perekonomian tidak dapat bersaing dan tetap *inefisien*. Hal ini terutama karena kekuatan dan daya saing ekonomi nasional masih jauh dari yang diharapkan. Kekuatan ekonomi yang lemah ini selanjutnya diperparah lagi dengan adanya krisis moneter yang menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, apalagi tanda-tanda pemulihan perekonomian juga relatif masih belum nampak (Irawan, 2005:291).

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan angkatan kerja, namun aspek demografi ini tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Kelley and Schmidt, 1995). Peningkatan stok kapital yang ditandai dengan peningkatan investasi setiap tahun menunjukkan adanya penambahan peralatan modal atau kemajuan teknologi yang terbawa melalui penambahan peralatan modal dan sarana produksi serta perluasan kapasitas produksi melalui pengembangan industri yang sudah ada, dilain pihak pertumbuhan penduduk justru memberi tekanan negatif terhadap pertumbuhan *output* (Pancawati, 2000). Selain itu, faktor kelembagaan ternyata banyak menimbulkan masalah di bidang investasi (Lumbuun, 2005). Dengan demikian, globalisasi ekonomi, krisis moneter dan krisis ekonomi dampaknya baru terlihat pada pasca krisis yang sangat berpengaruh pada kinerja investasi dan ekspor nasional yang bermuara kepada terbatasnya modal untuk membiayai pembangunan yang ditargetkan.

Untuk mencapai target atau sasaran pembangunan nasional tersebut, telah disusun strategi kebijakan sektoral maupun perwilayahan secara bertahap, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan. Pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya masih banyak menekankan pendekatan sektoral, di mana perencanaan secara makro masih mengikuti sistem pencapaian target peningkatan produksi untuk masing-masing sektor yang bersangkutan. Dengan tercapainya target sektoral, diharapkan di samping pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat, juga akan mengakibatkan perubahan/transisi sektoral pertanian ke sektor lainnya (non-agraris), sehingga akan terjadi pola yang semakin berimbang. Dengan berubahnya struktur

perekonomian secara sektoral tersebut, diharapkan akan diperoleh landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap dan perilaku masyarakat serta institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung kepada tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan itu sendiri dapat dicapai dengan berbagai cara, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara atau daerah (Todaro, 2000a:92).

Lebih lanjut Todaro (2000a: 41) mengatakan, bahwa negara dengan luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar justru senantiasa dihadang banyak persoalan rumit mulai dari beratnya tugas pengawasan administratif, pembinaan kesatuan nasional dan penanggulangan ketidakseimbangan regional. Ternyata antara luasnya wilayah suatu negara, tingkat pendapatan per kapita, serta meratanya distribusi pendapatan nasional berkaitan satu sama lainnya.

Perekonomian di setiap negara terbentuk dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara tersebut. Pembangunan ekonomi itu sering ditafsirkan sebagai pertambahan pendapatan nasional atau produk bagi suatu bangsa, tanpa mempersoalkan siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Di negara-negara berkembang, model yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonominya adalah diukur dengan kenaikan GNP per kapita, sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan material yang meningkat, namun bersamaan dengan itu muncul pula persoalan baru, yaitu masalah pemerataan hasil pembangunan.

Tingginya tingkat penghasiian per kapita yang dicapai tidak menjamin pemerataan hasil pembangunan. Laju pertumbuhan yang tinggi itu diikuti oleh kesenjangan pendapatan yang semakin melebar, di samping terjadinya urbanisasi yang tidak dapat dibendung sebagai akibat terkonsentrasinya industrialisasi di daerah perkotaan (Ardani,1996:12).

Strategi pembangunan yang memberikan tekanan cukup besar pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, ternyata realisasinya tidak selalu demikian. Dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tampaknya obsesi pada keyakinan, bahwa apabila pertumbuhan ekonomi terus dipacu secara perlahan tapi pasti pemerataan akan terjadi dengan sendirinya. Pemerataan pembangunan yang identik masalahnya dengan kesenjangan pembangunan adalah masalah ketidakmerataan antar golongan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk perbedaan tingkat pendapatan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain dikarenakan perbedaan luas masing-masing wilayah, kepadatan penduduk dan adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonominya (Sjafrizal, 1997:7).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang sangat diperlukan, tetapi bukan berarti, bahwa pertumbuhan yang tinggi itu akan menjamin terwujudnya ketimpangan yang makin rendah. Pernyataan ini dihadapi oleh hampir semua negara berkembang, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di negara-negara dunia ketiga ternyata tidak membawa implikasi terhadap terciptanya pemerataan (Ulhaq, 1995:135). Kebijakan pembangunan telah berhasil menggalang mobilisasi dana masyarakat, namun alokasi investasi antar sektor dan antar daerah telah menciptakan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat antar sektor dan antar daerah (Yasa, 1996:42).

Stern (1991) menyebutkan, bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara akan membutuhkan akumulasi modal fisik, kemajuan teknologi, adanya inovasi dan ide-ide baru dan pertumbuhan penduduk. Sen (1983) mengatakan, bahwa perkembangan ekonomi sebagai situasi di mana telah terjadi *expansion of people's capabilities* yang antara lain dibuktikan dengan meluasnya kepemilikan harta oleh rakyat. Sementara itu, Chakravarty (1987:26) mengemukakan, bahwa suatu ekonomi baru dapat disebut berkembang, jika telah terjadi pertumbuhan, pemerataan dan peningkatan kreatifitas rakyat.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil bilamana tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat adanya pendapatan yang meningkat. Pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari produksi yang meningkat. Proses ini terpenuhi bila asumsi-asumsi, yaitu partisipasi masyarakat secara penuh (*full employment*), setiap orang mempunyai tingkat kemampuan yang sama (*equal productivity*) dan masing-masing pelaku bertindak rasional.

Tidak diragukan lagi, bahwa tahap pembangunan nasional dewasa ini memang masih jauh dari tujuan akhir, yaitu keadilan sosial ke arah kesejahteraan masyarakat yang meskipun rata-rata pendapatan per kapita sudah meningkat 10-15 kali dalam periode 41 tahun sejak tahun 1966, namun belum dinikmati oleh semua orang dan mengarah pada pemerataan. Keadaan justru sebaliknya, terdapat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang cukup signifikan antara mereka yang kaya yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi dengan mereka yang masih berada pada tahap rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Anggota masyarakat yang berada di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak. Gejala ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemiskinan, pelebaran kesenjangan pembagian pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya



produksi nasional, penurunan pendapatan per kapita dan penurunan produktivitas faktor produksi serta penurunan tingkat kesejahteraan, padahal pembangunan itu sendiri bertujuan sebaliknya. Kondisi ini merupakan *output* dari pembangunan ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi yang berkisar pada perubahan struktural. Perubahan struktural ini menyangkut perubahan pada struktur dan komposisi produk nasional, kesempatan kerja produktif, ketimpangan antar sektor, antar daerah, antar golongan masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan antara golongan berpendapatan rendah dan tinggi.

Menurut Kuznets (1993:92), pengalaman empiris membuktikan dengan meningkatnya pendapatan (pertumbuhan ekonomi) akan terjadi pergeseran-pergeseran pada komposisi produk nasional, kesempatan kerja produktif dan pola perdagangan. Kondisi ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

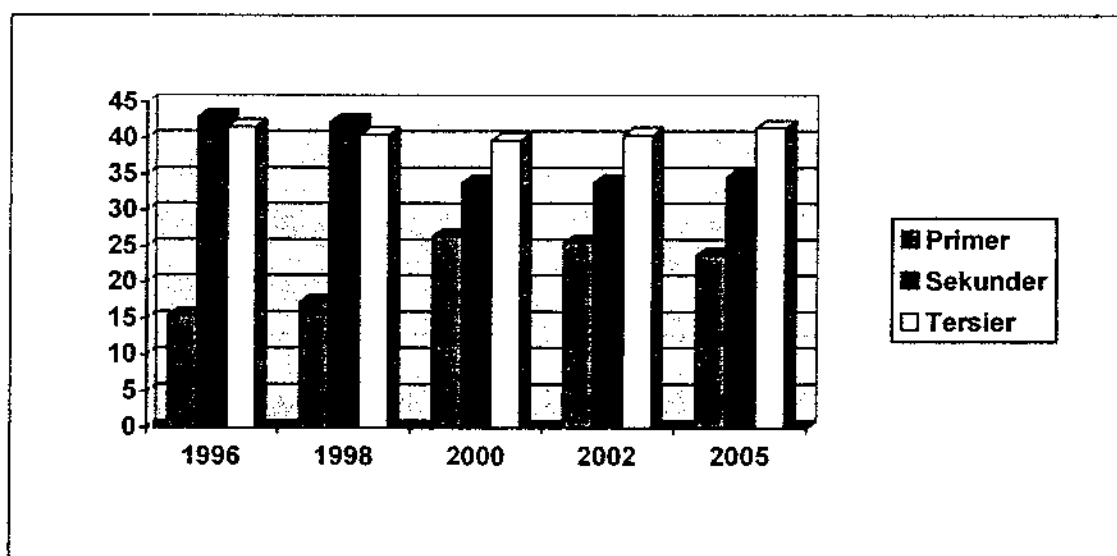
Struktur ekonomi sektoral Indonesia menurut kontribusi pembentukan nilai tambah masing-masing sektor bergeser dari sektor Sekunder dan Tersier ke sektor Primer, seperti tampak pada Tabel 1.1 di halaman 10. Kontribusi sektor Sekunder dan Tersier terhadap PDB masing-masing turun dari tahun 1996 sampai tahun 2005. Kondisi ini disebabkan oleh krisis multi dimensi yang dimulai pertengahan tahun 1997 dan kasus bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 telah berdampak langsung terhadap eksistensi industri pariwisata yang merupakan basis perkembangan sektor Tersier, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional melalui efek keterkaitan ke belakang dan ke depan. Hal ini adalah akibat dari kenyataan, bahwa industri pariwisata sangat peka terhadap isu keamanan, isu penyakit, gejolak politik dan lainnya yang kemungkinan akan makin sering terjadi di tengah-tengah era globalisasi. Selama krisis moneter, sektor Primer ternyata jauh lebih resisten terhadap gejolak krisis dibandingkan sektor Sekunder dan sektor Tersier.

**Tabel 1.1**  
**TRANSISI KEGIATAN SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA**  
**TAHUN 1996 – 2005 BERDASARKAN NILAI TAMBAH ATAS DASAR**  
**HARGA KONSTAN TAHUN 1993**

No.	Kelompok Sektor	Distribusi Nilai Tambah (%)				
		1996	1998	2000	2002	2005
1	Primer	15,42	17,28	26,41	25,55	23,84
2	Sekunder	42,97	42,23	33,88	33,96	34,68
3	Tersier	41,61	40,49	39,71	40,49	41,48
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Jakarta, 1998 dan 2006

Perubahan / transisi sektoral dari perekonomian Indonesia menurut nilai tambah tahun 1996 – 2005 juga dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Tabel 1.1

**Gambar 1.1. PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT NILAI TAMBAH TAHUN 1996 -2005**

Kontribusi sektor Primer terhadap PDB naik dari tahun 1996 sampai 2005 yang diikuti oleh turunnya kontribusi sektor Sekunder dan Tersier.

Struktur ekonomi sektoral berdasarkan penyerapan tenaga kerja terjadi sebaliknya, di mana bergeser dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier. Penyerapan tenaga kerja di sektor Primer turun pada tahun 2005 dari tahun 1993 dan penyerapan tenaga kerja di sektor Sekunder dan Tersier masing-masing meningkat pada tahun 2005 dari tahun 1993. Transisi kegiatan sektoral perekonomian Indonesia menurut penyerapan tenaga kerja tahun 1993 – 2005 ditunjukkan pada Tabel 1.2,

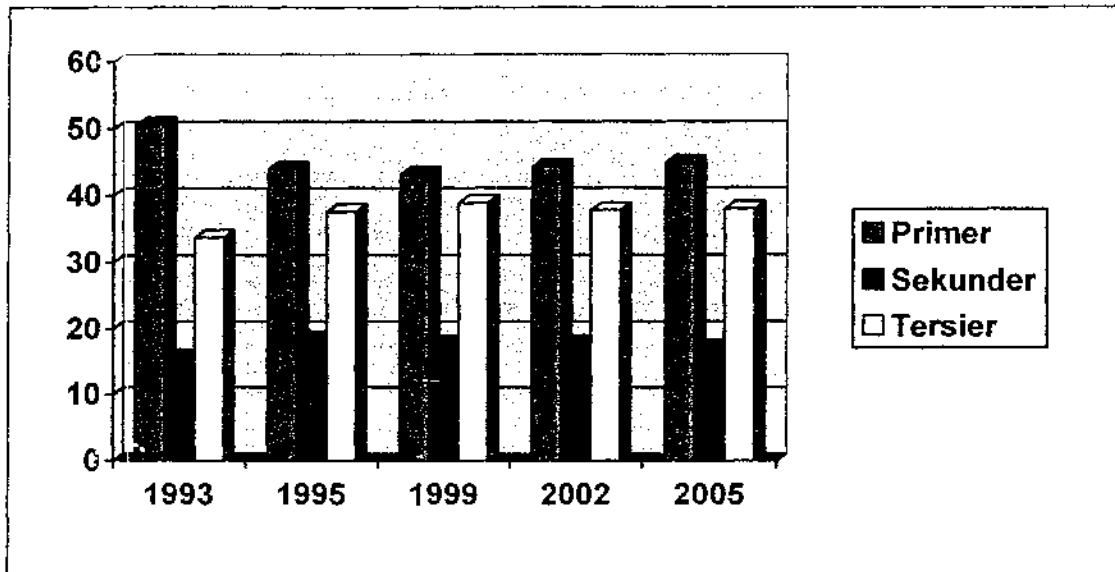
**Tabel 1.2**  
**TRANSISI KEGIATAN SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA**  
**TAHUN 1993 – 2005 BERDASARKAN**  
**PENYERAPAN TENAGA KERJA**

No.	Kelompok Sektor	Distribusi Tenaga Kerja (%)				
		1993	1995	1999	2002	2005
1	Primer	50,60	43,98	43,21	44,34	44,89
2	Sekunder	15,68	18,42	17,84	17,88	17,12
3	Tersier	33,72	37,60	38,95	37,78	37,99
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Jakarta, 1994-2006

sedangkan perubahan/transisi sektoral perekonomian Indonesia menurut penyerapan tenaga kerja tahun 1993 – 2005 juga dapat dilihat pada Gambar 1.2 di halaman 12.

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi dan kabupaten/kota serta daerah yang lebih kecil. Di dalam GBHN 1999-2004 memuat, bahwa arah kebijakan pembangunan daerah adalah mempercepat pembangunan daerah yang efektif dan kuat dengan memperdayagunakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan pemerataan, baik fisik maupun sosial, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi (Koswara, 2000).

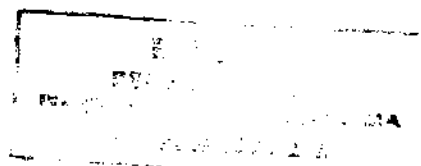


Sumber : Tabel 1.2

Gambar 1.2 PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 1993 – 2005

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual dan salah satu aspek pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak terlepas dari trilogi pembangunan, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis (Sriyasa, 1999).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya dan potensi-potensi yang dimiliki serta sekaligus bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan demi mensejahterakan



masyarakatnya. Selanjutnya pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada masyarakatnya (Akbar dan Nurbaya, 2000).

Dengan adanya perbedaan kinerja ekonomi dan keberhasilan pembangunan masing-masing daerah, mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara daerah di Provinsi Bali. Kesenjangan ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapatan per kapita, perbedaan jumlah, kepadatan, pertumbuhan penduduk antar daerah dan perolehan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota. Menurut Adi (2000: 69), karakteristik yang cukup mencolok penyebab kesenjangan tersebut adalah perbedaan dalam jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sarana dan prasarana dan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Provinsi Bali sebagai bagian integral dari wilayah Republik Indonesia, secara administratif wilayah terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Mengenai luas wilayah, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk/ $\text{Km}^2$  antar wilayah di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 1.3 di halaman 14.

Tabel 1.3 menunjukkan luas wilayah Provinsi Bali pada tahun 2005 adalah  $5.632,86 \text{ Km}^2$  dengan Jumlah penduduknya adalah 3.247.772 jiwa. Adapun luas wilayah dan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah Kabupaten Buleleng, kemudian Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah Kota Denpasar.

Kepadatan penduduk di Provinsi Bali maupun di kabupaten/kota tergolong kepadatan tinggi, karena menurut WHO dalam PPLH Unud (2006 : 42), kepadatan penduduk ideal adalah  $250 \text{ orang/km}^2$ . Kepadatan penduduk yang paling tinggi antar

**Tabel 1.3**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BALI, TAHUN 2005.**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup> (Orang)
1.	Jembrana	841,80	224.990	267
2.	Tabanan	839,33	405.484	483
3.	Badung	418,52	374.377	895
4.	Gianyar	368,00	383.591	1.042
5.	Klungkung	315,00	170.744	542
6.	Bangli	520,81	211.186	405
7.	Karangasem	839,54	395.409	471
8.	Buleleng	1.365,88	618.076	453
9.	Denpasar	123,98	463.915	3.742
Provinsi Bali		5.632,86	3.247.772	577

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2006.

wilayah di Provinsi Bali berada pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, yaitu mencapai angka melebihi kepadatan penduduk Provinsi Bali, yang disebabkan karena dampak dari perkembangan pariwisata yang menonjol di ketiga kabupaten/kota tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa masing-masing wilayah di Provinsi Bali kepadatan penduduknya cukup tinggi kalau dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Bali dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Apabila sektor-sektor ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sektor Primer (P), sekunder (S) dan sektor Tersier (T), maka perkembangan nilai tambah sektor-sektor di Provinsi Bali dengan menggunakan angka konstan tahun 1993 ditunjukkan pada Tabel 1.4 di halaman 15.

Tabel 1.4 menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 1997 - 2001 mengalami penurunan dari periode 1993 - 1997 dan meningkat lagi pada periode tahun 2001 - 2005. Sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan paling tinggi selama periode tahun 1993 - 2005 adalah sektor Sekunder, sedangkan sektor yang paling rendah adalah sektor Primer. Sektor Tersier, dimana didalamnya termasuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan tumpuan ekonomi Bali pada periode sebelum krisis mempunyai tingkat pertumbuhan pada ranking ke 2 tertinggi, demikian juga pada periode pasca krisis ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi antar wilayah di Provinsi Bali dapat dilihat dari perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB kabupaten/kota. Apabila sektor-sektor ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sektor Primer (P), sektor

**Tabel 1.4**  
**RATA-RATA PERTUMBUHAN SEKTOR PRIMER (P), SEKUNDER (S) DAN**  
**TERSIER (T) PER TAHUN DI PROVINSI BALI, 1993 - 2005 ATAS DASAR**  
**HARGA KONSTAN TAHUN 1993 (dalam %)**

Sektor	Tahun		
	1993-1997	1997-2001	2001-2005
<b>A. PRIMER</b>	<b>8,62</b>	<b>3,36</b>	<b>3,66</b>
1. Pertanian	3,78	0,98	4,16
2. Pertambangan & Penggalian	4,84	2,38	3,16
<b>B. SEKUNDER</b>	<b>10,35</b>	<b>3,39</b>	<b>5,69</b>
3. Industri Pengolahan	11,97	3,44	4,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	18,55	5,79	8,65
5. Bangunan	7,31	2,79	3,61
<b>C. TERSIER</b>	<b>9,33</b>	<b>2,52</b>	<b>4,08</b>
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	10,36	1,46	3,49
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,95	2,85	3,28
8. Keu., Persew. & Jasa Perusahaan	6,53	4,12	4,65
9. Jasa-jasa	8,11	3,90	4,91
<b>TOTAL</b>	<b>8,25</b>	<b>2,34</b>	<b>4,67</b>

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1994 - 2006.

Sekunder (S) dan sektor Tersier (T), maka perubahan struktur ekonomi antar wilayah di Provinsi Bali dapat ditunjukkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. menunjukkan, bahwa pada periode tahun 1992, 1997, 2002 dan 2005 semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perubahan struktur ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya kontribusi sektor Primer terhadap PDRB yang diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor Tersier dan sektor Sekunder.

Namun secara umum perubahan kontribusi masing-masing sektor pada beberapa wilayah kabupaten/kota nilainya cukup beragam. Ini berarti antar wilayah di Provinsi Bali masing-masing mempunyai keunggulan pada salah satu sektor. Misalnya kontribusi sektor Primer pada tahun 2002 terhadap PDRB di Kabupaten Karangasem, Tabanan, Klungkung, Bangli, Buleleng dan Jembrana di atas kontribusi rata-rata Provinsi Bali.

Untuk sektor Tersier, kontribusi tertinggi terhadap PDRB dicapai oleh

**Tabel 1.5**  
**KONTRIBUSI SEKTOR PRIMER (P), SEKUNDER (S) DAN TERSIER (T) DI**  
**KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI BALI ATAS HARGA KONSTAN**  
**1993, TAHUN 1992 - 2005 (dalam %)**

No.	Kab/Kota	Tahun dan Sektor											
		1992			1997			2002			2005		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T	P	S	T
1.	Jembrana	39,15	8,55	52,29	27,37	14,17	58,46	27,76	14,08	58,16	27,08	13,17	59,75
2.	Tabanan	-42,12	9,14	48,73	35,63	11,00	53,37	32,11	12,01	55,88	31,04	11,01	57,95
3.	Badung	10,17	10,68	79,14	6,60	9,78	83,62	7,14	9,90	82,96	7,11	9,31	83,58
4.	Gianyar	26,26	24,37	49,36	17,73	26,83	55,44	17,12	26,94	55,94	16,44	23,62	59,94
5.	Klungkung	35,81	10,92	53,27	33,70	16,86	49,44	32,83	17,52	49,65	32,09	15,21	52,70
6.	Bangli	33,90	6,50	59,60	32,61	11,87	55,51	30,60	12,21	57,19	31,03	13,09	55,88
7.	Karangasem	38,02	6,18	55,80	34,89	11,87	53,24	34,99	12,49	52,52	34,68	10,84	54,48
8.	Buleleng	47,72	7,27	45,01	30,76	11,82	57,41	30,46	12,28	57,26	28,39	13,59	58,02
9.	Denpasar	12,03	14,88	73,09	8,17	16,18	75,65	8,68	17,50	73,82	7,81	18,74	73,45
	Prov Bali	28,29	10,75	60,96	20,34	14,58	65,08	19,80	14,76	65,44	22,43	14,90	62,67

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993-2006.



Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, yaitu di atas kontribusi rata-rata Provinsi Bali. Struktur ekonomi Provinsi Bali tahun 1992-2005 mengalami perubahan dari sektor Primer ke sektor Tersier dan Sekunder.

Perubahan ini dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, sehingga memberi corak yang tidak konsisten terhadap perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali. Dari tahun 1992, 1997 sampai 2005 sektor Primer yang terdiri dari sub sektor pertanian, pertambangan dan penggalian kontribusinya mengalami penurunan.

Selanjutnya untuk sektor Tersier yang terdiri dari sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa lainnya yang merupakan *leading sector* perekonomian di Provinsi Bali kontribusinya terus mengalami peningkatan dari tahun 1992 sampai tahun 2005. Sedangkan sektor Sekunder yang terdiri dari sub sektor industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan pada periode tahun 1992-2005 mengalami peningkatan dari tahun 1992 sampai tahun 2005. Perubahan masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.6 di halaman 18. Tabel 1.6 menunjukkan, bahwa struktur perekonomian Provinsi Bali lebih bertumpu pada sektor Tersier seperti perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Struktur perekonomian Bali mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pilar-pilar ekonomi dibangun lewat keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada sektor pariwisata sebagai *leading sector*-nya. Hal ini menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata (kelompok sektor

**Tabel 1.6**  
**KONTRIBUSI NILAI TAMBAH SEKTOR-SEKTOR EKONOMI DI**  
**PROVINSI BALI TAHUN 1992, 1997, 2002, 2005 (dalam %).**

Sektor	Tahun			
	1992	1997	2002	2005
<b>A. PRIMER</b>	<b>28,29</b>	<b>20,34</b>	<b>19,80</b>	<b>22,43</b>
1. Pertanian	28,02	19,57	9,04	21,79
2. Pertamb. & Penggalian	0,27	0,77	0,76	0,64
<b>B. SEKUNDER</b>	<b>10,75</b>	<b>14,58</b>	<b>14,76</b>	<b>14,90</b>
3. Industri Pengolahan	6,24	8,51	8,71	9,54
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,09	1,21	1,45	1,47
5. Bangunan	3,42	4,86	4,60	3,89
<b>C. TERSIER</b>	<b>60,96</b>	<b>65,08</b>	<b>65,44</b>	<b>62,67</b>
6. Perdag. Hotel & Restoran	25,03	32,15	30,86	30,84
7. Pengangkutan & Komunikasi	12,16	13,46	12,46	10,39
8. Keu., Persew. & Jasa Perusah.	3,97	6,93	6,14	7,44
9. Jasa-jasa	19,80	12,54	15,98	14,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993-2006

Tersier), sangat dominan dalam memberikan warna pada perekonomian Bali.

Kegiatan Produksi barang dan jasa tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, juga dipasarkan keluar daerah serta keluar negeri (*inward looking versus outward looking*), sehingga dapat menciptakan efek pengganda yang lebih tinggi. Peranan pemerintah sangat besar mengatur sistem distribusi melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dimiliki, baik dari sisi penawaran maupun permintaan (*supply and demand side*).

Di samping dari struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali selama kurun waktu 1992 – 2005 juga mengalami perubahan. Berbeda dengan perubahan struktur ekonomi, perubahan struktur tenaga kerja cenderung konsisten selama kurun waktu tersebut, dimana sektor Primer persentase penyerapan tenaga kerjanya terus menurun, sedangkan

sektor Sekunder dan sektor Tersier terus meningkat. Penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor primer terjadi di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 1992, 1997, 2002 dan 2005. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 1992 sampai 2005, sedangkan sektor Sekunder penyerapan tenaga kerjanya terus meningkat, demikian juga sektor Tersier. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.7.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pemerintah Provinsi Bali mempunyai salah satu misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui aspek pembangunan ekonomi. Namun dengan situasi perekonomian yang tidak menentu, dikhawatirkan sektor yang selalu menjadi perhatian utama tidak dapat terus diharapkan peranannya dalam jangka panjang dalam memperoleh pendapatan bagi setiap daerah, apalagi

**Tabel 1.7**  
**PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PRIMER (P), SEKTOR**  
**SEKUNDER (S), DAN SEKTOR TERSIER (T) DI KABUPATEN/KOTA DAN**  
**PROVINSI BALI, TAHUN 1992 – 2005 ( dalam % ).**

No.	Kabupaten	1992			1997			2002			2005		
		P	S	T	P	S	T	P	S	T	P	S	T
1	Jembrana	46,13	35,21	18,66	31,14	37,31	31,55	36,55	22,72	40,73	35,69	22,85	41,46
2	Tabanan	61,52	24,07	14,41	54,27	20,07	25,66	41,09	24,25	34,66	40,08	24,40	35,52
3	Badung	24,91	40,61	34,48	24,98	20,64	54,38	15,65	21,66	60,69	15,20	24,68	60,12
4	Gianyar	40,38	43,23	16,39	34,10	34,72	31,18	19,87	40,02	40,11	19,36	40,62	40,02
5	Klungkung	52,09	33,35	14,56	45,75	26,04	28,21	43,85	17,81	36,84	42,69	17,96	39,35
6	Bangli	72,87	17,98	9,15	68,39	16,33	15,28	56,93	21,57	21,50	56,06	21,96	21,98
7	Karangasem	61,34	28,39	10,27	53,30	26,18	20,52	52,26	22,93	24,11	53,28	23,38	23,34
8	Buleleng	51,17	30,24	18,59	42,93	23,65	33,42	45,00	13,99	41,01	44,10	14,08	41,82
9	Denpasar	3,93	15,96	80,11	5,65	17,62	76,37	1,85	17,06	81,09	1,79	16,97	81,24
Provinsi Bali		43,29	21,25	35,46	40,18	21,94	37,88	32,18	22,93	44,88	34,32	24,10	41,58

Sumber : Eappeda dan BPS Provinsi Bali, 1993 – 2006.

kalau sektor atau kegiatan yang bersangkutan terus saja dijadikan andalan dalam perolehan pendapatan.

Dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi sektoral di Provinsi Bali, memberikan implikasi yang luas terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan teori *trickle down effect*, suatu pergeseran struktur ekonomi yang disebabkan adanya efek penyebaran (*spread effect*) dari suatu sektor ekonomi sering diikuti oleh perubahan distribusi pendapatan, struktur penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat banyak ditemukan secara material oleh produktivitas tenaga kerja, distribusi pendapatan dan pendapatan per kapita seperti yang diuraikan oleh Ram (1992). Pendapatan per kapita penduduk di wilayah Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 1.8.

**Tabel 1.8**  
**PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998, 2002, 2005 (dalam ribuan Rp)**

No.	Kab/Kota	Pendapatan Per Kapita		
		1998	2002	2005
1.	Jembrana	2.187,68	2.320,12	5.429,66
2.	Tabanan	1.910,40	2.020,04	4.655,26
3.	Badung	5.414,08	5.591,29	10.248,65
4.	Gianyar	2.169,08	2.392,14	5.939,33
5.	Klungkung	2.330,00	2.499,59	6.162,65
6.	Bangli	1.855,75	1.956,16	4.096,48
7.	Karangasem	1.471,01	1.550,45	3.605,53
8.	Buleleng	1.640,55	1.770,77	4.273,01
9.	Denpasar	2.861,57	2.890,64	7.819,37
Provinsi Bali		2.383,34	2.492,31	6.139,85

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1998-2006.

Tabel 1.8 menunjukkan, bahwa pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Bali periode tahun 1998, 2002 dan 2005 menunjukkan peningkatan nilai setiap

tahunnya, begitu juga halnya antar wilayah di Provinsi Bali. Pendapatan per kapita penduduk yang paling tinggi antar wilayah di Provinsi Bali pada tahun 2005 adalah Kabupaten Badung, kemudian diikuti Kota Denpasar serta Kabupaten Klungkung dengan pendapatan per kapita di atas pendapatan per kapita Provinsi Bali. Pendapatan per kapita penduduknya yang paling rendah adalah Kabupaten Karangasem, kemudian diikuti Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana dan Gianyar dengan pendapatan per kapita di bawah pendapatan per kapita Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan, bahwa pendapatan per kapita penduduk antar wilayah di Provinsi Bali tahun 1998, 2002 dan 2005 belum merata.

Sebagai subyek dan objek pembangunan, manusia merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan.

Untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, indikator yang relevan digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang dapat menunjukkan status pembangunan manusia di Provinsi Bali ditunjukkan pada Tabel 1.9 di halaman 22. Kalau dilihat masing-masing nilai IPM tahun 2005, maka ada lima kabupaten/kota yang mempunyai nilai IPM diatas 69,80, yaitu Denpasar, Tabanan, Badung, Gianyar dan Jembrana. Dilain pihak tercatat satu kabupaten dengan IPM di bawah 64, yaitu Karangasem. Kalau dilihat dari status

pembangunan manusia pada tahun 2005, maka tidak ada kabupaten/kota yang masuk katagori tinggi. Indeks pembangunan manusia berada pada skala menengah atas terdapat di 8 kabupaten/kota, yaitu Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Buleleng, pada skala menengah bawah hanya terdapat di satu kabupaten, yaitu Karangasem. Walaupun demikian kondisi ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 1999, dimana indeks pembangunan manusia pada skala menengah atas hanya terdapat di dua kabupaten/kota, yaitu Denpasar dan Tabanan.

Perbedaan nilai IPM dan ranking yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota menunjukkan, bahwa pencapaian hasil pembangunan tidak merata antar kabupaten/kota pada tingkat masyarakat yang diukur berdasarkan indikator gabungan

**Tabel 1.9**  
**TINGKAT STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, TAHUN 1999 DAN 2005**

No.	Kabupaten/Kota	1999		2005	
		IPM	Tingkat	IPM	Tingkat
1.	Jembrana	62,5	Menengah Bawah	70,4	Menengah Atas
2.	Tabanan	65,7	Menengah Atas	72,3	Menengah Atas
3.	Badung	64,7	Menengah Bawah	71,6	Menengah Atas
4.	Gianyar	61,0	Menengah Bawah	70,8	Menengah Atas
5.	Klungkung	59,9	Menengah Bawah	68,7	Menengah Atas
6.	Bangli	51,5	Menengah Bawah	68,7	Menengah Atas
7.	Karangasem	54,3	Menengah Bawah	63,3	Menengah Bawah
8.	Buleleng	60,1	Menengah Bawah	68,1	Menengah Atas
9.	Denpasar	68,8	Menengah Atas	75,2	Menengah Atas
Provinsi Bali		62,2	Menengah Bawah	69,8	Menengah Atas

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2006.

sosial ekonomi, yaitu pendapatan per kapita, angka harapan hidup dan tingkat pendidikan. Terdapat suatu pola yang jelas, bahwa daerah yang relatif maju secara

sosial ekonomi dibandingkan daerah lain mempunyai nilai IPM relatif lebih tinggi. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali merupakan sentra ekonomi yang penting. Peran yang strategis tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastruktur yang relatif lebih maju yang mampu mendukung kinerja pembangunan manusia secara lebih baik, sehingga bisa dipahami bahwa nilai IPM-nya mencapai ranking tertinggi.

Dari paparan di atas, tampak bahwa interaksi antara perubahan struktur ekonomi dengan struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa tidak akan menimbulkan masalah apabila turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang seimbang atau lebih cepat. Tetapi pada kasus-kasus pada negara sedang berkembang perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke non pertanian lebih cepat dari transformasi tenaga kerja (Todaro, 2000a : 433). Demikian juga yang terjadi di Indonesia (Sulistyaningsih, 1997:68). Akibat dari ketidakseimbangan tersebut, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menjadi semakin rendah dan masyarakat menjadi semakin miskin, karena sebagian besar masyarakat adalah petani. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidup karena berkurangnya konsumsi dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan.

Daerah yang relatif maju secara sosial ekonomi dibandingkan daerah lain, struktur ekonominya akan mengalami perubahan dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral maupun kesejahteraan masyarakat.

Todaro (2000b:48) mengatakan, bahwa percepatan perubahan struktur ekonomi adalah salah satu syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maju (*modern economic growth*). Pertumbuhan ekonomi maju/modern dicirikan oleh tingkat pembangunan/industrialisasi yang lebih tinggi, dimana perkembangan dan laju pertumbuhan *output* di sektor jasa akan lebih pesat dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya (Tambunan, 2003:73).

Pada awal proses pembangunan, sektor pertanian kontribusinya dominan terhadap PDB, namun dalam perkembangannya kontribusinya mengalami penurunan. Sebaliknya kontribusi sektor industri dan jasa selalu meningkat terhadap PDB. Pergeseran dalam kontribusi ini membawa konsekuensi pada peruntukan lahan yang ada. Proses industrialisasi yang terjadi di negara sedang berkembang pada kenyataannya telah mengurangi ketersediaan lahan pertanian. Sebaliknya, penggunaan lahan untuk kegiatan industri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam hal keputusan tentang peruntukan lahan memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari keputusan terhadap peruntukan lahan dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap distribusi barang dan jasa dalam perekonomian, kesempatan kerja yang dapat tercipta, lokasi sekolah, penyediaan sarana transportasi, fasilitas rekreasi dan lain-lain (Beatley, 1994:4).

Dari uraian latar belakang tersebut dipakai dasar untuk meneliti : “Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali”.

### **1.2 Rumusan Masalah.**

Dari uraian latar belakang, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :



1. Apakah perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bali ?
2. Apakah perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ?
3. Apakah struktur penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ?
4. Bagaimanakah pengaruh perubahan peruntukan lahan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali ?
5. Apakah teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali termasuk jenis teknologi padat modal ataukah padat tenaga kerja ?

### **1.3 Tujuan Studi.**

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap hasil pembangunan ekonomi antar wilayah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara khusus studi ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh struktur penyerapan tenaga kerja sektoral terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
4. Untuk menganalisis adanya pengaruh perubahan peruntukan lahan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

5. Untuk menganalisis jenis teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali.

#### **1.4 Manfaat Studi.**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritik.**

Manfaat teoritik yang dapat dihasilkan oleh studi ini adalah mengembangkan konsep pembangunan wilayah, khususnya perubahan struktur ekonomi yang terintegrasi dengan efek dan dampaknya terhadap hasil pembangunan ekonomi antar wilayah. Di samping itu, studi ini juga diharapkan memperkaya penggunaan alat analisis penelitian, terutama pada penelitian bidang ekonomi pembangunan, mengingat analisis jalur belum banyak digunakan untuk analisis perilaku ekonomi agregat.

##### **1.4.2 Manfaat Praktik.**

Selain memberikan manfaat teoritik, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik sebagai berikut :

1. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengayaan (*enrichment*) pemahaman teori tentang struktur ekonomi daerah, khususnya dalam konteks pembangunan wilayah dengan berbagai determinan yang mempengaruhi struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru, khususnya mengenai perubahan struktur ekonomi daerah dan pengaruhnya terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

3. Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan studi serupa atau obyek yang berbeda dengan studi ini.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi sejak tahun 1950-an dan 1960-an adalah kemampuan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 5 - 7 % atau lebih per tahun. Dalam perkembangannya, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan, karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) saja tidak mampu memecahkan masalah pembangunan secara mendasar. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat yang tidak mengalami perbaikan walaupun target kenaikan PDB per tahun telah tercapai. Oleh karena itu, Arsyad (1999:5) mengatakan, bahwa :

“ Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu : 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), 2. Meningkatnya rasa harga diri (*self - esteem*) masyarakat sebagai manusia dan 3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia”.

Selanjutnya Arsyad (1999:6) mengemukakan, bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya.

Pengertian pembangunan ekonomi dalam perkembangannya telah mengalami berbagai proses penyesuaian mengikuti perkembangan yang terjadi. Setelah perang dunia II berakhir, pembangunan bagi negara-negara yang masih terbelakang mulai banyak dibahas dan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan taraf hidup antara penduduk pada negara-negara yang telah maju dengan negara-negara yang baru atau sedang melepaskan diri dari penjajahan. Pembangunan yang dimaksud pada saat itu lebih mengarah kepada pembangunan yang bersifat ekonomis, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers *et al.* (1991:24) yaitu :

*“Development means a high national income, accompanied by a market economy and a “specialized” society, in which most people work to meet their own immediate consumption needs but to produce particular goods and services needed by others and purchased in cash. In other words, development was seen in terms of the structure and growth of the national economy and degrees of development (or underdevelopment) were most often measured in terms of national income. The two most common indicators of development were the per capita income (national income divided by the size of the population) and the average annual rate of growth in national income”.*

Pengertian pembangunan tersebut di atas dianggap konvensional dan konsep tersebut masih banyak menarik perhatian pemikir pembangunan. Sekitar tahun 60-an terjadi lagi pergeseran dalam pemikiran pembangunan yang bukan lagi berbicara tentang tujuan ekonomi saja. Perubahan pandangan ini terjadi karena disadari, bahwa tujuan *high mass consumption* semakin sulit untuk dicapai dalam kurun waktu yang diharapkan, meskipun standar hidup yang tinggi pada negara yang telah maju masih merupakan impian dan cita-cita dari penduduk di negara berkembang atau dunia ketiga.

Pembangunan merupakan suatu proses yang multi dimensi bukan hanya ditekankan pada tujuan ekonomi semata, yang mencakup berbagai perubahan mendasar. Namun lebih luas lagi dipertegas oleh Todaro (2000b:19), bahwa : *Development must, therefore, be conceive of as a multidimension process involving major changes in social structures, popular attitudes and national institutions as the acceleration of economic growth , the reduction of inequality and the eradiction of absolute poverty.* Dengan demikian, bahwa pembangunan itu merupakan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, dengan tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, dengan tujuan untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu setiap negara di dunia selalu berupaya untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi, walaupun ada kemungkinan akan menjadi ancaman terhadap eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran (Thomas,1996). Sejalan dengan itu Todaro (2000b:123) menjelaskan, bahwa selama tiga dasa warsa terakhir ini perhatian utama masyarakat di dunia tertuju pada cara-cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonom dan politisi dari semua negara, baik itu negara kaya maupun

miskin, yang menganut sistim kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomersatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilihat dari *Gross National Product/Gross Regional Domestic Product (GNP/GRDP)* riil, yang kemudian diturunkan menjadi pendapatan per kapita apabila dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara/daerah tertentu. Akan tetapi indikator pertumbuhan ekonomi bukan hanya dibatasi berdasarkan perubahan pendapatan per kapita saja, tetapi juga mengukur perubahan yang lainnya yang dapat diukur dalam meningkatkan kesejahteraan (Radianto, 2000).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994 : 14). Selanjutnya menurut Boediono (1988 : 48), pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga menjadi proses pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah akumulasi kapital, pertumbuhan dalam tenaga kerja dan kemajuan teknologi (Raey, 1995). Di samping itu, investasi pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan proses produksi yang dikerjakan, karena pendidikan mempengaruhi kemampuan para pekerja secara mendalam bukan hanya secara fisik belaka (Wisana, 2001). Peran kapital akan lebih besar, apabila kapital yang tumbuh bukan hanya kapital fisik saja, tetapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Pertumbuhan ekonomi menurut Lindauer (1971:28), bahwa *growth means that more and more goods and services will be available to meet to needs of the economic*. Menurut pengertian tersebut, pertumbuhan mempunyai makna bertambah banyaknya barang dan jasa yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan dapat pula diartikan sebagai gejala terjadinya kenaikan atau peningkatan efisiensi hasil (*output*) diukur dengan satuan masukan (*input*) (Dodoo, 1997). Akumulasi kenaikan hasil atau peningkatan efisiensi dari keseluruhan unit-unit ekonomi sebagai hasil proses produksi selama periode waktu tertentu merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi (Santoso,2000: 26).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terjadinya distribusi pendapatan yang baik. Distribusi pendapatan adalah hal yang paling menarik untuk dibicarakan dalam konteks pembangunan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi kurang memberi arti bagi pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari anggota masyarakat. Menurut Todaro (2000b:124), pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh adanya 3 faktor atau komponen, yaitu :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja dan
3. Kemajuan teknologi .

Akumulasi modal apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari. Bentuk investasi yang dilakukan dapat bersifat langsung maupun



tidak langsung. Investasi langsung harus diikuti dengan investasi penunjang atau yang disebut infrastruktur, contohnya adalah pembangunan pabrik baru harus diikuti dengan pembangunan jalan dan jembatan. Sementara itu investasi tidak langsung dapat berupa investasi dalam berbagai jenis sumber daya, contohnya adalah pembangunan irigasi.

Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, karena akan menambah jumlah tenaga kerja produktif. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Berdasarkan asumsi ini, pertumbuhan penduduk akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan secara tradisional yang biasanya dilakukan secara manual. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran akan suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran akan barang dan selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Domar mencoba mengembangkan lebih jauh teori Keynes (Bintoro, 1986:25) yang hakekatnya menganalisis persyaratan yang harus ada dalam perekonomian agar terjamin kesanggupan berproduksi yang terus meningkat sebagai akibat kesempatan penanaman modal yang sepenuhnya dipergunakan, sehingga tercapai pertumbuhan mantap atau *steady growth* dalam perekonomian. Teori Harrod-Domar memperhatikan kedua fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan

ekonomi, di mana pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif masyarakat.

Teori pertumbuhan klasik mempunyai banyak variasi tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan Charles Cobb dan Paul Douglas, yang sekarang dikenal dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Menurut fungsi ini, bahwa yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah alat-alat modal, jumlah tenaga kerja dan tingkat teknologi.

Masalah distribusi pendapatan dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik utama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Richardson dalam bukunya *The Principles of Political and Taxation* memberikan dasar teori untuk hubungan tersebut. Richardson mengasumsikan, bahwa aliran modal dari golongan kapitalis dalam sektor industri menuju sektor pertanian akan mengurangi peluang untuk menabung dan menginvestasikan lagi modalnya pada sektor industri produktif lainnya (Abipraja, 2002:69).

Tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara berkembang ternyata berbeda-beda dan juga menghadapi kendala-kendala yang tidak mudah untuk membuka jalan bagi pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan, sehingga menimbulkan masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Menurut Wie (1983:32), bahwa dalam konteks ekonomi makro, tidak sedikit yang mengatakan, bahwa pola pembangunan yang ditempuh oleh negara berkembang mempunyai corak, yaitu manakala pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif pesat, maka hal ini akan selalu dibarengi dengan kenaikan dalam ketimpangan pembagian pendapatan.

Terdapat *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan. Implikasi dari hal ini adalah, kalau pemerintah menginginkan pembagian pendapatan sebagai tujuan utama, maka pertumbuhan ekonomi harus diturunkan pada satu tingkat tertentu. Sebaliknya kalau pemerintah lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pembagian pendapatan harus direlakan tidak berjalan secara memuaskan. Masalah ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan Conyers, *et al.* (1991 : 24) dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

*“It is often accompanied by a variety of social and political problems, including the breakdown of traditional social and political institution which in turn results in increases in crime, deprivation and dependency, new types of health problems and perhaps most important, increasing inequalities between individuals, groups and regions. Furthermore, it also tend to be accompanied by problems related to the physical environment, such as pollution of land, water and atmosphere and the exhaustion of natural resources; in some cases it also has unanticipated economic consequences”.*

Pendapat di atas menyebutkan kesenjangan dalam pembagian pendapatan dapat mengakibatkan pada masalah-masalah lainnya, yakni masalah sosial, kesehatan dan kesenjangan antar kelompok maupun wilayah. Meskipun demikian, bukan berarti pembangunan ekonomi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mempunyai konsumsi nasional yang tinggi (*high mass consumption*) tidak memungkinkan bagi masyarakat. Standar hidup yang tinggi pada negara-negara maju masih tetap menarik.

Dalam proses pembangunan , baik nasional maupun daerah khususnya pembangunan di bidang ekonomi akan selalu terjadi ketimpangan. Menurut Adelman dan Moris dalam Todaro (2000a:166), terdapat delapan proses yang telah

menimbulkan ketidakmerataan pendapatan di negara-negara sedang berkembang kendatipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, yaitu pendapatan uang bertambah tetapi tidak dapat diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang *capital intensive*, sehingga persentase pendapatan dari harta bertambah besar dibanding dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial,
6. Pelaksanaan kebijakan *impor-substitution industries* yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya *term of trade* bagi negara-negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara yang sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Kuznets (1993:55) mengamati perilaku umum yang berkaitan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapatan. Berdasarkan rangkaian data yang ada, Kuznets menemukan bukti, bahwa hubungannya menyerupai U terbalik, artinya perluasan sektor modern yang pada awalnya meningkatkan pendapatan di antara rumah tangga kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mulai menurun. Menurutnya, penyebab kesenjangan ekonomi adalah sebagai berikut :

Jika perbedaan pendapatan per kapita meningkat, atau jika perbedaan distribusi pendapatan pada sektor B lebih tinggi dibandingkan dengan sektor A, atau jika kedua perbedaan itu timbul bersamaan.

Jika distribusi pendapatan intersektor sama untuk kedua sektor, peningkatan kesenjangan distribusi pendapatan di seluruh negara hanya berlaku pada peningkatan pendapatan per kapita sektor B.

Jika perbedaan pendapatan per kapita antara kedua sektor konstan, tetapi distribusi intersektor B lebih besar dibandingkan dengan sektor A.

Peningkatan proporsi jumlah total sektor B, dari perbedaan distribusi yang besar dalam sektor B, dan semakin tingginya tingkat pendapatan per kapita pada sektor B yang melebihi tingkat pendapatan sektor A. Walaupun perbedaan pendapatan per kapita antara kedua sektor tetap konstan, dan distribusi intersektor sama di antara kedua sektor, pergeseran jumlah proporsi yang kecil akan menghasilkan perubahan distribusi pendapatan yang berarti.

Adapun penurunan persentase bagian dari kelompok penghasilan tinggi terhadap pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan jatuhnya proporsi sektor A di bawah garis total pendapatan.

Semua yang disebutkan di atas adalah merupakan proses yang menyebabkan kesenjangan ekonomi akibat dari pergeseran dari sektor perdesaan (A) menuju sektor perkotaan (B).

### **2.1.3 Teori Ekonomi Wilayah**

#### **2.1.3.1 Teori pertumbuhan ekonomi wilayah Neoklasik**

Teori-teori pertumbuhan wilayah yang berkembang sejak tahun 1950, pada hakekatnya merupakan teori-teori pertumbuhan ekonomi nasional yang disesuaikan pada skala wilayah dengan anggapan-anggapan dasar, bahwa suatu wilayah adalah *'mini nation'* (Firman, 1985:3). Analisis ekonomi wilayah pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ekonomi ke berbagai lokasi dalam suatu "*economic space*", meninjau secara sektoral dan secara makro.

Analisis makro dan sektoral mengenai perekonomian wilayah antara lain meliputi analisis faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian wilayah dan corak strategi dasar maupun kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan suatu wilayah. Aspek dasar ekonomi regional dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu pembahasan tentang metode untuk menganalisis ekonomi wilayah dan pembahasan

faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah, termasuk didalamnya pemaparan tentang kebijakan yang seharusnya dijalankan untuk menciptakan pembangunan yang lebih seimbang dan mempercepat pembangunan daerah yang kurang berkembang.

Teori pertumbuhan wilayah Neoklasik dikembangkan oleh Borts (1960), Siebert (1969) dan Richardson (1973). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal dan kemajuan teknologi. Asumsi yang mereka gunakan dikembangkan dari gagasan-gagasan ilmu ekonomi neoklasik, dalam hal ini pemahaman tentang ruang dinyatakan dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan realokasi faktor-faktor produksi, pergerakan barang dan penyampaian informasi.

Hal yang penting dari teori ini adalah penekanannya pada perpindahan faktor-faktor (khususnya modal dan tenaga kerja) antar wilayah. Tenaga kerja dan modal dalam satu wilayah lebih mudah berpindah dibandingkan antar negara, hal ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini berarti Neoklasik juga mengasumsikan adanya fleksibilitas faktor harga yang sempurna, sehingga perpindahan tenaga kerja dan modal antar wilayah secara otomatis akan menghilangkan perbedaan-perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah. Pada akhirnya hal ini menyeragamkan pendapatan per kapita wilayah (Abipraja, 2002:58).

### **2.1.3.2 Teori basis ekonomi (*economic base theory*)**

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi wilayah menyatakan, bahwa pertumbuhan wilayah diakibatkan oleh penentu endogen dan eksogen, yaitu faktor-

faktor yang terdapat di dalam wilayah itu sendiri dan di luar wilayah atau akibat kedua faktor tersebut sekaligus. Teori Harrod-Domar dan teori Neoklasik adalah model-model ekonomi makro yang lebih banyak membahas penentu endogen dalam pertumbuhan wilayah. Berdasarkan penggunaan model ekonomi makro tersebut, tanah (sumber daya alam), sumber daya pengangkutan, teknologi dan sistem sosial politik sebagai penentu endogen pertumbuhan ekonomi wilayah (Glasson, 1974 : 141).

Sementara itu penentu eksogen dapat dilihat dari bagaimana wilayah tersebut dapat mengembangkan perekonomiannya dengan ekspor. Menurut Richardson (1978:150), berdasarkan model-model basis ekspor, pertumbuhan suatu daerah atau wilayah ditentukan pada industri ekspornya dan kenaikan permintaan yang bersifat eksternal bagi daerah yang bersangkutan. Model ini memprediksikan, bahwa semakin luas basis ekspor sesuatu daerah akan cenderung menaikkan tingkat pertumbuhan.

Model basis ekspor ini selaras dengan pendapat Douglass C North (1955) yang merupakan pelopor pertama dalam teori ini. North menyatakan, bahwa laju pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh lajunya perkembangan sektor ekspor wilayah tersebut dan peranan ekspor dalam pembangunan wilayah akan bertambah penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk dan keluar secara berlebihan ke wilayah tersebut dan sektor ekspor memegang peranan yang relatif penting dalam perekonomian wilayah yang dimaksud. Perloff dan Wingo mengembangkan sektor ekspor di suatu daerah besar sekali dalam pembangunan ekonomi daerah, karena disamping menyediakan pendapatan di sektor tersebut, sektor

ini juga menciptakan efek multiplier keseluruhan perekonomian daerah tersebut (Friedman dan Alonso, 1975:307).

Strategi pembangunan wilayah pada teori ini menekankan pada arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mencakup pengurangan hambatan terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor yang akan didirikan di daerah tersebut.

### **2.1.3.3 Teori baru pertumbuhan wilayah (*the new regional growth theory*)**

Teori baru pertumbuhan wilayah menekankan pada pengenalan upaya-upaya untuk memperkenalkan perkembangan teknis investasi secara nyata. Teori ini dikembangkan oleh Arrow, Schultz, Becker dan Uzawa, kemudian dilanjutkan oleh Romer. Teori-teori ini dalam beberapa cara membuat perubahan teknis dari dalam, sehingga perubahan itu tanggap terhadap dorongan ekonomi. Romer dalam Abipraja (2002:60) menampilkan suatu model pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan *output*. Hal ini berarti, bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Bukti-bukti empirik menunjukkan, bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara ukuran ketersediaan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Peningkatan pengetahuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan inovasi. Lebih lanjut Harbison dan Myers (1970) dalam Jhingan (1999:72)



mengatakan, bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan manusia, keahlian dan keterampilan, serta kemampuan orang-orang dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, hal ini adalah proses akumulasi sumber daya manusia dan investasinya secara efektif dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Teori baru pertumbuhan wilayah juga melihat kaitan dengan iklim keterbukaan dalam ekonomi nasional, dimana keterbukaan akan memberikan keuntungan skala ekonomis, transfer teknologi dan eksternalities positif lainnya yang diperoleh dari perdagangan antar wilayah. Dengan semakin terbukanya suatu wilayah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

#### **2.1.3.4 Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah**

Teori ini muncul sebagai ketidakpuasan terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Teori ketidakseimbangan mengemukakan, bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara. Bahkan ada kemungkinan, bahwa kekuatan-kekuatan tersebut akan menciptakan atau memperburuk perbedaan-perbedaan tersebut. Myrdal dalam Abipraja (2002:59) berpendapat, bahwa :

“Perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan. Beranjak dari pendapat ini, ia mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antar wilayah. Menurut Myrdal, terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, yaitu efek balik negatif (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*). Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah

yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat rendah”.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Myrdal di atas, Hirschman dalam Jhingan (1999:58) juga mengemukakan, bahwa :

“ Jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Jika perbedaan antara daerah tersebut semakin menyempit, berarti terjadi imbas yang baik karena terjadi proses peneteskan kebawah (*trickling down effects*), namun jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*)”.

Bilamana *spread effect* lebih besar dibandingkan *backwash effect*, tentu tidak menjadi masalah, namun seperti tesis yang diungkapkan Myrdal di daerah-daerah kurang berkembang, *spread effect* jauh lebih kecil dari pada *backwash effect*. Ekspansi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya jurang ketimpangan kesejahteraan antara kedua daerah tersebut semakin melebar.

Sejalan dengan apa yang di jelaskan di atas, Jhingan (1999:62) mengungkapkan, bahwa pengertian ketimpangan dapat berupa ketimpangan dalam masyarakat, maupun dalam artian ketimpangan regional. Keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan mantap ternyata belum dapat mengatasi permasalahan dualisme ekonomi sebagai satu diantara hal mendasar dalam perekonomian berbagai negara berkembang. Kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita penduduknya.

Sementara itu dalam konteks regional ternyata banyak sekali kenyataan empiris yang telah menunjukkan, bahwa pertumbuhan antar wilayah dalam suatu

Pendekatan berikutnya menurut Zadjuli (1986: 35) adalah :

“ Pendekatan kedua, yaitu pendekatan struktur sektoral mencoba mengamati sampai seberapa jauh pola pertumbuhan dan distribusi sektoral pada suatu daerah dengan mengelompokkan jenis kegiatan mana yang masuk sektor basis, dengan menggunakan perhitungan *Location Quotient (LQ)*. Pendekatan ini selain membedakan kegiatan ekonomi menurut 9 sektor, juga menggunakan pembagian kegiatan ekonomi ke dalam kelompok sektor Primer, Sekunder dan Tersier, juga diperoleh transisi/pergeseran kegiatan sektoral, pola pertumbuhan sektoral serta membedakan sektor basis dan non basis.

Pendekatan ketiga adalah merupakan evaluasi pendahuluan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan sektor ekonomi di suatu wilayah itu terkonsentrasikan, khususnya sektor industri dengan berbagai pertimbangan keuntungan komperatif, teknologi yang digunakan, peranan modal, tenaga kerja dan peranan nilai tambah yang dapat diciptakan oleh industri yang dimaksud.”

Pertumbuhan regional dalam jangka panjang antara lain dijelaskan dalam teori sektor (*sector theory*) oleh Emerson (1975, 133-134). Teori ini memandang pertumbuhan ekonomi sebagai evolusi internal dari spesialisasi dan pembagian kerja.

Selanjutnya dikatakan :

*“The origin of sector theory is the Clark – Fisher hypothesis that economic growth (per capita income) depend on how rapidly resources are shifted out of agriculture (primary activity) and into manufacturing (secondary) and service (tertiary) activities. Resources shifts occur because of both supply and demand pressure ”.*

Hipotesis Clark – Fisher adalah pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita akan tergantung pada kekuatan sumber daya manusia yang bergeser dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Kelanjutan dari teori tersebut di atas adalah timbulnya teori tahapan (*stages theory*) yang menyatakan, bahwa pembangunan regional adalah suatu proses evolusi internal yang meliputi berbagai tahap. Emerson *et al.* (1975:133) menjelaskan, bahwa tahap-tahap pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut :

*“Self-sufficient subsistence economy. A regional economy which is basically self contained has little specialization and little export trade. In*

*developed nations, such economies are virtually non-existent. With no significant export trade, such regions have few interregional transportation links.*

*Specialization in primary activity. Historically regional growth stems from such primarily-activity specialization as agriculture or mining. The expanding interregional trade resulting from this specialization encourages and is encouraged by an improvement in transportation. Better transportation improves access both to markets and supplies.*

*Development of secondary industries. As primary activity expands, population and supporting (secondary) activities also grow. Establishment providing services to the primary processing activity and to the regional population development grow”.*

Selanjutnya F.M. Hoover dan Joseph Fisher ( Zadjuli, 1986 : 58-60)

membagi tahap-tahap Pembangunan Regional sebagai berikut :

**Ekonomi Subsisten (*Self – Sufficient Subsistence Economy*).**

Dalam tahap ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri pada tingkat yang hanya untuk hidup sehari-hari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung dari sektor pertanian dan mengumpulkan hasil-hasil alam lainnya.

**Peningkatan Transportasi dan spesialisasi lokal (*Transport improvement and local specialization*).**

Pada tahap kedua telah terdapat peningkatan, baik dalam prasarana/infrastruktur maupun sarana transport yang akhirnya mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasi tertentu dengan perdagangan antar lokasi tersebut. Di dalam masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian, dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian yang bersangkutan.

**Perdagangan antar daerah (*Interregional trade*).**

Pada tahap ketiga ini telah terjadi perkembangan perdagangan antar daerah. Hal ini dimungkinkan karena telah terdapat perbaikan di bidang transportasi dan telah terjadi pula perubahan-perubahan di sektor kegiatan pertanian dari arah peningkatan produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititik beratkan ke intensifikasi. Di samping itu terdapat perkebunan dan peternakan sebagai wujud dari spesialisasi dan intensifikasi. Telah terjadi spesialisasi kegiatan antar daerah juga mendorong perkembangan di sektor perdagangan , yang sekarang mencakup jarak antar daerah bukan hanya di dalam desa saja.

**Industri (*Industrialization*).**

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin menurunnya potensi peningkatan dari produksi pertanian dan kegiatan ekstraktif yang lain karena hukum

*diminishing return*, maka daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja, yaitu dengan industrialisasi. Industrialisasi disini lebih dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri manufaktur serta pertambangan dan galian. Pada awal periode industrialisasi ini terdapat industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan kehutanan menjadi barang konsumsi sehari-hari seperti hasil industri yang berupa makanan dan minuman, tekstil serta perkayuan.

**Spesialisasi daerah memproduksi barang untuk ekspor (*Regional Specialization in tertiary industries producing for export*).**

Di dalam tahap terakhir ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi dalam kegiatan tersier untuk keperluan penjualan ke daerah lain termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

**Aliran faktor produksi antar daerah (*Interregional Flow of Factors*).**

Bersamaan dengan tahapan terakhir, peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya menaikkan tingkat mobilisasi faktor produksi (modal dan buruh/tenaga kerja) antar daerah.

Kesimpulan dari berbagai teori tersebut, bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat terpengaruh oleh aktivitas ekonomi, baik dari dalam maupun dari luar dengan tingkat spesialisasi sektor tersier. Tahap-tahap pertumbuhan berikutnya akan meningkatkan lapangan kerja di sektor industri dan bila ditunjang dengan infrastruktur dan arus informasi akan mempermudah mobilisasi faktor produksi modal dan tenaga kerja antar daerah.

**2.1.4 Teori Pembangunan Berimbang Versus Pembangunan Tidak Berimbang**

Pendekatan pembangunan berimbang (*balanced development approach*) yang sering disebut dengan “ *the big push* “ menyarankan agar semua sektor, baik sektor pertanian maupun sektor-sektor lain secara keseluruhan dibangun secara bersamaan. Dana yang tersedia dibagi sedemikian rupa, sehingga seluruh sektor dapat mencapai pertumbuhan yang sama. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan suatu lompatan dari keadaan semula mencapai keadaan baru di mana perekonomian berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi, namun komposisi sektoral

tetap seperti semula (Miernyk, 1971 : 576 -- 578). Sebaliknya dalam pendekatan pembangunan tidak berimbang (*unbalanced development approach*), penggunaan dana yang tersedia dipusatkan pada satu atau beberapa sektor, mengingat akan terbatasnya dana. Penanaman modal tersebut biasanya lebih mengutamakan pada asas keterkaitan yang tinggi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, untuk memilih satu atau beberapa sektor pendobrak dari keterbelakangan ini tidak mudah, karena harus diketahui koefisien teknis dari tabel *input-output* yang umumnya belum ada di negara yang sedang berkembang. Studi ini akan menerapkan analisis tersebut untuk kajian antar wilayah, yaitu perbandingan antar keseimbangan daerah kabupater/kota.

## **2.1.5 Teori Ekonomi Kependudukan**

### **2.1.5.1 Pembangunan manusia.**

Pembangunan manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana namun seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek yang hanya mengejar ekonomi semata. Menurut Irawan dan Suparmoko (1990:92), ada empat aspek penduduk yang perlu diperhatikan di negara-negara sedang berkembang, yaitu :

Adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi

Adanya struktur umur yang tidak favorabel.

Tidak adanya distribusi penduduk yang seimbang

Tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih

Lebih lanjut Irawan mengatakan, bahwa rendahnya kualitas penduduk juga merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Pembangunan memerlukan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Dengan kata lain pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi.

Menurut Paolo Freire dalam Baswir (1999:66), pendidikan terdiri dari dua tahap. *Pertama*, pendidikan harus membahas mengenai kesadaran yang mencakup masalah perilaku, pandangan dunia dan etika. *Kedua*, pendidikan bukan hanya milik salah satu strata masyarakat, tetapi pendidikan bagi keseluruhan manusia dalam proses pencapaian kebebasan yang langgeng.

Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sejalan dengan itu Simanjuntak (2002) menegaskan, bahwa semakin tinggi pendidikan semakin tinggi produktivitas kerja.

Kenyataan empiris membuktikan, bahwa penambahan modal fisik kurang memuaskan dalam strategi pembangunan, maka pendekatan sumber daya manusia atau mutu modal manusia dipandang sebagai satu pilihan yang tepat untuk negara-negara berkembang dengan melihat, bahwa jumlah penduduk yang besar dapat merupakan aset bagi pembangunan. Beberapa indikator yang biasa dipakai untuk memantau perkembangan sumber daya manusia atau mutu modal manusia menurut Tjiptoherijanto (2002:34) adalah :

Tingkat kematian bayi.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Persentase penduduk miskin.

Lapangan pekerjaan.

### **2.1.5.2 Pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan**

Dalam bukunya *Essay on the Principle Population*, T.R. Malthus dalam Sumardi (2003:3) mengemukakan, bahwa penduduk apabila dibiarkan saja, maka jumlahnya akan berkembang secara deret ukur itu bergerak, 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512, 1024, ..... kemudian akhirnya menjadi sedemikian besar, sehingga tiada tempat lagi di bumi ini untuk seluruh manusia yang menghuninya. Di lain pihak alat-alat pemuas kebutuhan manusiapun berkembang menurut deret hitung saja, 1,2,3,4,5,.... Melihat perkembangan jumlah penduduk yang demikian, menurut pendapatnya pada saat jumlah penduduk telah berlipat ganda, maka dunia akan terasa sempit dan alat pemuas kebutuhan jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh *The Law of Diminishing Return*, di mana alat pemuas kebutuhan tidak dapat mengejar deret ukur pertumbuhan jumlah penduduk.

Menurut Tjiptoherijanto (1999), pertumbuhan penduduk yang mendiami suatu daerah dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni (a) tingkat kelahiran; (b) tingkat kematian; dan (c) migrasi. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi masuk akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk, sementara itu migrasi keluar dan tingkat kematian yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Tingkat kematian yang tinggi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan yang



rendah. Keadaan penduduk pada tahun tertentu didapat menurut persamaan yang disebut dengan *Balancing Equation*, dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$P_t = P_0 + B - D + I - O$$

Di mana :

$P_t$  adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu

$P_0$  adalah Jumlah Penduduk tahun sebelumnya

$B$  adalah Jumlah kelahiran

$D$  adalah Jumlah kematian

$I$  adalah Migrasi masuk

$O$  adalah Migrasi Keluar

Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa permasalahan yang jauh lebih rumit, karena masalah ini lebih ditekankan pada kesejahteraan penduduk itu sendiri. Pertumbuhan penduduk yang cepat membawa konsekuensi tersendiri terhadap kualitas hidup, yang perlu dicarikan jalan keluar, untuk menuju kondisi kehidupan (*standard of living*) kearah yang lebih baik lagi/sejahtera. Untuk mengukur kesejahteraan, dapat menggunakan *Human Development Index (HDI)*, atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen IPM adalah umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pendapatan riil per kapita dalam rentang antara 0 – 1. Skala 0 menunjukkan pembangunan manusia rendah dan 1 menunjukkan pembangunan yang tinggi. Menurut Todaro (2000b : 65), besaran HDI dapat menunjukkan 3 katagori, yaitu :

0,00 – 0,50 = Pembangunan manusia rendah

0,51 – 0,79 = Pembangunan manusia sedang

0,80 – 1,00 = Pembangunan manusia tinggi

### 2.1.6 Teori Perubahan Struktur Ekonomi.

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri dan jasa. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural).

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (*urban*). Dalam teorinya, Lewis mengasuransikan, bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. *Over Supply* tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah.

Nilai produk marjinal nol, artinya fungsi produksi di sektor pertanian (disebut juga sektor pedesaan) yang telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *diminishing return* : semakin banyak orang bekerja di sektor pertanian, semakin rendah tingkat produktivitas tenaga kerjanya. Dalam kondisi seperti ini, pengurangan jumlah pekerja tidak akan mengurangi jumlah *output* di sektor tersebut karena proporsi tenaga kerja terlalu banyak dibandingkan proporsi *input* lain, seperti tanah

dan kapital. Akibat *over supply* tenaga kerja ini, upah atau tingkat pendapatan di pertanian/pedesaan menjadi sangat rendah.

Sebaliknya, di sektor perkotaan sektor industri mengalami kekurangan tenaga kerja. Sesuai perilaku rasional pengusaha, yakni mencari keuntungan maksimal, kondisi pasar buruh seperti ini membuat produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan nilai produk marginal dari tenaga kerja positif, yang menunjukkan, bahwa fungsi produksinya belum berada pada tingkat optimal yang dapat dicapai. Sesuai hukum pasar, tingginya produktivitas membuat tingkat upah riil per pekerja di sektor perkotaan tersebut juga tinggi.

Perbedaan upah di pertanian/pedesaan dan di industri/perkotaan menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertama ke sektor kedua, sehingga terjadilah suatu proses migrasi dan urbanisasi. Tenaga kerja yang pindah ke industri mendapat penghasilan yang lebih tinggi dari pada sewaktu masih bekerja di pertanian. Secara agregat, berpindahnya sebagian tenaga kerja dari sektor dengan upah rendah ke sektor dengan upah tinggi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat yang dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan di negara bersangkutan.

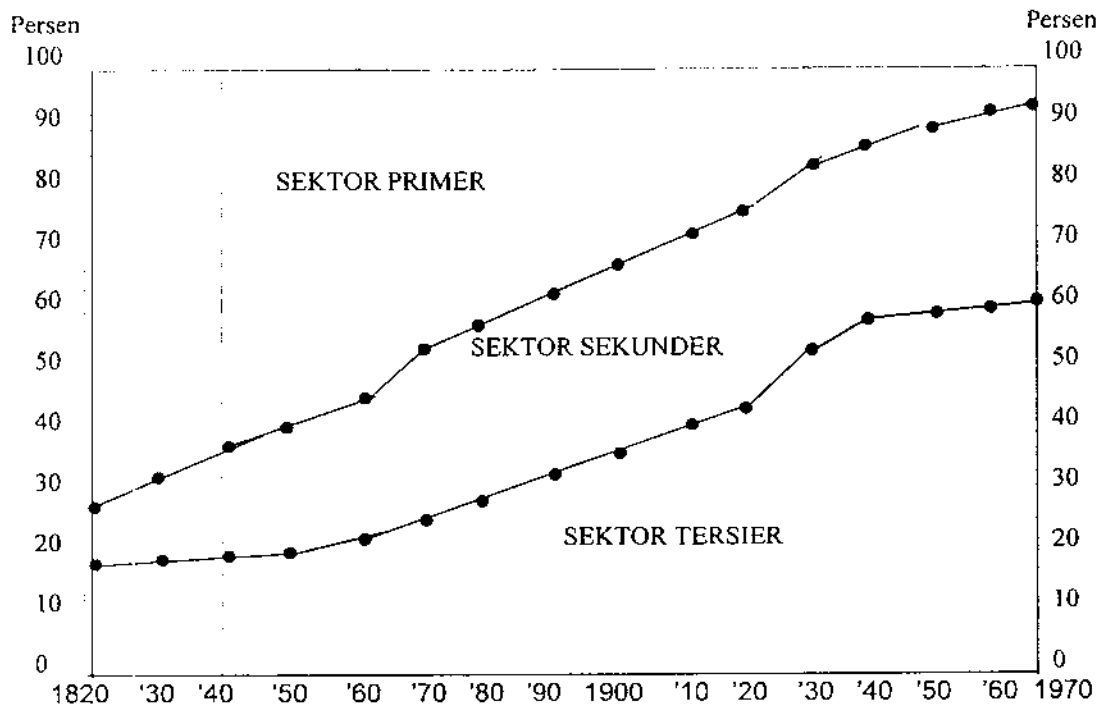
Kerangka teori pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori *pattern of development*, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) dalam Tambunan (2001: 61), mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang membawa perubahan

dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan *family size* yang semakin kecil, struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian atau/dan sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor nonprimer, khususnya industri.

Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Fisher *and* Colin Clark dalam Miernyk (1971:555– 557). Teori ini menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan perubahan penyerapan tenaga kerja yang didasari oleh pengalaman pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari tahun 1820 sampai tahun 1970. Lapangan pekerjaan dalam perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : sektor primer, sekunder dan tersier. Selama satu setengah abad tersebut telah terjadi perubahan struktur penyerapan tenaga kerja masyarakat, dimana :

- a. Sektor primer dari 72 % menjadi tinggal 8 % saja ;
- b. Sektor sekunder meningkat dari 13 % menjadi 34 % ;
- c. Sektor tersier meningkat pula dari 15 % menjadi sekitar 58 %;

Perubahan/transisi sektoral dari perekonomian Amerika Serikat menurut perubahan penyerapan tenaga kerja ditunjukkan pada Gambar 2.1 di halaman 54. Teori perubahan struktur ekonomi dikembangkan lebih lanjut dengan mendasari pada penelitian empiris Clark dan Fisher oleh Kuznets, Hagen dan Hawrylyshyn pada tahun 1969 kemudian oleh Chenery, Elkington dan Sims pada tahun 1970



Sumber : Miernyk (1971 : 555 )

**Gambar 2.1 PERUBAHAN/TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT MENURUT PERUBAHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 1820 – 1970**

(Yotopoulos dan Nugent, 1976 : 287).

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri manufaktur dengan *increasing returns to scale* (relasi positif antara pertumbuhan *output* dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian tersebut pola struktur yang diteliti termasuk nilai tambah (*value added*) bukan hanya penyerapan tenaga kerja. Disimpulkan, bahwa perubahan komposisi/distribusi sektoral di semua negara yang diamati sangat ditentukan oleh besarnya jumlah pembentukan kapital terhadap *Gross National Product*, baik yang dibiayai oleh tabungan domestik maupun yang dibiayai oleh ekspor barang produksi sektor Primer. Selanjutnya Chenery (1974) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi *aggregate demand* / perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan *aggregate supply* diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Djojohadikusumo (1994 : xxi) menyatakan, bahwa :

“Pembangunan ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi berkisar pada perubahan struktural. Perubahan struktural ini menyangkut perubahan pada struktur dan komposisi produk nasional, pada kesempatan kerja produktif, pada ketimpangan antar sektor, antar daerah, antar golongan masyarakat, pada kemiskinan dan kesenjangan antara golongan berpendapatan rendah dan tinggi”.

Menurut Kuznets, pengalaman empiris membuktikan, bahwa dengan meningkatnya pendapatan (pertumbuhan ekonomi) akan terjadi pergeseran-pergeseran pada komposisi produk nasional (pergeseran di antara sumbangan sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap produk nasional), pada kesempatan kerja produktif (dari sektor Primer beralih pada sektor Sekunder dan Tersier) dan pada pola perdagangan (dari komoditi Primer ke barang manufaktur dan pemberian jasa).

Lebih lanjut Kuznets (1993:52) menyatakan, bahwa sejarah pertumbuhan negara-negara yang sekarang maju menunjukkan pentingnya tingkat perkembangan struktural dan sektoral yang tinggi yang melanda setiap aspek perekonomian.

Prosesnya sendiri menyatu dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen yang utama dari proses perubahan struktural tersebut antara lain mencakup pergeseran pemusatan aktivitas secara berangsur-angsur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian (dewasa ini, pergeseran itu seperti juga tengah berlangsung, yaitu dari sektor industri ke sektor jasa, perubahan besar dalam skala atau rata-rata unit produksi, yaitu dari pola produksi yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan keluarga dan perusahaan perorangan berskala kecil ke arah pola produksi masal yang ditangani oleh perusahaan nasional dan multi nasional). Selain itu juga terjadi pergeseran lokasi dan status pekerjaan mayoritas angkatan kerja dari daerah pedesaan. Semula mereka lebih banyak menggeluti sektor pertanian di desa asalnya, tetapi kemudian bergerak ke sektor manufaktur serta jasa-jasa di daerah perkotaan.

Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai *output* dari setiap sektor dalam pembentukan PDRB atau Produk Nasional Bruto (PNB). Kontribusi *output* dari pertanian terhadap pembentukan PDRB maupun PNB mengecil, sedangkan pangsa PDRB dari industri manufaktur dan jasa mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB.

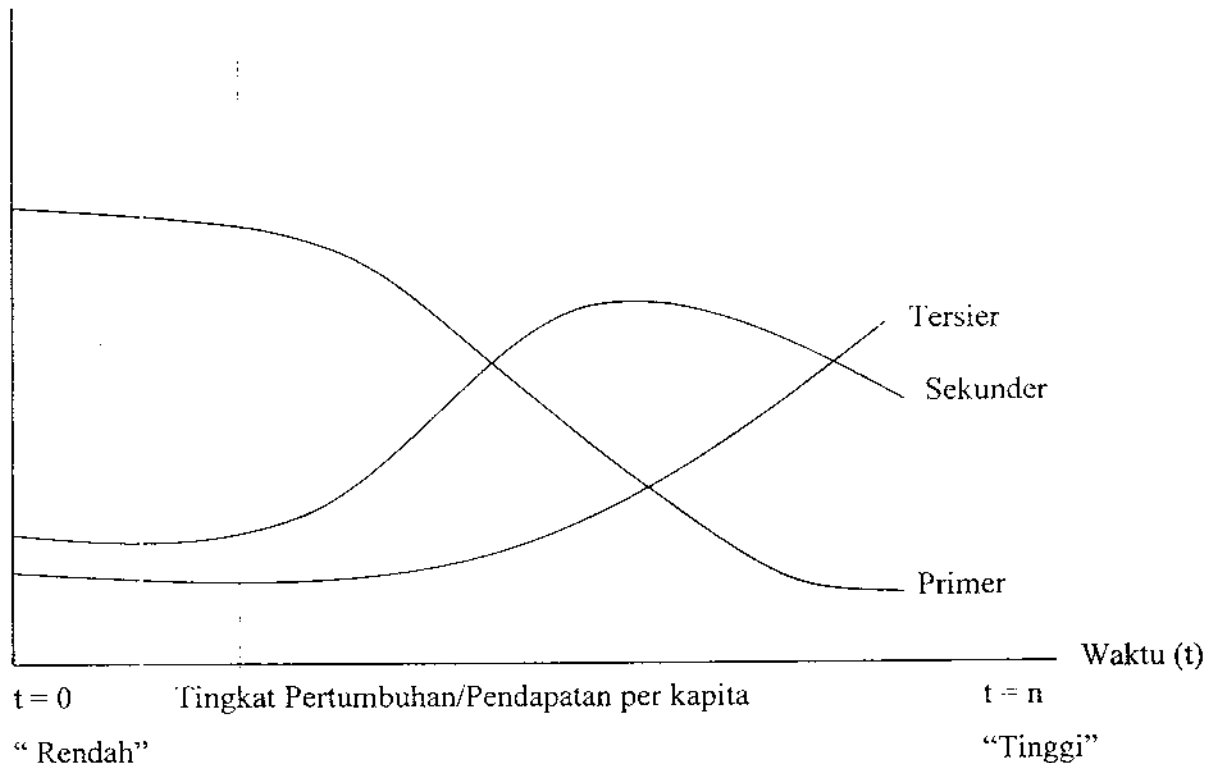
Chenery lebih lanjut menyimpulkan, bahwa proses transformasi struktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik kearah *output* industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. Perubahan struktur ekonomi (*transformasi struktural*) dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai *output* atau nilai tambah dari setiap sektor didalam pembentukan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Pendapatan Nasional.

Berdasarkan hasil studi dari Chenery dan Syrquin dalam Tambunan (2001:64-65) dinyatakan, bahwa perubahan pangsa tersebut dalam periode jangka panjang menunjukkan pola seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 di halaman 58. Dari Gambar 2.2 dapat diketahui, bahwa kontribusi *output* dari sektor Primer terhadap pembentukan PNB mengecil, sedangkan kontribusi sektor Sekunder dan Tersier meningkat seiring dengan peningkatan PNB per kapita. Berdasarkan penelitiannya di negara-negara sedang berkembang disimpulkan, bahwa pada saat PNB per kapita US\$ 200, maka sektor Primer menguasai 45 % dari PNB, sementara sektor Sekunder hanya menyumbang 15% saja. Pada saat PNB per kapita mencapai US\$ 1.000, kontribusi *output* dari sektor Primer mengalami penurunan menjadi 20% dan sektor Sekunder meningkat menjadi 28%, berarti kontribusi sektor tersier adalah sebesar 52%. Indikator penting kedua yang sering digunakan di dalam studi empiris untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Dengan pola yang sama seperti dalam Gambar 2.2, pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah (tahap awal pembangunan ekonomi) sektor Primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir pembangunan ekonomi) sektor Sekunder menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Boediono dan Gozali (1991) menyatakan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergeseran struktur ekonomi tersebut seperti yang diidentifikasi oleh Syrquin dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, penyebabnya adalah pengaruh berlakunya hukum *Engel*,



Pangsa *output*  
Sektoral terhadap  
Pembentukan PDB (%)



Sumber : Tambunan (2001 : 65)

Gambar 2.2 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM PROSES  
PEMBANGUNAN EKONOMI

perdagangan, teknologi dan kebijakan substitusi impor. Hukum *Engel* menyatakan, bahwa semakin tinggi pendapatan proporsi untuk konsumsi semakin menurun. Mengingat konsumsi itu lebih banyak kebutuhan Primer (produk pertanian), maka semakin tinggi pendapatan semakin menurun pula kebutuhan akan produk pertanian. Dipihak lain, elastisitas pendapatan terhadap industri pengolahan tinggi, sehingga semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula permintaan terhadap produk industri pengolahan.

Situasi perdagangan menunjukkan menurunnya ekspor bahan mentah dan meningkatnya ekspor bahan jadi yang disebabkan lebih tingginya nilai tukar bahan jadi dari pada bahan mentah. Berkembangnya teknologi memungkinkan munculnya bahan-bahan sintetis yang dapat menggantikan bahan-bahan alam. Kebijakan substitusi impor yang umumnya adalah produk industri juga meningkatkan permintaan akan barang-barang hasil olahan. Semua faktor di atas menyebabkan secara relatif menurunnya permintaan produk Primer dan meningkatnya permintaan terhadap produk Sekunder dan Tersier (Soepono, 2001).

Dari sisi penawaran, pergeseran struktur ekonomi tersebut terjadi karena realokasi faktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan lain-lain dari sektor Primer yang produk marginalnya lebih rendah ke sektor Sekunder dan Tersier yang produk marginalnya lebih tinggi. Tingginya produk marginal di sektor Sekunder disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan sektor Sekunder akibat semakin tingginya permintaan akan komoditi Sekunder dan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor tersebut. Di sini terlihat kaitan yang erat antara sisi permintaan dan penawaran dengan pergeseran struktur ekonomi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, menurut Weiss (1988) dalam Tambunan (2001 : 59), perubahan struktur ekonomi adalah transformasi struktural nilai tambah dari ekonomi tradisional dengan pertanian (Primer) sebagai sektor utama ke ekonomi modern (non Primer) yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi

Menurut Todaro (2000a : 443), pergeseran struktur ekonomi dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier di negara-negara yang sedang berkembang

akan menimbulkan masalah, karena turunnya kontribusi dan pertumbuhan sektor Primer tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang seimbang atau lebih cepat. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor Primer ke non Primer lebih cepat dari transformasi tenaga kerja akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang bekerja sama dengan BAPPEDA Provinsi Bali tahun 1999 menyimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat adalah ketenagakerjaan. Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi meningkat. Disamping itu perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke sektor modern disamping cenderung meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, juga dapat meringankan beban fisik masyarakat yang selanjutnya dapat berpengaruh pada kesehatan mereka.

### **2.1.7 Konsep Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan dan kondisi ekonomi suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah jaminan tercapainya kemakmuran di suatu daerah apabila tingkat pengangguran di daerah itu juga relatif tinggi. Tingginya tingkat pengangguran, yang berdampak pada buruknya distribusi pendapatan, berpotensi memunculkan gejolak sosial yang pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi perkembangan ekonomi

selanjutnya. Dalam teori ekonomi makro, variabel tenaga kerja merupakan variabel terpenting dalam mengukur tingkat *output* suatu perekonomian.

Dalam Negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar yang menjadi salah satu masalah utama adalah pengangguran struktural yang sangat besar. Masalah ini disebabkan oleh karena struktur ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Jumlah angkatan kerja yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Permintaan terhadap tenaga kerja selain dilihat secara mikro, yaitu dari segi perusahaan, juga dapat dilihat secara makro, baik secara sektoral, jenis jabatan, pendidikan, status hubungan kerja dan lain-lain.

Tenaga kerja (*Man Power*) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Menurut Mulyadi (2003:60), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat

memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi, yaitu produksi barang dan jasa.

Di Indonesia, BPS mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 1998 mulai menggunakan umur 15 tahun ke atas atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya. Menurut Simanjuntak (1998:1), tenaga kerja mengandung dua pengertian. *Pertama*, tenaga kerja mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. *Kedua*, tenaga kerja mencakup orang yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

#### **a. Angkatan Kerja**

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan (Swasono dan Sulistyarningsih, 1987:35). Jadi disini tidak semua tenaga kerja atau penduduk usia kerja masuk pasar kerja, karena ada sebagian yang bersekolah, cacat, ibu rumah tangga atau pensiunan yang tidak masuk pasar kerja.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali,

tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah penduduk usia kerja atau struktur umur penduduk. Sedangkan bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang dalam kurun waktu tertentu.

#### **b. Bukan Angkatan Kerja**

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang non aktif secara ekonomi. Mereka terdiri dari yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pensiunan, mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis.

#### **2.1.7.1 Kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja**

Istilah *employment* dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan. Penggunaan istilah *employment* sehari-hari biasa dinyatakan dengan jumlah orang dan yang dimaksudkan adalah sejumlah orang yang ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur, yaitu lapangan atau kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi pengertian *employment* adalah kesempatan kerja yang sudah diraih (Soeroto, 1983:7). Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi

dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat usaha padat modal atau padat karya, meskipun penggambaran dari sudut pandang makro. Menurut Widodo (1990 : 111), rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah :

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta PDB}$$

Di mana :

$E_{kk}$  adalah Elastisitas kesempatan kerja

$\Delta KK$  adalah Laju pertumbuhan kesempatan kerja

$\Delta PDB$  adalah Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

#### 2.1.7.2 Kesempatan kerja (KK) sektoral

Menurut Manning (1990) dalam Soedarsono (1999), permintaan terhadap tenaga kerja selain dapat dilihat secara mikro, yaitu dari segi perusahaan, juga dapat dilihat secara makro, baik secara sektoral, jenis jabatan dan status hubungan kerja. Permintaan tenaga kerja secara makro juga sering dikenal dengan istilah kesempatan kerja atau jumlah orang yang bekerja. Konsep bekerja atau kesempatan kerja mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Suatu negara dianggap baru mulai mendekati titik balik atau *turning point* dalam pembangunan apabila jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mulai turun secara absolut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan sektor jasa, serta keberhasilan strategi pembangunan

biasanya sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor manufaktur yang dianggap berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas pekerja. Hubungan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja sektoral dengan laju pertumbuhan ekonomi sektoral dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja sektoral. Menurut Widodo (1990 : 113), rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja sektoral adalah :

$$Ekks = \frac{\Delta KKS}{\Delta VAS}$$

Di mana

Ekks adalah Elastisitas kesempatan kerja sektoral

$\Delta$  KKS adalah Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektoral

$\Delta$  VAS adalah Laju pertumbuhan nilai tambah sektoral

### 2.1.8 Teori Kesejahteraan

Banyak titik-tolak pemikiran ekonomi dapat diambil untuk membahas masalah *welfare* (kemakmuran) dan *welfare economics* (ilmu ekonomi yang berorientasi kemakmuran). Setengah abad yang lalu secara tegas dikatakan oleh Prof. Kenneth Boulding bahwa *the subject matter of welfare economics*, berbeda dengan lain-lain bentuk *welfare*, harus didekati dari konsep harta atau *riches* ekonomi. Dengan pendekatannya ini ia lebih lanjut memperkukuhkan konsepsi yang telah dikenal sebagai *social optimum*, yaitu *Paretian optimality* (optimalitas ala Pareto dan *Edgeworth*), di mana *economic efficiency* mencapai *social optimum* bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (*better-off*) tanpa membuat orang lain



merugi (*worse-off*). Dalam pada itu pemborosan (konsep *social optimum*) masih terjadi bila seseorang masih bisa menolong orang lain tanpa merugi. Apa yang dikemukakan Boulding ini, dalam kaitan *Pareto* dan *Edgeworth*, Marshall dan Pigou, pada dasarnya adalah *old utilitarian* dan tidak terlepas dari mekanisme *perfect competition* dalam pasar. *Welfare* dan *Competition* menjadi dua sejoli diangkat di sini sebagai paradigma klasikal oleh kaum *Smithian*. Inilah *old welfare economics* yang berdasarkan pada utilitas, berorientasi harta atau kekayaan ekonomi individu dan *self-interest maximization*, yang menegaskan tercapainya *Pareto efficiency*. Dengan demikian *social optimum* semacam ini menggambarkan berlakunya institusi ekonomi berdasar paham individualisme dan liberalisme ekonomi (*consumer's sovereignty* dalam pola pikir persaingan pasar-bebas) (Swasono, 2005a : 8).

Efisiensi alokatif (*allocative efficiency*) sumber-sumber ekonomi ke tingkat optimal yang menjadi titik tolak pemikiran kaum klasik Paretian ini (dan kemudian juga neoklasik) ternyata tidak dengan sendirinya membawa kesejahteraan sosial (*societal welfare*). Bagaimanapun juga *Pareto efficiency* tidak membukakan kondisi terbentuknya *a good society* dan tidak peka terhadap masalah distribusi. *Welfare economics* setengah abad yang lalu berhenti di situ (Swasono, 2005b : 8).

Sementara itu Samuelson (1952) mengemukakan, bahwa sebenarnya telah ada *welfare economics* baru yang tidak semata-mata berdasarkan kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi pendapatan *welfare economics* mengemban *ethical precept* (nilai-nilai etis-normatif). Namun Samuelson membenarkan Lionel Robbins (1932) yang mengatakan, bahwa tujuan-tujuan etikal karena sifatnya memang tidaklah ilmiah, jadi kurang lebihnya

mereka ini menerima moral *sceptitism*-nya David Hume. Hal ini tentulah mengakibatkan interpretasi keliru, bahwa *welfare economics* tidak mengandung konten etikal. Di lain pihak kaum *non-Weberian* yang menolak *Wertfreiheit der Wissenschaft (neutrality of science)* menuntut *welfare economics* harus pula mengintroduksi dimensi *welfare* dari luar ilmu ekonomi. Hal ini berarti dalam tataran *societal welfare*, maka *social choice* dalam mencapai *social optimum* perlu mencari pendekatan baru. Artinya, sejak titik tolak awalnya preferensi individu-individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi multipartitus (Swasono, 2005b : 9).

Apa yang disebut sebagai *new welfare economics* mulai muncul, kemudian menjadi *contemporary welfare economics* sejak Kenneth Arrow mengajukan *impossibility theorem* yang ia kembangkan sebagai upaya menggabungkan preferensi-preferensi masing-masing anggota masyarakat menjadi preferensi sosial (Swasono, 2004:x). Dari sini ditunjukkan secara teoritis bagaimana sulitnya menggabung dan mentransformasikan preferensi-preferensi individual menjadi preferensi sosial.

Dalam hal ini Arrow mengawali secara teoritikal proses transformasi ini. Bila proses transformasi ini dikaitkan dengan paham kebersamaan (mutualisme, bukan individualisme), sampailah pada kesimpulan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat maka *social preference* interdependen dengan, tetapi bukan gabungan dari *preferences of individuals*. Kesimpulan demikian itu karena dalam berpola interaksi sosial maka individu-individu sebagai makhluk sosial akan berperilaku berdasar pada kaidah-kaidah non ekonomi yang lebih kompleks. Dengan kata lain

akan terjadi transformasi perilaku individu-individu dalam pola interaksi sosial, bahkan mungkin terjadi transformasi *mind-set*, terbentuk suatu *coherent collective mind and behavior*. Ada suatu *impossibility* teoritikal bila bertitik tolak dari preferensi-preferensi individual. Preferensi sosial ada secara independen, sebagai kehendak individu yang hidup bermasyarakat karena rasa bersama (Swasono, 2005a:10).

Setelah dengan sangat brilian dan teliti menggambarkan hubungan antara *welfare* dan *competition*, akhirnya Prof. Tibor Scitovsky mengemukakan melalui bukunya yang terkenal *Welfare and Competition*, bahwa *competition* memiliki berbagai kelemahan (*shortcomings*). Bila kaum ekonom menganggap peran kebijakan ekonomi adalah mempertahankan pekerjaan (*employment*) dan stabilitas harga (*price stability*), tugas negara adalah mengobati kelemahan-kelemahan yang ada pada diri *competition* demi menjamin *welfare*. Negara, menurut Scitovsky, harus menyediakan jasa-jasa yang masyarakat secara kolektif dapat mengambil manfaat. Namun ia pada dasarnya tetap berkecenderungan memihak orde kompetisi dan menghendaki pembatasan terhadap kontrol oleh negara (Swasono, 2005b : 12).

Pembahasan dalam teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni ; *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert and Hahnel, 2005). Pendekatan *Classical utilitarian* menekankan, bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi

masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

*Neoclassical welfare theory* merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Prinsip *Pareto optimality* menyatakan bahwa “*the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off*”. Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum.

Selain prinsip *Pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan, bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Secara matematis fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$W = f \sum_{i=1}^n k(i)U(i)$$

di mana  $W$  merupakan kesejahteraan masyarakat,  $U$  merupakan tingkat kepuasan individu dan  $k$  merupakan bobot tertimbang.

Perkembangan lain dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach*. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Sedangkan intisari dari pendekatan ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan, bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

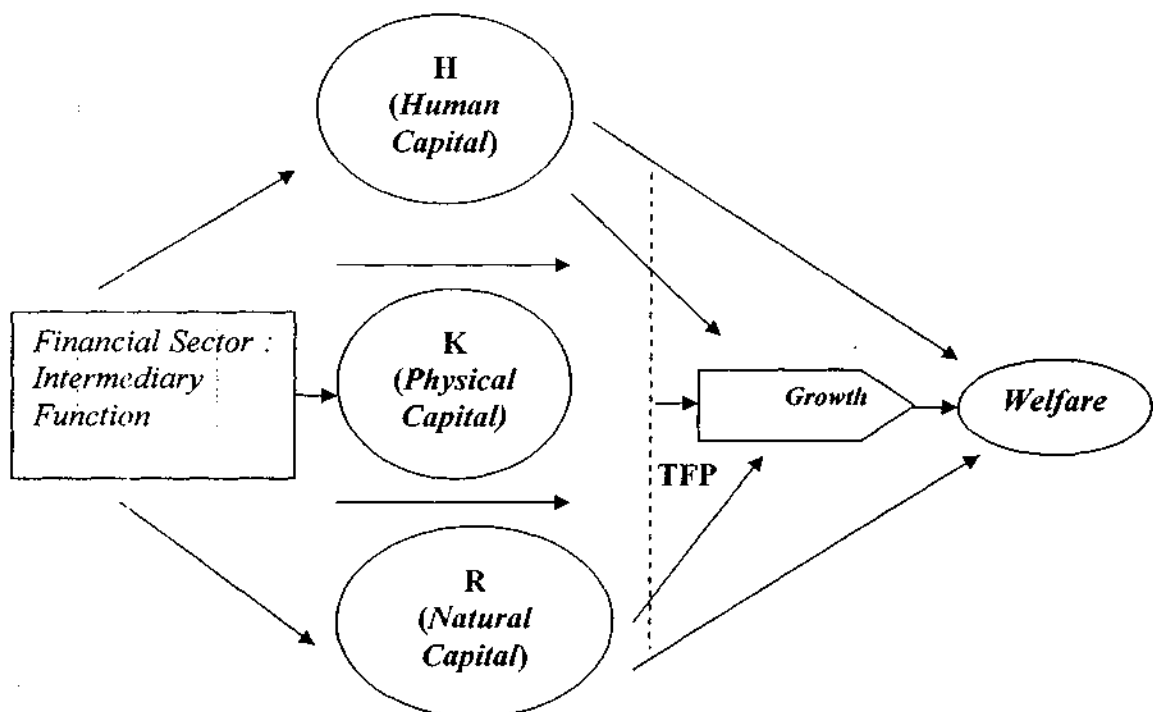
Dalam realitasnya, kesejahteraan hidup seseorang memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas (2000:15) menjelaskan, bahwa indikator kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO<sub>2</sub>, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). Secara matematis fungsi kesejahteraan menurut Thomas (2000:185) dapat dituliskan sebagai berikut :

$$U = \sum_{i=1}^N u(c_i) + \sum_{i=1}^N v(h_i, R)$$

di mana  $c_i$  merupakan tingkat konsumsi individu  $i$ ,  $h_i$  merupakan aspek *human capital* individu  $i$ . Sedangkan  $R$  merupakan tingkat asset lingkungan dan  $R$  diasumsikan merupakan barang publik murni.

Dalam rangka mencapai hasil kesejahteraan yang maksimal dalam proses pembangunan suatu negara, maka dibutuhkan berbagai faktor produksi pendukung. Dalam hal ini Thomas (2000:XXVII) memberikan suatu gambar yang menjelaskan secara konseptual dari pencapaian kesejahteraan yang dimaksud pada Gambar 2.3 di halaman 71.

Gambar 2.3 menjelaskan, bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dalam sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada dalam perekonomian, seperti ; sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya alam (R). Ketiga sumber daya yang dimaksud akan berinteraksi dalam proses pembangunan guna menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.



**TFP = Total Faktor Produksi**

**Gambar 2.3 KERANGKA KESEJAHTERAAN DALAM PEMBANGUNAN**

Pada gambar tersebut juga dapat dijelaskan, bahwa kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai melalui akumulasi dari sumber daya yang ada dalam

pembangunan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya modal fisik, modal alam dan sumber daya modal manusia. Ketiga elemen sumber daya tersebut akan berinteraksi dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Indikator yang dominan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah adalah tingkat pendapatan daerah dan besarnya pendapatan per kapita (Sukirno, 1994:14). Penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Pigou. Tulisannya yang berkaitan dengan kesejahteraan adalah "*Wealth and Welfare*" tahun 1912, yang selanjutnya ditransformasi menjadi "*The Economic of Welfare*" tahun 1920 (Spiegel, 1991:572). Seperti yang dikutip oleh Chopra (1981:3), Pigou menyebutkan, bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kepuasan agregat dari semua individu dalam masyarakat. Kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan yang diperoleh individu atas konsumsi barang dan jasa yang dihubungkan dengan pendapatar riil. Dalam hal ini Pigou menganggap, bahwa kepuasan individu dapat diukur secara kardinal, sehingga bisa dijumlahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Pigou menyadari, bahwa kesejahteraan sifatnya subyektif dan tidak hanya ditentukan dari aspek ekonomi, sehingga definisi tersebut dibatasi menjadi *Economic Welfare*.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan hanya menggunakan pendapatan per kapita banyak ditentang oleh berbagai pihak. Hal ini disebabkan

karena kesejahteraan itu sifatnya normatif, sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif yang dapat menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat. Todaro (200a :215) mengatakan, bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung kelemahan yang sangat fatal, yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling miskin.

Eerkaitan dengan hal itu, Moris pada tahun 1979 dalam tulisannya "*Measuring the Condition of the World's Poor : The Physical Quality of Life Index (PQLI)*", mengukur kemajuan pembangunan dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik dengan tiga indikator, yaitu : harapan hidup, melek hurup dan kematian bayi (Todaro,2000a : 84). Selanjutnya, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur keberhasilan pembangunan secara lebih komprehensif dengan menggunakan usia harapan hidup, pendidikan dan pendapatan yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index = HDI* (Todaro, 2000a:87). Dengan demikian, kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kesehatan diukur dengan menggunakan angka harapan hidup, kemudian indikator pendidikan diukur dengan variabel melek huruf dan lama sekolah diasumsikan dapat menggambarkan kemampuan sumber daya manusia menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.



Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan *Human Development Index* telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1993, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). BPS Provinsi Bali secara berkala telah menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia berturut-turut tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005.

### **2.1.9 Keterkaitan Perencanaan Sektoral dengan Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.**

Apabila perencanaan spasial diarahkan pada penciptaan tingkat efisiensi dan efektifitas maksimal pemanfaatan ruang, dengan mengingat faktor konstrain, yakni luas lahan yang relatif konstan, maka perencanaan sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan dinamika sektoral, sehingga menghasilkan *output* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disatu sisi dan disisi lain adalah untuk mempertahankan keberlanjutan proses pembangunan yang berlangsung.

Kemajuan hidup manusia pada dasarnya tidak dapat ditumpukan semata-mata pada satu sektor saja. Kehidupan manusia atau masyarakat melibatkan dimensi yang banyak, yang keseluruhannya saling berinteraksi untuk menciptakan angka keseimbangan optimal, sehingga mampu menyangga berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan umumnya dan taraf peradaban umumnya. Dalam perspektif teori perkembangan wilayah, adanya keterbatasan sumber daya (*endowment factors*), demikian pula karena pertimbangan efisiensi dan perbedaan tingkat keterampilan (*skill*), tidak dapat dielakkan dapat mempengaruhi pilihan sektor yang akan dijadikan sebagai motor bagi pertumbuhan atau kemajuan wilayah.

Teori sektor basis menjelaskan, bahwa untuk terciptanya kemajuan ekonomi suatu wilayah, maka wilayah yang bersangkutan harus mampu mengembangkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut untuk menarik keuntungan dari pasar ekspor. Blakely (1989:63) menjelaskan postulasi teori sektor basis dengan menyatakan bahwa :

*“ ... the determinants for economic growth are directly related to the demand of good, services, and products from other areas outside the local economic boundaries of the community. In essence, the growth of industries that use local resources, including labor and materials for final export elsewhere, will generate both local wealth and jobs “.*

Teori sektor menjelaskan, bahwa sektor kegiatan ekonomi (kadang-kadang disebut juga sebagai industri, misalnya industri pariwisata), adalah sekelompok kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa sejenis menurut sistem klasifikasi tertentu, misalnya seperti yang terdapat dalam *United States Standard Industrial Classification (USSIC)*. Sistem klasifikasi mengorganisasi seluruh jenis industri berdasarkan produknya ke dalam segmen yang semakin rinci, mulai dari sektor ekonomi yang umum (misalnya *manufacturing* atau jasa) ke segmen industri khusus (misalnya olahraga komersial, atau binatu). Sistem klasifikasi tidak hanya dihasilkan oleh sebuah negara (Misalnya US-SIC tersebut di atas), tetapi juga secara multilateral (misalnya *North American Industry Classification System* atau NAICS) yang disusun oleh dan berlaku di negara-negara anggota *North American Free Trade Agreement* (NAFTA). Pada umumnya urutan klasifikasi yang digunakan adalah pembagian sektor-sektor ekonomi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor pertanian (*agriculture*), pertambangan (*mining*), konstruksi (*construction*), transportasi dan fasilitas umum (*transportation and public utilities*), manufaktur (*manufacturing*),

perdagangan besar (*whole sale*), perdagangan ritel (*retail trade*), keuangan, asuransi dan pengembang (*finance, insurance and real estate*), jasa-jasa (*services*) dan sektor yang tidak masuk dalam klasifikasi (*unclassified sector*).

Berbeda dengan pembagian di atas, BPS membagi sektor ekonomi sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen Pendapatan Nasional maupun daerah, ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian ; sektor pertambangan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa-jasa. Pembagian lain tentang sektor ekonomi adalah sebagaimana disebutkan di dalam Produk Domestik Regional Bruto, yang terdiri dari sembilan sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalan ; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan terakhir jasa-jasa.

Sudut pandang lain yang melihat aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu wilayah adalah pembagian sektor menurut sifat kualitas *input*, pemrosesan, keluaran dan legalitasnya, adalah sebagai berikut :

#### 1. Sektor Primer

Kegiatan ekonomi sektor primer adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang yang langsung berhubungan dengan atau bergantung pada hasil alam seperti pertanian, peternakan, dan kehutanan (kadang-kadang juga memasukkan pertambangan).

#### 2. Sektor Sekunder.

Kegiatan ekonomi sektor sekunder adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau

setengah jadi lainnya (sebagai bagian dari rantai produksi vertikal dan proses umum. “*roundabout production*” ekonomi manufacturing yang spesialisasi dan pembagiannya semakin meningkat).

### 3. Sektor Tertier

Kegiatan ekonomi sektor tersier adalah seluruh kegiatan ekonomi di bidang pengorganisasian dan pengkoordinasian produksi dan kegiatan lain yang terkait, yang melakukan pertukaran (logistik, distribusi, pemasaran, dll), perawatan (perbaikan, dll), dan konsumsi (eceran, grosiran) barang dan jasa. Kompleksitas sektor tertier mendorong dilakukannya pembagian lebih lanjut menjadi Sektor Kuartener (seluruh kegiatan ekonomi di bidang informasi yang meliputi aktivitas mengumpulkan, merekam, menyusun, menyimpan, mengambil, menukar dan menyebarkan informasi) dan Sektor Kuiner (seluruh kegiatan ekonomi dibidang informasi yang lebih menekankan pada pembuatan, penyusunan kembali dan penafsiran informasi dan gagasan, baik yang lama maupun yang baru, termasuk juga inovasi metode penafsiran data).

### 4. Sektor Ekonomi Informal.

Seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung tanpa pengakuan atau ijin resmi dari instansi pemerintah atau berlangsung secara ambigu atau hanya berkaitan lemah; biasanya beroperasi tanpa sentuhan regulasi pemerintah, bahkan seringkali juga dari sistem perpajakan.

Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat menuntut adanya peningkatan pada daya beli mereka, yang secara makro berarti juga meningkatkan pendapatan agregat masyarakat. Persyaratan terakhir ini menyebabkan perlunya

diupayakan penciptaan lapangan kerja produktif yang memberikan nilai tambah (PDB) tertinggi untuk satu satuan tenaga kerja yang berada dalam suatu lapangan usaha/aktivitas ekonomi tertentu-secara langsung berhubungan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional (Soedarsono, 1999).

Dalam analisis mengenai penciptaan dan pengembangan lapangan kerja produktif regional ini dapat dikembangkan dua hipotesis besar yang menyangkut hubungan antara pertumbuhan ekonomi regional dengan pengembangan lapangan kerja produktif regional. Kedua hipotesis tersebut adalah : *pertama*, semakin besar lapangan kerja produktif dan semakin besar tenaga kerja regional yang berpartisipasi dalam lapangan kerja produktif, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional. *Kedua*, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional diharapkan penyerapan tenaga kerja produktif, khususnya tenaga kerja terampil dan profesional, semakin tinggi pula (Wie, 1983 : 70).

Hipotesis pertama telah banyak diuji dan dibuktikan oleh berbagai penelitian yang berkaitan dengan analisis pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan, bahwa pertumbuhan ekonomi regional ditentukan oleh dua faktor besar, yaitu peningkatan *input* pertumbuhan, baik berupa tambahan tenaga kerja maupun tambahan kapital dan peningkatan *output* per satuan yang ditentukan oleh peningkatan kualitas manajemen pembangunan regional, peningkatan kualitas kebijakan pembangunan regional dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

Hipotesis kedua tidak senantiasa terbukti, tergantung pada strategi pertumbuhan yang diterapkan. Bila strategi pertumbuhan regional ditempuh melalui peningkatan *input* (investasi), maka dapat dipastikan, bahwa pertumbuhan ekonomi

regional tidak senantiasa meningkatkan lapangan kerja produktif dan partisipasi tenaga kerja produktif di dalam perekonomian regional. Cara terbaik untuk meningkatkan hal tersebut di atas adalah dengan mempertinggi *output* per satuan *input* regional dengan menjadikan sumberdaya manusia berkualitas tinggi sebagai sumber andalan pertumbuhan regional. Dengan cara terakhir ini, peluang untuk menciptakan lapangan kerja produktif, baik ditinjau dari sudut pandang penawaran maupun permintaan tenaga kerja produktif akan mudah direalisasikan (Wie, 1983:75).

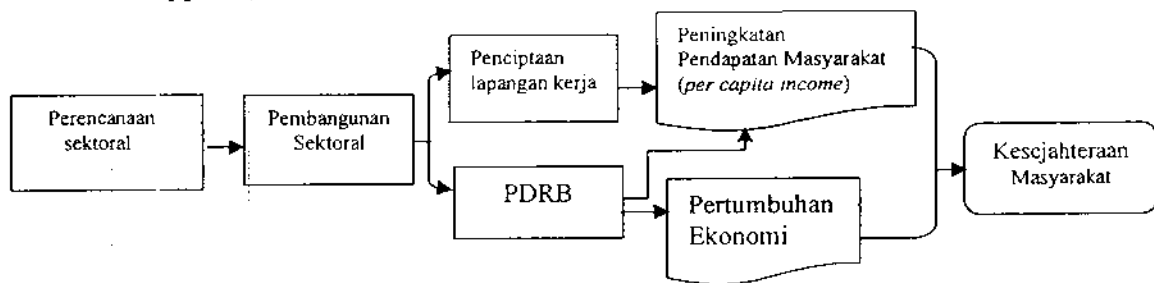
Dalam kerangka peningkatan lapangan kerja produktif regional, maka mutlak disusun perencanaan sektoral yang akurat, dalam arti pemilihan sektor prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi wilayah. Demikian juga dalam konteks mendorong akselerasi perkembangan ekonomi wilayah, pemilihan sektor yang akan dikembangkan juga harus memperhitungkan potensinya untuk menciptakan aglomerasi dan intensitas keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Sehubungan dengan pentingnya aglomerasi, Isard (1998:45) menegaskan, bahwa "*an understanding of the development of cities and regions cannot be acquired without a full appreciation of the forces of agglomeration and deglomeration that are at play*". Secara sederhana keterkaitan perencanaan sektoral dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh Gambar 2.4 di halaman 80.

Penting dan strategisnya perencanaan sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari realitas, bahwa pembangunan daerah sebagai sasaran pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari perkembangan sektor-sektor

ekonomi dan lainnya. Blakely (1989:62) menjelaskan, bahwa pembangunan daerah adalah merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sektoral dan variabel lainnya dalam suatu hubungan yang bersifat kausalistik.

Secara ringkas bentuk hubungan tersebut adalah seperti terlihat pada pernyataan di bawah ini :

*Local/regional Dev. = f (natural resources, labor, capital investment, entrepreneurship, transport, communication, industrial composition, technology, size export market, international economic situation, local government spending, and development supports).*



Gambar 2.4 KETERKAITAN ANTARA PERENCANAAN SEKTORAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.1.10 Teori Struktur Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan dalam proses pembangunan suatu negara akan menentukan pola pembangunannya. Bagi negara sedang berkembang, ketersediaan lahan pembangunan yang luas memungkinkan penduduk suatu negara untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Secara teoritis sumber daya lahan merupakan sumber daya yang berperan penting dalam proses pembangunan suatu negara. Ketersediaan sumber daya lahan yang memadai dapat mendukung pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan

yang diharapkan. Menurut Barlowe (1972 : 42), pada prinsipnya penggunaan sumber daya lahan dapat dikategorikan menjadi :

- a. Lahan untuk pemukiman
- b. Lahan untuk perdagangan, jasa dan industri
- c. Lahan untuk pertanian tanaman pangan/bercocok tanam
- d. Lahan untuk perkebunan dan pengembalaan
- e. Lahan untuk kehutanan
- f. Lahan untuk pertambangan
- g. Lahan untuk rekreasi
- h. Lahan cadangan untuk kepentingan tertentu
- i. Lahan tandus dan padang pasir

Menurut Hardjomartojo (1993 : 21), konsepsi tentang penggunaan lahan adalah :

Pengkaitan antara kemampuan lahan dengan kemampuan relatif sebidang lahan untuk menghasilkan nilai lebih atau kepuasan atas biaya-biaya yang dikeluarkan didalam penggunaan lahan tersebut. Kapasitas penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan faktor kualitas. Faktor aksesibilitas meliputi lokasi sumber daya, posisinya terhadap pasar dan fasilitas transportasi. Dengan demikian unturnya meliputi biaya transportasi, komunikasi, pertimbangan waktu dan jarak. Sedangkan faktor kualitas meliputi kemampuan relatif sumber daya lahan untuk menghasilkan produk tertentu, hasil tertentu atau kepuasan tertentu.

Secara ekonomi, perubahan dalam penggunaan lahan disebabkan oleh naiknya nilai lahan yang juga sering mengakibatkan terjadinya pemindahan pemilikan lahan dan perubahan penggunaan lahan. Perubahan nilai lahan di suatu daerah juga banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Dengan kata lain, faktor kebijakan pembangunan yang dianggap memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai lahan, akhirnya dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan (Fadjarajani, 2001 : 33).



Alih fungsi lahan memberikan akibat terhadap : (1) perubahan kemampuan dan daya dukung lahan secara fisik- biologis akibat pergantian penggunaan lahan, (2) perubahan dalam distribusi kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh perpindahan hak kepemilikan lahan (*property right*). Alih fungsi lahan apabila ditelusuri lebih lanjut tidak saja hanya memberikan dampak ekonomi dan ekologis saja, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan struktural sosial budaya masyarakatnya (Harun, 1992)

Guna menjamin keberlangsungan dalam peruntukan lahan yang ada, maka dibutuhkan pengendalian. Tujuan dasar dari pengendalian terhadap peruntukan lahan adalah untuk memantapkan pembatasan penggunaan dan pengembangan lahan yang dianggap penting atau merupakan keinginan umum. Di dalam masyarakat autokratik, pembatasan tersebut ditetapkan oleh kewenangan pusat dan diberlakukan dengan perangkat peraturan. Peraturan-peraturan tersebut seperti peraturan bangunan, peraturan kesehatan dan pembagian kewajiban (Branch, 1995 : 143). Dalam studi ini, ada beberapa teori yang dikemukakan sebelumnya dirujuk secara keseluruhan, namun ada beberapa teori yang digabung sepanjang relevan sebagai dasar-dasar konsep untuk memecahkan masalah yang diteliti.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Studi pembangunan ekonomi sektoral sudah banyak dilakukan dengan menggunakan indikator *Balanced Growth Index*, *Location Concentration Index*, *ICOR*, *LQ* dan Koefisien Konsentrasi. Berikut akan diuraikan beberapa studi yang relevan, sedangkan studi lainnya diuraikan dalam *Theoretical Mapping* di Lampiran 1 halaman 205. Studi tersebut dilakukan oleh Zadjuli (1986) dengan judul : Pola

Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi daerah Jawa Timur. Studi ini dilakukan dengan pengamatan jangka panjang (1969 – 1981) yang diperinci menjadi dua, yaitu kurun waktu pertama (1969 – 1975) dan kedua (1975 – 1981). Studi tersebut mempergunakan pendekatan ilmu wilayah dengan uji – coba data empiris pada tingkat Provinsi dalam suatu negara, studi kasus di Provinsi Jawa Timur. Hasil studi menunjukkan :

1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai gabungan dari ekonomi daerah, bila diukur dengan *balanced growth index* antar daerah, termasuk dalam bentuk/pola pembangunan yang makin berimbang. Dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, nampak bahwa hipotesis *balanced growth* berlaku di Indonesia.
2. Menurut konsentrasi lokasi secara sektoral, berdasarkan nilai absolut dari *index* konsentrasinya nampak, bahwa kegiatan sektoral makin menyebar ke tiap daerah. Hal ini menimbulkan makin banyaknya daerah eksklusif baru, baik di sektor pertanian maupun di sektor lainnya, sehingga dualisme struktural dalam sektor ekonomi tetap berlangsung.
3. Terjadi loncatan pergeseran struktur ekonomi di tingkat nasional dengan makin menurunnya porsi sektor primer yang digantikan oleh sektor tersier, dengan peranan sektor sekunder yang relatif konstan. Hal ini tidak sesuai dengan teori transisi struktur ekonomi yang menginginkan pergeseran secara berurutan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
4. Di Jawa Timur juga terjadi loncatan pergeseran struktur, dimana penurunan peranan sektor primer banyak diambil alih oleh sektor tersier.

5. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan dengan pola tingkat ketidak-stabilan yang makin rendah diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis *balanced – growth*.
6. Terdapat kecenderungan sektor basis di Jawa Timur menjadi semakin sedikit, dimana pada periode pertama (1969 – 1975) terdapat tujuh sektor basis sedangkan pada periode ke dua (1975 – 1981) tinggal empat sektor basis yang disebabkan oleh semakin menurunnya secara relatif laju pertumbuhan sektor industri.
7. Kelompok industri ringan (*light industry*) yang memproduksi barang konsumsi dan sebagian besar dikuasai oleh swasta lebih bersifat pada tenaga kerja dan banyak menggunakan bahan dasar (padat bahan), sehingga terdapat keuntungan komparatif yang cukup tinggi, baik dilihat dari segi tenaga kerja dan bahan dasar/bahan baku yang cukup berlimpah di Jawa Timur, maupun dilihat dari segi potensi pemasarannya.
8. Kelompok industri berat (*heavy industry*) pada umumnya dikuasai oleh pemerintah dan bersifat padat modal, sehingga keuntungan komparatif yang diperoleh tidak setinggi pada kelompok industri ringan.
9. Pada awal proses industrialisasi, prinsip keuntungan komparatif sama sekali belum diikuti. Dengan adanya penerimaan dari minyak yang meningkat, dalam kurun waktu 1975 – 1980, efisiensi lokasi yang diukur melalui prinsip keuntungan komparatif mulai menonjol kegunaannya, dimana hubungan antara koefisien konsentrasi dengan rasio modal dan buruh adalah negatif (sesuai dengan ciri *labor abundant* Jawa Timur), sedangkan dengan faktor bahan baku termasuk

*input* antara lainnya adalah positif sesuai dengan ciri Jawa Timur yang kaya akan bahan baku.

10. Pada industri manufaktur di Jawa Timur, terdapat kecenderungan peningkatan ICOR secara merata disatu pihak dan penurunan ILOR secara merata pula dipihak lain. Hal ini memberi indikasi, bahwa industri manufaktur di Jawa Timur makin memekanisasikan peralatan produksinya, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat dan upahpun meningkat.

Studi lainnya dilakukan oleh Yusuf (1999 ) dengan judul Model Rasio Pertumbuhan ( MRP ) sebagai salah satu alat analisis alternatif dalam perencanaan wilayah dan kota, aplikasi model : wilayah Bangka – Belitung. Studi ini untuk menganalisis deskripsi kegiatan ekonomi yang lebih bersifat makro yang menekankan pada analisis sektoral dalam struktur ekonomi wilayah Bangka – Belitung. Dalam Analisis deskripsi kegiatan ekonomi wilayah Bangka – Belitung dilakukan *overlay* antara analisis MRP dengan analisis *Location Quotient* untuk mengidentifikasi ekonomi sektoral yang potensial yang dapat dikembangkan. Dari analisis deskripsi tersebut terlihat, bahwa wilayah Bangka – Belitung mempunyai keunggulan yang khas di masing-masing Dati II, yaitu :

1. Kabupaten Bangka mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan primer dan sekunder, terutama pertanian dan industri pengolahan.
2. Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan sekunder dan tersier ( perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi terutama jasa pariwisata ).

3. Kotamadya Pangkalpinang mempunyai keunggulan dalam pengembangan kegiatan sekunder dan tersier (bangunan / konstruksi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa terutama kegiatan pemerintahan dan pusat perdagangan).

Penelitian Santoso (2000) mengenai Keterkaitan Antar Sektor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Jawa Timur menunjukkan, bahwa ekonomi Jawa Timur rata-rata tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Pergeseran struktur ekonomi pada sisi nilai tambah, tidak diikuti oleh struktur tenaga kerja sektoral, menyebabkan menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tingkat pengangguran tinggi dan tingkat efisiensi tenaga kerja sektor ini semakin rendah. Koefisien elastisitas sektor pertanian negatif, artinya sektor pertanian tetap tumbuh meski terjadi pengurangan tenaga kerja. Dalam penelitian ini juga ditemukan, bahwa kesenjangan pendapatan di Jawa Timur selama kurun waktu 1989-1994 cenderung semakin tajam karena semakin rendahnya kontribusi nilai tambah yang diterima oleh faktor produksi.

Penelitian Lasam (2002) di Kalimantan Timur menunjukkan, bahwa sektor Primer, Sekunder dan Tersier mempunyai korelasi dengan PDRB (migas) dengan angka dan signifikansi yang cukup erat. Selain itu dalam penelitian ini juga menemukan *index balance growth* tinggi yang mengindikasikan, bahwa rata-rata pertumbuhan rendah, sehingga pola pembangunan mengarah pada keseimbangan (*balanced*). Selanjutnya penelitian di Kalimantan Timur ini menemukan, bahwa daya

penyebaran sektor industri mencapai 1,8297, yang berarti jika keseluruhan *output* meningkat satu unit, *output* sektor industri akan meningkat sebesar 1,8297 unit.

Edison (1994) melakukan modifikasi formula *Leontief* untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang relatif tidak mampu meningkatkan investasi bruto nasional dilihat dari persentase terhadap PDB. Kinerja seperti ini tidak sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan makin besar investasi pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dengan melakukan simulasi dari tiga model yang diformulasikan, diperoleh kesimpulan, bahwa : (a) dalam proses produksi memanfaatkan teknologi secara optimal, (b) belum memiliki komoditas yang mampu diandalkan sebagai sumber perstabilan ekspor, (c) strategi substitusi impor pada satu pihak menguntungkan para pengusaha dan (d) tidak semua kegiatan substitusi impor semakin efisien, karena perlu selektif, sehingga efisiensi nasional cenderung lebih baik. Kesimpulannya alokasi modal sektor industri sangat berlebihan, sementara investasi sektor peternakan, kehutanan, tambang, listrik, gas dan air minum, lembaga keuangan serta pemerintahan dan keamanan berkurang. Dengan kinerja tersebut beberapa sektor industri terjadi kelebihan kapasitas produksi demikian juga pada sektor bangunan.

Berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang selama ini menunjukkan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sulit untuk berjalan bersama-sama. Berbagai penelitian yang dikaitkan antara pembangunan ekonomi dan distribusi yang dilakukan oleh Kuznets (1955), Chenery (1974) dan Ahluwalia (1976) menunjukkan, bahwa pada tahap awal proses pembangunan ekonomi pada umumnya diikuti kemerosotan yang cukup besar

dalam pembagian pendapatan, berarti pada tahap ini distribusi pendapatan dikorbankan. Akan tetapi pada beberapa negara berkembang, sedang berkembang terutama di Asia, ekonominya tumbuh dengan pesat namun diikuti dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Hasil penelitian Fei, Ranis and Kuo (1980) di Taiwan, Cho and Papanek (1981) di Hongkong, keadaan ini memang tidak umum terjadi di negara yang sedang berkembang (Jhingan, 1999:68).

Penelitian Gounder (2002) di Fiji ingin membuktikan, bahwa kinerja ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa variabel sosial, politik dan ekonomi, yaitu dengan menganalisis variabel demokrasi (*civil liberty*) dan kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Fiji. Kajian ini lebih diarahkan pada masa lalu Fiji dimana lingkungan politik yang tidak demokratis dan ketidakpastian kebijakan ekonomi yang diambil, sehingga mengakibatkan penurunan dalam investasi swasta dan ekspor serta pelarian tenaga ahli keluar negeri. Dengan menggunakan analisis regresi, dalam penelitian ini digunakan model pertumbuhan neo-klasik tipe *solow* untuk mengukur demokrasi dengan pertumbuhan. Data yang digunakan berasal dari *Fiji's Bureau of Statistic* dan *World Bank*. Data demokrasi dan kebebasan berpolitik diambil berdasarkan pengukuran Gastil's Indexs yang terdiri dari 4 komponen, yaitu : a) *to freely participated in the political decision-making process of government*; b) *to exercise the rights to own property, to travel, to enjoy family life*; c) *to express free opinion and views*; dan d) *to make frely economic resource decisions and enjoy the fruits of such decisions*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa demokrasi ekonomi dan kebebasan ekonomi mempunyai

pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang, sementara itu kebebasan ekonomi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Fiji.

Hanham dan Banasick (2000) mengadakan penelitian tentang struktur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja di Jepang yang menyimpulkan, bahwa struktur pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja mempunyai peran penting dan signifikan terhadap kesempatan kerja industri manufaktur di Jepang sejak tahun 1981-1985.

Kim (1997) mengadakan penelitian terhadap pemerintah regional di Korea yang menyimpulkan, bahwa peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional ternyata sangat signifikan. Artinya, pemerintah daerah harus terus didorong, daerah harus terus diperkenalkan secara lebih khusus, pemerintah pusat seharusnya mentransfer sumber pendapatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Di Indonesia, penelitian sejenis telah dilakukan oleh Soepono (1993) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990 dengan menggunakan alat analisis *shift-share* klasik, modifikasi *Estaban-Marquillas* dan modifikasi *Arcellus*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa DIY secara keseluruhan tidak memiliki keunggulan kompetitif, namun dengan pendekatan *Arcellus* dapat dilihat pengaruh positif dari bauran industri regional, kecuali sektor pertanian, pertumbuhan nasional dan bauran industri mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja di DIY.

Penelitian Sarwoprasodjo (1985) yang bertujuan untuk melihat hubungan antara penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dengan tingkat kesejahteraan sosial, menggunakan data BPS tahun 1993, menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penyerapan tenaga kerja sektor pertanian rendah cenderung mempunyai



tingkat kesejahteraan sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan persentase serapan tenaga kerja sektor pertanian tinggi. Hal ini berarti, bahwa semakin kecil persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang diteliti.

Sulistyaningsih (1997) dalam penelitian disertasinya di Institut Pertanian Bogor yang berjudul “ Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Indonesia 1980 – 1993”, membangun model inter – industri ekonomi dan dekomposisinya, serta model tenaga kerja yang digunakan untuk menganalisis dampak perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 1980-1993. Penelitian tersebut menyimpulkan, bahwa perubahan struktur ekonomi telah mendorong penciptaan tenaga kerja terutama sektor manufaktur yang menerima perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian. Perpindahan ini agak lambat, karena sektor ini memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Harmini (1997) dalam penelitiannya dengan analisis korelasi kanonik yang berjudul “ Hubungan Struktur Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia “ menyimpulkan, bahwa semakin bersifat industrial struktur ekonomi suatu provinsi, maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin tinggi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang bekerja sama dengan BAPPEDA Provinsi Bali (1999) menyimpulkan, bahwa faktor sosial ekonomi lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat adalah ketenagakerjaan. Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat. Di samping itu,

perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke sektor modern, di samping cenderung meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, juga dapat meringankan beban fisik masyarakat yang selanjutnya dapat berpengaruh pada kesehatan mereka.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah membahas mengenai pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat yang dianalisis secara kausalitas dengan menggunakan analisis jalur. Oleh karena itu, melalui studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, dalam studi ini mengacu pada penelitian di atas mempergunakan pendekatan ilmu wilayah dengan uji-coba data empiris pada tingkat daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, studi kasus di Provinsi Bali. Studi ini dilakukan dengan pengamatan pada periode 1998–2005.

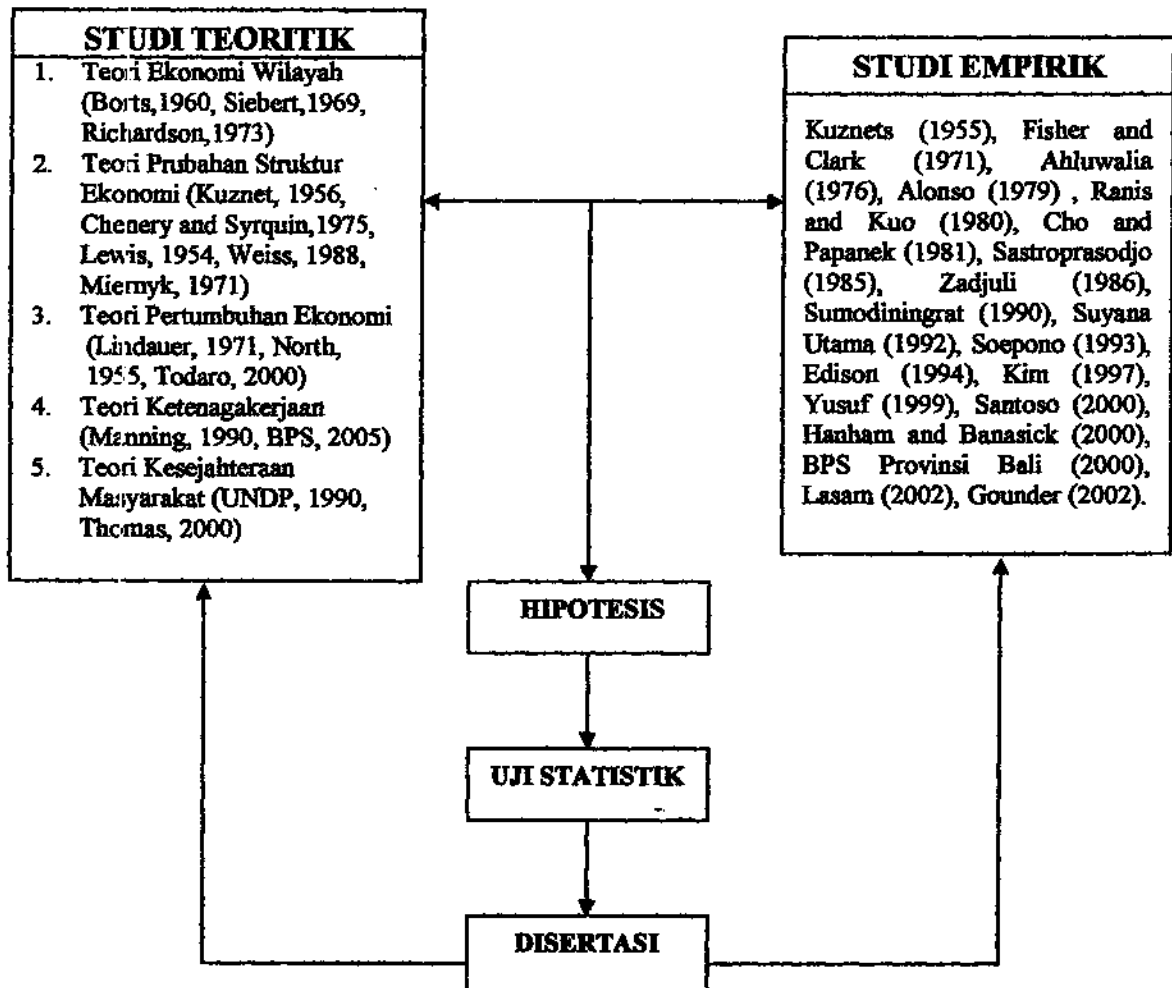
Dari tinjauan pustaka tersebut untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta Teori di Lampiran 1 halaman 205.

## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi dan tinjauan pustaka, terlebih dahulu disusun kerangka proses berfikir, seperti pada Gambar 3.1.



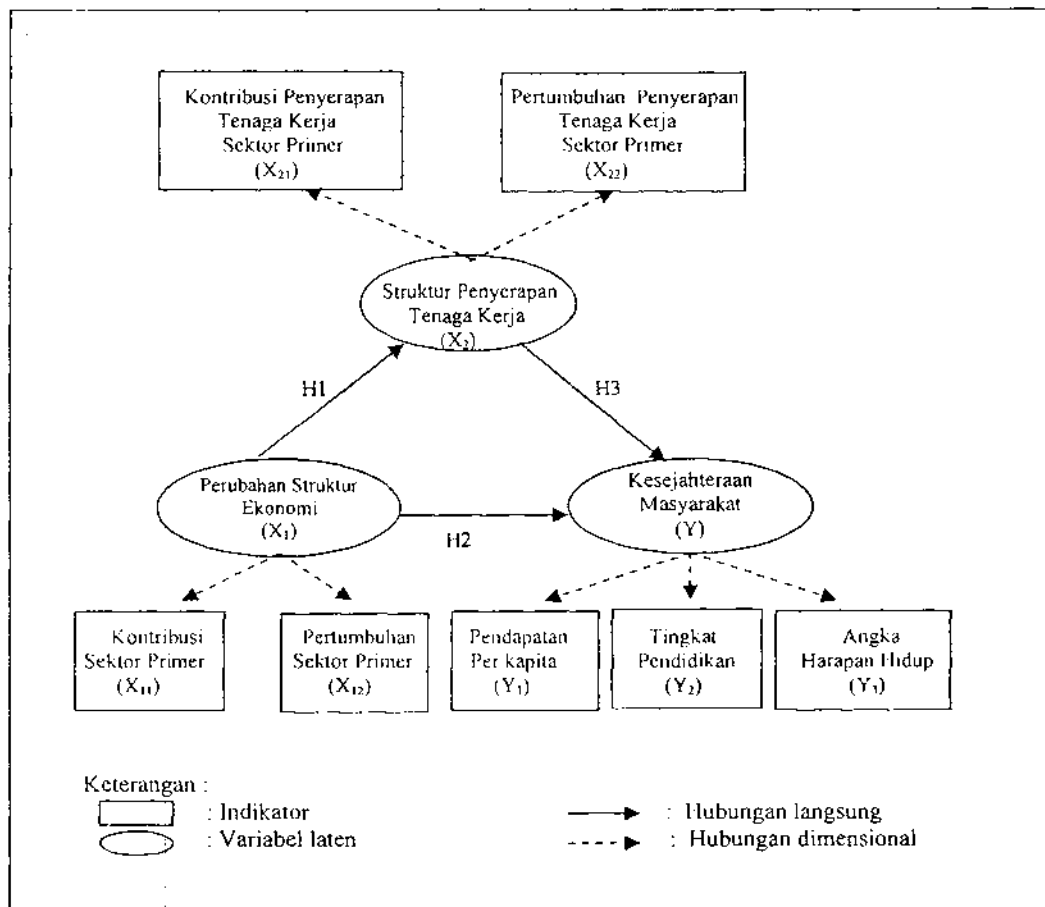
Gambar 3.1 KERANGKA PROSES BERFIKIR

Berdasarkan studi teoritik dan studi empirik serta sintesis dari kedua studi tersebut diharapkan dapat disusun beberapa konsep yang digunakan dalam melakukan analisis hasil studi dalam penelitian. Karena teori adalah suatu konsep yang dapat menuntun seseorang untuk dapat berfikir sesuai dengan pola fikir yang bersifat deduktif. Artinya, dalam teori akan ditemukan hal-hal yang bersifat universal (umum) yang bisa diterapkan kepada hal yang bersifat spesifik (khusus). Sebaliknya studi empiris dapat menuntun seseorang untuk dapat berfikir sesuai dengan pola fikir yang bersifat induktif. Artinya, berdasarkan studi empiris akan ditemukan hal-hal yang bersifat spesifik (khusus) yang dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat universal.

Berdasarkan kedua studi tersebut, maka dapatlah disusun suatu rumusan hipotesis yang akan dapat diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis yang diuji berdasarkan tes kuantitatif yang relevan, sehingga hipotesis yang telah teruji kebenarannya akan menjelma menjadi temuan baru dan menjadi ilmu pengetahuan yang dalam studi ini akan menjadi konsep disertasi. Selain itu diharapkan dari logika teoritis yang dikembangkan dengan hasil studi empirik dapat memberikan masukan yang lebih luas dalam pembahasan. Temuan-temuan yang berupa teori baru itu akan memperkaya teori yang telah digunakan dan hasil studi ini akan memperkaya hasil penelitian lain.

Mengenai rumusan hipotesis itu apa saja, dan variabel apa saja yang ada di dalamnya serta bagaimana hubungan pengaruh antar variabel tersebut dapat dilihat pada kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2 di halaman 94. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut dalam studi ini, terdapat tiga variabel yang terdiri dari satu variabel eksogen (independen) dan satu variabel antara (*intervening*) dan satu

variabel endogen (dependen). Variabel eksogen yang dimaksud adalah variabel perubahan struktur ekonomi. Variabel tersebut dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor primer.



**Gambar 3.2. KERANGKA KONSEPTUAL**

Selain variabel eksogen (independen), terdapat satu variabel antara (*intervening*), yaitu struktur penyerapan tenaga kerja. Variabel ini dibentuk berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer. Variabel endogen (dependen), yaitu kesejahteraan masyarakat. Variabel ini dibentuk berdasarkan 3

(tiga) indikator, yaitu pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup (*expectation of life*).

### 3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan kerangka proses berfikir serta kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bali.
2. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
3. Struktur penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Rancangan Penelitian

Secara umum terdapat tiga tipe dalam penelitian sosial, yaitu penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*), dan penelitian penjelasan/ekplanatori (*explanatory research*). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Berdasarkan pada tipe penelitian tersebut, menurut Singarimbun (1989 : 5), studi ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian penjelasan/ekplanatori (*explanatory research*), karena studi ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antar variabel yang dihipotesiskan. Selain itu, studi ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*), karena dibuat beberapa penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti.

#### 4.2 Populasi dan Sampel

Secara ringkas populasi mempunyai arti “ .... a *complete set of observation* ...” (Christensen ,1992 : 8). Definisi lain menyebutkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2003 : 55).

Sejalan dengan itu, Hasan (2002 : 58) mengatakan, bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan

lengkap yang akan diteliti. Dalam studi ini, populasi adalah seluruh daerah yang berada di wilayah Provinsi Bali berjumlah 9 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar. Sesuai dengan uraian jangkauan studi, maka 9 kabupaten/kota tersebut diambil secara keseluruhan. Studi ini mengambil populasi secara keseluruhan, oleh karenanya tidak menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu, karena seluruh populasi diambil secara sensus.

### **4.3 Variabel Penelitian**

#### **4.3.1 Klasifikasi Variabel**

Katch dan Farhady dalam Sugiyono (2003 : 20) mendefinisikan variabel sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lainnya atau antara satu objek dengan objek lainnya. Sedangkan Kerlinger (1990 : 49) menyatakan variabel adalah konstruk atau sifat yang dapat memiliki bermacam-macam nilai. Identifikasi variabel ini didasarkan atas kajian teoritis dan empiris sebagai acuan kerangka berfikir deduktif dan eksplorasi melalui kajian empiris untuk kesimpulan induktif.

Sesuai dengan kerangka konseptual, dalam studi digunakan tiga variabel, yaitu variabel eksogen (*exogenous variable*), variabel antara (*intervening variable*) dan variabel endogen (*endogenous variable*). Menurut Barbie (1978:38), variabel eksogen adalah variabel yang diduga merupakan penyebab yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Variabel antara (*intervening*) adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, dan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi.



Dalam tingkatan empiris, istilah variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sinonim dari istilah konstruk (*construct*), karena variabel yang dianalisis dibentuk oleh beberapa indikator. Klasifikasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 KLASIFIKASI VARIABEL PENELITIAN**

No.	Variabel	Klasifikasi
1	Perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ )	Eksogen
2	Struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ )	Antara
3	Kesejahteraan masyarakat ( $Y$ )	Endogen

Selanjutnya dalam penelitian ini variabel penelitian juga dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni :

1. Variabel Laten (*Latent Variable, Unobserved Variable, Construct*), adalah sebuah variabel yang dibentuk melalui indikator-indikator yang diamati dalam dunia nyata. Variabel laten ini tidak diukur secara langsung melainkan dibentuk melalui beberapa dimensi yang diamati melalui analisis faktor seperti yang dikemukakan Agung (2003: V-14). Variabel laten pada penelitian ini adalah : 1. perubahan struktur ekonomi, 2. struktur penyerapan tenaga kerja, dan 3. kesejahteraan masyarakat.
2. Variabel terukur (*Measured Variable, Observed Variable, Indicator Variable, Manifest Variable*), adalah variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian lapangan.

### **4.3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk menyederhanakan variabel tersebut untuk mempermudah analisis dan memfokuskannya pada permasalahan studi ini. Definisi operasional variabel dalam studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.3.2.1 Variabel eksogen**

##### **1. Perubahan Struktur Ekonomi**

Perubahan struktur ekonomi menurut Weiss dalam Tambunan (2001 : 59), adalah transformasi struktural nilai tambah dari ekonomi tradisional dengan pertanian (Primer) sebagai sektor utama ke ekonomi modern (non Primer) yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu. Perubahan struktur ekonomi dideskripsikan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : kontribusi sektor Primer dan pertumbuhan sektor Primer.

##### **2. Kontribusi sektor primer**

Kontribusi sektor Primer adalah persentase kontribusi /komposisi/distribusi nilai tambah kegiatan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

##### **3. Pertumbuhan sektor primer**

Pertumbuhan sektor Primer adalah persentase pertumbuhan nilai tambah kegiatan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

#### **4.3.2.2 Variabel antara (*intervening*)**

##### **1. Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral**

Struktur penyerapan tenaga kerja sektoral menurut Weiss (1988) dalam Tambunan (2001 : 63), adalah transformasi struktural kesempatan kerja dari ekonomi tradisional dengan pertanian (Primer) sebagai sektor utama ke ekonomi modern (non Primer) yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu. Struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dideskripsikan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer.

##### **2. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer**

Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer adalah persentase komposisi /distribusi tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

##### **3. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer**

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer adalah persentase pertumbuhan tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan perekonomian sektor Primer pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

#### **4.3.2.3 Variabel endogen (*dependen*)**

##### **1. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 27), adalah pencapaian keberhasilan dalam pembangunan di bidang sosial ekonomi masyarakat daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu. Dalam studi

ini kesejahteraan masyarakat dideskripsikan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup.

## **2. Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 24), adalah besarnya pendapatan dalam rupiah yang diperoleh masing-masing penduduk yang merupakan proporsi PDRB dengan jumlah penduduk di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

## **3. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 12), adalah jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

## **4. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup menurut Bappeda dan BPS Provinsi Bali (2002 : 10), adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya. Dengan kata lain, angka ini menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai akhir hidupnya di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun tertentu.

Secara keseluruhan variabel laten dan variabel terukur dalam studi ini disajikan dalam Tabel 4.2 di halaman 102.

## **4.4 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati peneliti (Sugiyono, 2003 : 97). Dalam studi ini, instrumen yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah mengadakan pengamatan pada objek yang menjadi pusat penelitian, guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam studi ini.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah beberapa catatan yang dimiliki oleh instansi Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, khususnya beberapa catatan atau publikasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

**Tabel 4.2. KELOMPOK DAN JENIS VARIABEL PENELITIAN**

No.	Variabel Laten	Indikator
1	Perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ )	1.1. Kontribusi Sektor Primer ( $X_{11}$ ) 1.2. Pertumbuhan Sektor Primer ( $X_{12}$ )
2	Struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ )	2.1. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer ( $X_{21}$ ) 2.2. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer ( $X_{22}$ )
3	Kesejahteraan masyarakat ( $Y$ )	3.1. Pendapatan Per kapita ( $Y_1$ ) 3.2. Tingkat Pendidikan ( $Y_2$ ) 3.3. Angka Harapan Hidup ( $Y_3$ )

## **4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **4.5.1 Lokasi Penelitian**

Studi ini mengambil lokasi di Provinsi Bali, yang meliputi 9 kabupaten/kota, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar.

### **4.5.2 Waktu Penelitian**

Studi ini menggunakan waktu kurang lebih 4 bulan. Pengumpulan data Sekunder dilakukan sejak bulan Januari sampai Pebruari dan tabulasi sampai analisis data dilakukan pada bulan Maret sampai April 2007.

## **4.6 Prosedur Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam studi ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Disnaker Provinsi Bali secara runtut waktu (*time series*) selama 8 tahun (1998-2005). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan memilih dan memilah data yang akan digunakan sebagai indikator pengukuran variabel. Data yang diperlukan dalam studi ini, berupa :

1. Kontribusi nilai tambah sektoral setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
2. Pertumbuhan ekonomi sektoral setiap kabupaten/kota di provinsi Bali
3. Jumlah penyerapan tenaga kerja sektoral di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
4. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektoral di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
5. Pendapatan per kapita setiap kabupaten/kota di Provinsi bali
6. Tingkat pendidikan penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali
7. Angka harapan hidup di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali

## 4.7 Metode Analisis Data

Dalam studi ini digunakan beberapa metode analisis, yaitu : statistik deskriptif dan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan menggunakan program SPSS. Analisis faktor digunakan untuk memperoleh skor faktor variabel laten yang dibentuk.

### 4.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dipergunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel penelitian. Penerapan statistik deskriptif dalam studi ini antara lain perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel-tabel, gambar-gambar dan lain sebagainya, yang dibuat atau dihitung dengan paket program *SPSS* dan *Excel*.

### 4.7.2 Analisis Faktor

Salah satu tujuan digunakan analisis faktor untuk mendapatkan ukuran (berupa skor) dari variabel laten berdasarkan beberapa variabel terukur seperti yang dikemukakan Sharma (1996: 99) dan Agung (2003:V-14), juga secara empirik untuk mengkonfirmasi struktur faktor yang dianalisis berdasarkan konsep atau teori Hair *et al.* (1995: 91). Senada dengan itu, Jogiyanto (2005: 128) mengatakan, bahwa analisis faktor dapat dipakai mengukur validitas konstruk (*construct validity*) yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk.

Berkaitan dengan itu, analisis faktor digunakan dalam studi ini karena variabel-variabel penelitian dalam studi ini seperti : perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ), struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) dan kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) masing-masing terdiri dari beberapa indikator. Dengan analisis ini, variabel laten yang

diperoleh berupa variabel komposit, yaitu suatu variabel yang merupakan gabungan dari berbagai indikator, dalam hal ini *loading factor* merupakan pembobotnya. Untuk mendapatkan *loading factor* tersebut dilakukan analisis faktor. Seperti yang dikemukakan oleh Hair *et al.* (1995: 90) dan juga Solimun (2002: 40), bahwa analisis faktor adalah analisis yang digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit yang dinamakan dengan faktor. Jadi proses mereduksi sejumlah variabel menjadi satu atau beberapa faktor adalah merupakan konsep model analisis faktor.

Dalam analisis faktor, ukuran data yang disyaratkan adalah data berskala interval atau rasio, tetapi dapat juga menggunakan variabel *dummy* (1 dan 0). Sedangkan pengamatan dalam analisis faktor minimum 5 kali jumlah variabel dan lebih baik lagi jika 10 kali jumlah variabel (Hair *et al.*, 1995: 99).

Proses analisis faktor berdasarkan korelasi antar variabel. Oleh karena dalam analisis faktor akan mengelompokkan sejumlah variabel, maka seharusnya ada korelasi yang cukup kuat di antara variabel yang akan dikelompokkan. Jika ada suatu variabel berkorelasi lemah dengan variabel lainnya akan dikeluarkan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji model analisis faktor berdasarkan korelasi adalah KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's test. Besarnya KMO minimal 0,5, dan jika nilai KMO di bawah 0,5, maka analisis faktor tidak bisa digunakan.

Faktor yang dipertimbangkan bermakna adalah bilamana *eigen value* lebih besar satu ( $\lambda \geq 1$ ) dan atau varian kumulatifnya minimal 60 persen untuk penelitian-penelitian ilmu sosial (Hair *et al.*, 1995:104). Selanjutnya interpretasi dilakukan



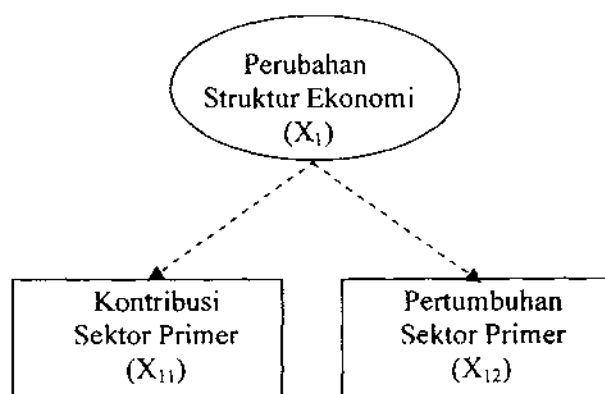
terhadap faktor yang terbentuk dengan memperhatikan besarnya *loading* dari faktor tersebut pada masing-masing variabel asal.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam analisis faktor terdapat dua pembahasan, yaitu analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Pada penelitian ini analisis konfirmatori yang dikembangkan 3 (tiga) model pengukuran untuk 3 (tiga) variabel laten atau konstruk yang berbeda, yaitu :

1. Model pengukuran variabel perubahan struktur ekonomi
2. Model pengukuran variabel struktur penyerapan tenaga kerja
3. Model pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat

Model pengukuran variabel perubahan struktur ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 4.1 mengacu pada tulisan Chenery (1975), Ghatak (1984), Kuznets (1969), Elkington dan Sims (1970), Todaro (2000) dan Chenery dan Sirquin (1975). Berdasarkan gambar tersebut diketahui, bahwa variabel perubahan struktur ekonomi dibentuk melalui 2 (dua) indikator, yaitu :

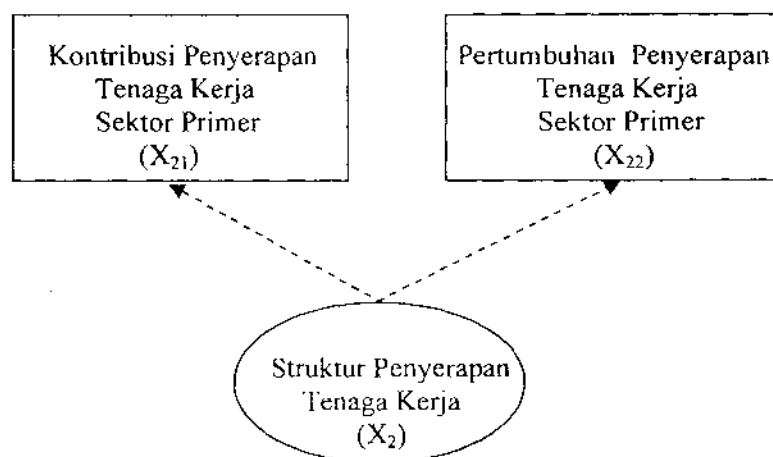
1. Kontribusi Sektor Primer
2. Pertumbuhan Sektor Primer



**Gambar 4.1 MODEL PENGUKURAN VARIABEL PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI**

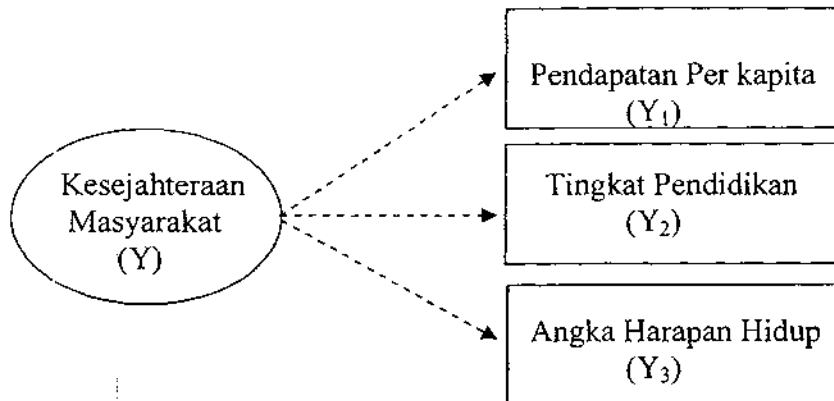
Model pengukuran variabel struktur penyerapan tenaga kerja mengacu pada tulisan Abel (2001), McEachern (2000), Samuelson (1995), Clark dan Fisher (1970) dan Lewis (1954) yang diilustrasikan seperti Gambar 4.2, dibentuk melalui 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer
2. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer



**Gambar 4.2 MODEL PENGUKURAN VARIABEL STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Model pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat mengacu pada indikator yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan BPS Provinsi Bali (2000a), Albert dan Hahnel (2005), Samuelson (1952); Lionel Robbins (1932) dan Thomas (2000) yang dapat diilustrasikan seperti Gambar 4.3 di halaman 108.



**Gambar 4.3 MODEL PENGUKURAN VARIABEL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Berdasarkan gambar tersebut diketahui, bahwa variabel kesejahteraan masyarakat dibentuk melalui tiga indikator atau variabel terukur, yaitu :

1. Pendapatan Per kapita
2. Tingkat Pendidikan
3. Angka Harapan Hidup

#### **4.7.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 dilakukan dengan analisis jalur. Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam studi disertasi ini merupakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain, mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan sistem secara simultan, salah satunya analisis jalur (*path analysis*) (Solimun, 2002 : 50).

Alasan penggunaan analisis jalur, yaitu :

1. Hipotesis yang diuji dikembangkan dari model (kerangka konseptual) yang semua hubungannya bersifat asimetri dan merupakan sistem, dan model dapat dikategorikan bersifat rekursif, sehingga metode yang paling tepat adalah analisis jalur.
2. Analisis jalur memberikan metode langsung berkaitan dengan hubungan ganda secara simultan (model struktural), sehingga memberikan efisiensi analisis statistika.
3. Kemampuannya untuk menguji hubungan secara komprehensif dan memberikan suatu bentuk transisi analisis *exploratory* menuju analisis *confirmatory*. Bentuk transisi ini berkaitan dengan upaya yang lebih besar dalam semua lapangan studi untuk mengembangkan suatu pandangan masalah secara lebih sistematis dan holistik. Upaya seperti itu memerlukan kemampuan untuk menguji suatu hubungan yang berantai yang membentuk model yang besar, seperangkat prinsip dasar, atau suatu teori keseluruhan, hal seperti ini sangat cocok diselesaikan dengan analisis jalur.

Langkah-langkah Analisis jalur dapat dilihat pada uraian berikut.

**a. Pertama**

Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori, yaitu :

1. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga kerja.
2. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem persamaan simultan atau juga ada yang menyebut model struktural.

1. Hubungan antara  $X_1$  dan  $X_2$

$$X_2 = b_1 X_1 + e_1 \dots\dots\dots(4.1)$$

Di mana :

- $b_1$  adalah koefisien jalur  $X_1$  dengan  $X_2$
- $X_1$  adalah perubahan struktur ekonomi
- $X_2$  adalah struktur penyerapan tenaga kerja
- $e_1$  adalah *error*

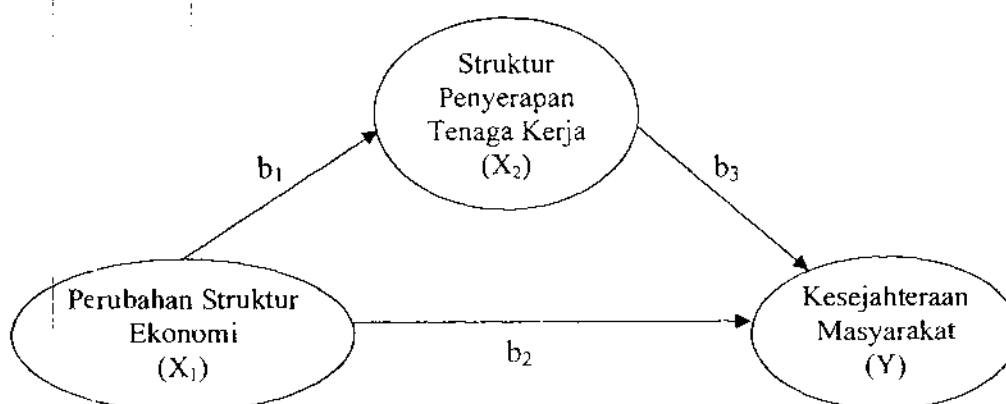
2. Hubungan antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$

$$Y = b_2 X_1 + b_3 X_2 + e_2 \dots\dots\dots(4.2)$$

Di mana :

- $b_2$  adalah koefisien jalur  $X_1$  dengan  $Y$
- $b_3$  adalah koefisien jalur  $X_2$  dengan  $Y$
- $e_2$  adalah *error*

Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis tersebut, dapat dibuat model dalam bentuk diagram jalur seperti Gambar 4.4.



**Gambar 4.4. DIAGRAM JALUR VARIABEL PENELITIAN**

Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik. Model hipotetik yang dibangun bisa lebih dari satu, terutama bilamana landasan konsepnya belum mapan.

#### **b. Kedua**

Langkah kedua dari analisis jalur adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah :

1. Di dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif.
2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis jalur.
3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval
4. *Observed variable* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran *valid* dan *reliabel*).
5. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

Uji linieritas menggunakan *curve fit* dan menerapkan prinsip *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model signifikan atau nonsignifikan berarti dapat dikatakan model berbentuk linier.

#### **c. Ketiga**

Langkah ketiga di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Perhitungan koefisien pada gambar diagram jalur pada uraian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk anak panah bolak-balik  $\leftrightarrow$  , koefisiennya merupakan koefisien korelasi,  $r$  (yang biasa dihitung dengan *product moment method*).
2. Untuk anak panah satu arah  $\rightarrow$  digunakan perhitungan regresi variabel yang distandarkan, secara parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS), yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif (satu arah). Dari perhitungan ini diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung.

Di dalam analisis jalur di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien beta dinamakan koefisien jalur pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung dilakukan dengan mengalikan koefisien beta dari variabel yang dilalui. Pengaruh total dihitung dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung (Sharma, 1996: 451) dan Ghozali (2001: 161). Berdasarkan Gambar 4.4 di halaman 110, dapat dilakukan perhitungan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total sebagai berikut :

- a). Pengaruh langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat =  $b_2$
- b). Pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja =  $(b_1 \times b_3)$ .
- c). Pengaruh total pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja =  $b_2 + (b_1 \times b_3)$ .

d). Peridugaan parameter  $P_{12}$ ,  $P_{13}$  dan  $P_{23}$  dilakukan dengan Metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan *software* SPSS Versi 13 untuk masing-masing model persamaan.

#### d. Keempat.

Langkah keempat di dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Telah disebutkan, bahwa dianggap semua asumsi terpenuhi. Terdapat dua indikator validitas di dalam analisis jalur, yaitu koefisien determinasi total dan *theory trimming*.

##### (a) Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

$$R^2_m = 1 - P_e^2_1 - P_e^2_2 - \dots - P_e^2_p \dots \dots \dots (4.3)$$

dalam hal ini, interpretasi terhadap  $R^2_m$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.

$P_{ei}$  yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumus :

$$P_{ei} = \sqrt{1 - R^2} \dots \dots \dots (4.4)$$

##### (b) Theory Trimming

Uji validasi koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan pada regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial. Berdasarkan *theory trimming*, maka jalur-jalur yang non signifikan dibuang, sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik.



**(e) Kelima**

Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi hasil analisis, yaitu menentukan jalur-jalur pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi jalur pengaruhnya lebih kuat.

## BAB 5

### ANALISIS HASIL STUDI

#### 5.1 Kondisi Geografis Daerah Provinsi Bali

Provinsi Bali secara geografis terletak pada posisi antara Lintang Selatan  $8^{\circ} 3' 40''$  --  $8^{\circ} 50' 48''$  dan Bujur Timur  $114^{\circ} 25' 53''$  –  $115^{\circ} 42' 40''$  dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara Laut Bali, Selatan Samudera Indonesia, Timur Selat Lombok dan Sebelah Barat Selat Bali. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan (Gambar 5.1 di halaman 118). Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan  $5.632,86 \text{ Km}^2$  atau  $0,29 \%$  dari luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2000 (sensus penduduk) sebesar 3.146.999 jiwa. Ini berarti kepadatan penduduk Bali 555 jiwa per  $\text{Km}^2$  dan tingkat pertumbuhan penduduk  $1,19\%$  per tahun selama periode tahun 1990-2000. Secara administratif, Provinsi Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar. Wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari 53 Kecamatan, 674 Desa/Kelurahan, 1.399 Desa Adat/Pekraman dan 3.945 Banjar Dinas/Adat/Pekraman.

Kondisi geografis daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Jembrana, ibu kotanya Negara dengan luas wilayah  $841,80 \text{ Km}^2$  terletak paling barat dari provinsi Bali yang merupakan pintu gerbang Pulau Bali melalui pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dari arah Pulau Jawa dengan jumlah

penduduk pada tahun 2005 sebanyak 224.990 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,63 % per tahun.

2. Kabupaten Tabanan, ibu kotanya Tabanan dengan luas wilayah 839,33 Km<sup>2</sup> , terletak di sebelah timur Kabupaten Jembrana. Kabupaten Tabanan dikenal dengan sebutan lumbung berasnya Provinsi Bali dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 405.484 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,73 % per tahun.
3. Kabupaten Badung, ibu kotanya Badung dengan luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> , Kabupaten Badung terletak di sebelah timur Kabupaten Tabanan dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 374.377 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,33 % per tahun.
4. Kota Denpasar, ibu kotanya Denpasar dengan luas 123,98 Km<sup>2</sup>. Kota Denpasar di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Badung, jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 463.915 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3,20 % per tahun.
5. Kabupaten Gianyar, ibu kotanya Gianyar dengan luas wilayah 368,00 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Gianyar terletak di sebelah timur Kota Denpasar, jumlah penduduknya pada tahun 2005 sebanyak 383.591 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,56 % per tahun.
6. Kabupaten Bangli, ibu kotanya Bangli dengan luas wilayah 520,81 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Bangli terletak pada posisi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten

Karangasem. Jumlah penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2005 sebanyak 211.186 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,94 % per tahun.

7. Kabupaten Klungkung ibu kotanya Semarapura, luas wilayah Kabupaten Klungkung 315,00 Km<sup>2</sup> terletak pada posisi di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli, di sebelah selatan Samudra Indonesia dan di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Jumlah penduduk kabupaten Klungkung pada tahun 2005 sebanyak 170.744 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya 0,31 % per tahun.
8. Kabupaten Karangasem, ibu kotanya Amlapura dengan luas wilayah 839,54 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Karangasem terletak pada posisi ujung timur Provinsi Bali yang merupakan pintu gerbang Pulau Bali melalui pelabuhan penyebrangan Padangbai dari arah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduknya pada tahun 2005 sebanyak 395.409 jiwa serta laju pertumbuhan penduduknya 0,49 % per tahun.
9. Kabupaten Buleleng ibu kotanya Singaraja dengan luas wilayah paling luas, yaitu sebesar 1.365,88 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Buleleng terletak di ujung utara Pulau Bali dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 618.076 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya 0,33 % per tahun.

Letak geografis Provinsi Bali cukup strategis, baik dikaitkan dengan pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi, karena Bali terletak di tengah-tengah antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Pembangunan daerah Bali ditetapkan dalam bentuk visi pembangunan daerah yang diwujudkan dalam pelaksanaan yang semakin transparan dan akuntabel dalam suasana pemerintahan yang bersih dan baik



### 5.2.1 Pertumbuhan Sektor

Dalam jangka panjang struktur perekonomian biasa menjadi salah satu indikator untuk menilai terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah.

Secara agregat, struktur perekonomian terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kelompok sektor ekonomi utama terhadap PDRB. Nilai tambah yang diciptakan tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing kelompok sektor ekonomi utama.

Transformasi ini biasa dianalisis melalui pertumbuhan maupun pergeseran perimbangan kontribusi (*share*) masing-masing kelompok sektor ekonomi utama.

Dalam bahasan berikut akan dibahas mengenai pertumbuhan masing-masing kelompok sektor ekonomi utama PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 5.1 di halaman 121.

Berbagai situasi kurang menguntungkan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional umumnya dan daerah khususnya. Pergantian kekuasaan, situasi keamanan yang tidak terjamin, perkembangan politik tanah air yang sangat fluktuatif, diwarnai pula dengan krisis moneter yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tabel 5.1 menunjukkan, bahwa akibat pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 1998-2005, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, semua kabupaten/kota telah mengalami perubahan struktur dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa atau terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier dan sekunder. Pertumbuhan sektor primer di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2005 sudah lebih rendah dari 10%,

sedangkan pertumbuhan sektor tersier di atas pertumbuhan sektor sekunder di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bahkan Kabupaten Tabanan, Gianyar, Karangasem dan Buleleng pertumbuhan sektor tersier mencapai di atas 7%, sedangkan kabupaten lainnya termasuk Kota Denpasar pertumbuhan sektor tersiernya di atas 5%, kecuali kabupaten Klungkung hanya 4,84%.

### 5.2.2 Kontribusi Sektor.

Struktur ekonomi suatu region sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Untuk mendapatkan gambaran struktur ekonomi tersebut, berikut disajikan kontribusi masing-masing kelompok utama sektor ekonomi atau atas dasar harga konstan terhadap penciptaan PDRB di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 5.2 di halaman 125.

Tabel 5.2 menunjukkan, bahwa pada periode 1998-2005, semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perubahan struktur ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB yang diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor Tersier dan sektor Sekunder. Setelah mengalami peningkatan *share* yang cukup tajam pada tahun 1998, sektor primer di semua daerah kembali mengalami penurunan di sepanjang tahun 1999. Penurunan kontribusi sektor Primer terus berlanjut pada tahun 2000 dan tahun 2005.

**Tabel 5.1**  
**PERTUMBUHAN SEKTOR MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam %)**

No	Tahun	Sektor Utama	Kabupaten/Kota								
			Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
1	1998	P	7,03	5,60	4,89	10,63	-0,12	5,18	8,72	5,18	3,34
		S	-1,63	-13,78	-7,55	-1,25	6,09	-15,81	-2,97	4,34	-11,09
		T	-33,27	-30,5	-31,3	-11,22	-32,45	-20,53	30,14	-57,85	-19,64
2	1999	P	5,33	5,16	3,51	7,14	0,36	5,48	4,43	4,18	5,25
		S	5,61	16,09	8,24	16,39	5,67	7,99	1,43	7,71	3,44
		T	1,37	10,5	1,01	17,41	6,01	14,45	6,07	51,88	6,65
3	2000	P	2,57	4,40	2,14	3,19	2,23	3,39	7,62	3,77	3,91
		S	12,86	15,93	19,38	15,85	12,45	4,93	13,1	14,87	8,99
		T	20,77	21,66	24,97	37,43	17,37	26,24	10,2	62,68	12,81
4	2001	P	6,16	3,90	-2,90	8,71	6,22	9,06	5,11	3,38	4,21
		S	5,12	26,33	16,06	18,51	14,28	12,07	17,65	12,52	14,6
		T	21,16	21,39	31,34	16,73	23,91	17,41	8,82	15,12	15,39
5	2002	P	5,38	4,41	-0,10	2,22	0,73	8,78	5,45	3,68	3,51
		S	10,83	11,91	12,66	10,58	15,75	5,36	8,31	12,76	11,54
		T	13,4	15,85	16,87	22,13	6,35	12,34	2,36	15,85	5,28
6	2003	P	3,11	2,72	2,53	1,02	-0,79	3,85	7,32	4,27	3,97
		S	13,22	1,59	16,21	9,25	11	8,19	9,14	13,5	11,13
		T	16,64	17,49	22,18	24,34	18,96	12,17	9,47	16,06	14,05
7	2004	P	2,56	4,17	-3,60	2,31	2,07	3,51	3,63	3,71	2,73
		S	5,16	5,48	6,31	2,64	5,53	3,97	3,32	5,66	5,37
		T	5,72	5,54	7,80	6,37	7,98	6,22	7,75	6,45	6,86
8	2005	P	2,49	3,87	-1,15	4,03	4,49	3,83	4,92	5,21	2,43
		S	4,69	6,97	3,60	3,82	3,25	4,44	6,44	6,72	6,29
		T	5,19	7,60	5,66	7,29	4,84	6,99	7,05	7,02	6,69

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Keterangan : P = Primer  
S = Sekunder  
T = Tersier



Walaupun sebagian besar daerah memiliki kecenderungan penurunan *share* di sektor Primer, namun peranannya di sebagian besar kabupaten masih di atas 20 %, kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar *share* sektor primer di bawah 10%. Hal ini menunjukkan, bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Bali masih menggantungkan perekonomiannya terhadap kegiatan di sektor primer dan juga dapat diartikan, bahwa sektor Primer masih merupakan sektor yang dominan pada struktur perekonomian kabupaten setelah sektor Tersier yang telah mencapai di atas 50%. Bahkan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, kontribusi sektor Tersiernya pada tahun 2005 masing-masing mencapai 83,58% dan 73,45%.

Peran sektor Sekunder masih relatif kecil. Hal ini disebabkan karena Bali tidak mempunyai sumber-sumber mineral maupun sumber daya alam lainya yang mampu untuk mendukung pembangunan industri berat, sehingga peran dari industri di daerah Bali adalah industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga.

Di Provinsi Bali, proses perubahan struktur ekonomi boleh dikatakan cukup pesat. Periode sejak tahun 1975 hingga tahun 2005 peran sektor Primer cenderung menurun, sedangkan peran sektor Sekunder dan Tersier terus meningkat. Pada dekade 1970-an, sektor Primer masih memiliki pangsa PDRB lebih besar dibandingkan sektor Sekunder dan Tersier. Akan tetapi menjelang dekade 1980-an, mulai tahun 1978 terjadi transisi, di mana sektor tersier menjadi dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB (lampiran 16 dan 17 di halaman 234 dan 235).

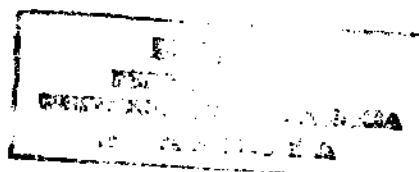
### **5.2.3 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja**

Struktur perekonomian dalam jangka panjang menjadi salah satu indikator

untuk menunjukkan terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah. Transformasi ini salah satunya dapat dianalisis melalui pergeseran pertumbuhan penyerapan tenaga kerja antar sektor. Dalam bahasan berikut akan dibahas mengenai pergeseran pertumbuhan penyerapan tenaga kerja antar sektor di kabupaten/kota di Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 5.3 di halaman 127.

Tabel 5.3. menggambarkan pertumbuhan tenaga kerja sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tersier periode 1998 sampai dengan 2005 di semua kabupaten/kota di provinsi Bali. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer di kabupaten/kota tahun 2005 menunjukkan pertumbuhan negatif. Jika dicermati pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor Sekunder, terdapat 1 daerah kota yang mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan di sektor tersier hanya satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Badung sebesar  $-0,17\%$ .

Kondisi perekonomian di daerah akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan negatif di setiap sektor masing-masing daerah merupakan refleksi dari kondisi tersebut. Jika kesempatan kerja terbuka luas, maka penyerapan tenaga kerja meningkat dan pengangguran akan menurun. Dengan mencermati angka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada Tabel 5.3, pada tahun 2002 Kabupaten Gianyar memiliki kondisi penyerapan tenaga kerja yang buruk, karena semua sektor mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja negatif, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng. Walaupun demikian, pada perkembangan selanjutnya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang negatif mengalami penurunan dan bahkan mengarah ke pertumbuhan penyerapan tenaga



kerja positif. Sementara itu di kabupaten/kota lainnya menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja positif dan negatif pula, namun ada kecenderungan, bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor tersier dari tahun 1998-2005 lebih besar dibandingkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor sekunder maupun primer.

Mengacu pada kondisi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor Primer, Sekunder dan tersier pada Tabel 5.3 dapat diindikasikan, bahwa kesempatan kerja yang tercipta sangat rentan terhadap kondisi perubahan perekonomian setiap daerah. Kemungkinan lain yang biasa menjelaskan kondisi ini adalah permintaan dan penawaran akan tenaga kerja itu sendiri.

#### **5.2.4 Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja.**

Perubahan struktur ekonomi semua kabupaten/kota di Provinsi Bali juga dapat terjadi jika ditinjau dari kontribusi penyerapan tenaga sektoral jangka panjang. Jika dicekmati Tabel 5.4 di halaman 129, ternyata *trend* yang terjadi adalah semakin menurunnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang diikuti oleh peningkatan kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Tersier dan Sekunder. Bahkan pada tahun 2005 Kota Denpasar dan Kabupaten Badung kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Tersiernya sudah mencapai di atas 50%, yaitu masing-masing sebesar 81,24%, dan 60,12%. Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa akibat pembangunan yang dilaksanakan pada periode tahun 1998-2005, perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Bali dilihat dari sisi kesempatan kerja, telah mengalami

**Tabel 5.2**  
**KONTRIBUSI SEKTOR MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam %)**

No	Tahun	Sektor Utama	Kabupaten/Kota								
			Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
1	1998	P	28,52	37,04	7,24	18,31	34,02	33,42	36,42	33,19	8,96
		S	14,14	10,67	9,7	27,1	17,07	11,61	11,91	12,14	16,09
		T	57,35	52,29	83,17	54,59	48,92	54,99	51,69	55,68	74,96
2	1999	P	28,40	34,49	7,22	17,90	33,80	32,32	36,27	31,09	8,93
		S	14,15	11	9,82	27,7	17,03	11,74	11,9	12,18	16,04
		T	57,04	54,51	83,01	55,39	49,18	55,93	51,87	56,73	75,02
3	2000	P	28,35	33,31	7,18	17,74	33,52	31,43	36,03	30,81	8,89
		S	13,99	11,25	9,86	27,33	17,1	12,05	12,11	11,88	15,09
		T	57,67	55,44	82,91	52,62	49,39	56,53	51,85	57,3	75,19
4	2001	P	27,83	32,41	7,16	17,66	33,43	30,83	35,74	30,58	8,73
		S	13,83	11,71	9,82	26,69	17,02	12,13	12,37	12,07	16
		T	58,34	55,88	83,06	56,66	49,55	57,33	51,89	57,33	75,27
5	2002	P	27,76	32,11	7,14	17,12	32,83	30,60	34,99	30,46	8,68
		S	13,63	11,82	9,82	25,63	17,43	12,33	12,34	12,24	16,09
		T	58,59	56,08	83,11	57,25	49,74	57,07	52,63	57,31	75,24
6	2003	p	27,54	32,34	7,13	16,63	32,33	31,25	34,80	30,03	8,70
		S	13,74	11,06	10,04	25,1	17,55	12,28	12,23	12,4	16,1
		T	58,71	56,6	82,84	58,27	50,12	56,47	52,97	57,57	75,2
7	2004	P	27,26	31,91	7,12	16,51	32,27	31,15	35,20	28,57	7,98
		S	13,08	11,04	9,53	24,06	15,76	13,14	10,73	13,49	18,82
		T	59,66	57,05	83,35	59,43	51,97	55,71	54,07	57,94	73,2
8	2005	P	27,08	31,04	7,11	16,44	32,09	31,03	34,68	28,39	7,81
		S	13,17	11,01	9,31	23,62	15,21	13,09	10,84	13,59	18,74
		T	59,75	57,95	83,58	59,94	52,7	55,88	54,48	58,02	73,45

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Keterangan : P = Primer  
S = Sekunder  
T = Tersier

perubahan struktur dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa atau terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer mengarah ke sektor Tersier dan Sekunder.

Periode tahun 1975 hingga tahun 2005, kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer cenderung menurun, sedangkan kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Sekunder dan Tersier terus meningkat. Pada dekade 1970-an sampai 1990-an kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer lebih besar dibandingkan kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Sekunder dan Tersier. Akan tetapi, menjelang dekade 2000-an, mulai tahun 1998 terjadi transisi, dimana kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Tersier menjadi dominan (Lampiran 18 dan 19 di halaman 236 dan 237). Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan yang tidak sehat, karena terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Tersier tanpa melalui sektor Sekunder yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan, bahwa sifat usaha dari sektor non Primer, khususnya sektor Tersier secara umum bersifat padat modal (*capital intensive*).

### **5.2.5 Pendapatan Per Kapita**

Salah satu indikator kemakmuran suatu daerah adalah PDRB per kapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun sebagai hasil dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Atau dengan kata lain, PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang biasa diciptakan oleh masing-masing penduduk, akibat dari adanya aktivitas produksi. Pada Tabel 5.5 di halaman 130, disajikan pendapatan per kapita masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode tahun 1998 - 2005. Dari Tabel 5.5.

**Tabel 5.3**  
**PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam %)**

No	Tahun	Sektor Utama	Kabupaten/Kota								
			Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
1	1998	P	7,92	5,07	3,61	4,99	6,25	4,49	5,38	4,50	4,47
		S	-25,25	-15,95	-10,5	4,03	-20,47	-8,78	-3,12	41,79	2,36
		T	21,29	14,97	5,73	13,73	5,77	3,51	-2,5	21,66	9,94
2	1999	P	5,42	3,94	2,99	3,63	4,98	3,82	3,02	3,94	1,54
		S	46,49	39,52	30,51	14,67	29,87	23,97	26,27	50,3	19,39
		T	2	1,29	3,02	2,73	-1,43	23,59	0,8	-5,03	0,67
3	2000	P	2,37	2,68	1,37	2,37	0,37	3,37	2,37	2,37	2,37
		S	0,92	0,99	0,57	1,1	1	1,02	1,05	0,76	0,8
		T	0,71	5,32	0,7	0,71	0,7	0,69	0,72	0,74	0,67
4	2001	P	1,31	2,17	-1,03	-2,81	2,47	-2,47	1,75	-2,24	-1,54
		S	-8,95	-11,55	3,32	1,46	-19,29	25,54	43,9	-16,95	8,9
		T	11,39	-23,15	1,73	27,46	-3,67	14,89	0,93	2,64	8,43
5	2002	P	-1,16	-2,17	1,94	-5,60	-2,58	2,07	1,27	2,74	2,67
		S	-3,93	26,82	13,18	-15,31	18,63	-23,81	-11,72	-0,99	-0,02
		T	25,3	24,43	8,92	-39,51	6,19	-20,58	-9,03	-0,81	14,75
6	2003	P	0,64	0,59	0,59	-6,19	3,14	0,63	0,60	0,60	0,65
		S	1,61	1,62	12,47	1,94	1,69	1,76	1,94	1,49	1,68
		T	1,98	2,21	-2,21	65,7	-0,92	1,86	2,18	1,96	1,94
7	2004	P	-0,14	-0,91	-0,08	-6,70	2,62	-0,13	1,15	-0,18	-0,16
		S	2,63	2,65	13,47	2,95	2,72	2,78	2,98	2,50	-0,72
		T	2,98	3,24	-2,13	-1,12	1,08	2,90	-0,18	2,98	2,96
8	2005	P	-0,86	-1,41	-1,43	-7,21	-4,16	-1,67	-1,68	-1,45	-1,35
		S	3,65	3,62	14,52	3,90	3,70	3,68	3,92	3,62	-0,62
		T	4,92	5,26	-0,17	0,20	3,62	3,84	1,86	4,92	4,85

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Keterangan : P = Primer  
S = Sekunder  
T = Tersier

tampak, bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan PDRB per kapita yang cukup berarti selama periode tahun 1998-2005. Kabupaten/kota yang PDRB per kapitanya di atas PDRB per kapita Provinsi adalah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2005, tiga daerah ini mempunyai PDRB per kapita tertinggi, masing-masing sebesar Rp 10.248.648,-, Rp 7.819.374,- dan Rp 6.162.649,-.

Berdasarkan data tersebut, dapat diindikasikan, bahwa kabupaten/kota yang mempunyai nilai PDRB per kapita besar merupakan daerah pariwisata yang memberikan sumbangan berarti dalam pembentukan angka PDRB per kapita. Jika dicermati lebih lanjut, PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan perubahan positif relatif tinggi, terutama pada daerah kabupaten/kota sebagai destinasi pariwisata, seperti kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Gianyar dan Jembrana.

Besarnya pertumbuhan PDRB per kapita adalah faktor depresiasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing, karena komposisi terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten/kota adalah berasal dari sektor tersier/jasa yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

#### **5.2.6 Tingkat Pendidikan.**

Program pendidikan memegang peranan yang penting karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk. Selain dilihat dari tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah penduduk, lebih jauh kualitas sumber daya manusia dapat diamati

**Tabel 5.4**  
**KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam %)**

No	Tahun	Sektor Utama	Kabupaten/Kota								
			Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli	Karangasem	Buleleng	Denpasar
1	1998	P	42,89	44,30	16,93	27,52	45,39	59,35	57,67	51,09	6,42
		S	18,83	17,33	20,92	41,05	15,34	19,86	14,79	9,84	16,08
		T	38,28	38,37	62,15	31,43	39,27	20,89	27,54	39,07	79,50
2	1999	P	40,43	43,49	16,84	26,06	44,61	58,61	56,40	47,44	6,40
		S	24,66	22,44	25,45	43,86	19,85	22,16	16,73	15,60	18,11
		T	34,91	36,07	59,71	30,08	38,54	23,23	24,87	36,96	75,49
3	2000	P	40,32	42,72	16,80	25,95	44,50	58,49	56,28	47,35	6,38
		S	24,73	22,52	25,44	43,99	19,92	22,25	16,81	15,63	18,14
		T	34,95	37,76	59,76	30,06	38,58	23,26	24,91	37,02	75,48
4	2001	P	39,51	42,31	15,70	20,65	44,25	57,89	52,39	47,34	5,49
		S	22,52	19,41	26,38	43,23	15,33	25,05	23,57	13,41	18,37
		T	30,97	28,28	58,92	37,12	35,42	25,05	24,04	39,25	76,14
5	2002	P	36,55	41,09	15,65	19,87	43,85	56,93	52,26	45,00	1,85
		S	22,72	24,25	21,66	40,02	17,81	21,57	22,93	13,99	17,06
		T	40,73	34,66	60,69	40,11	36,84	21,50	24,11	41,01	81,09
6	2003	p	36,27	40,76	15,50	19,70	42,13	56,64	52,60	44,70	1,83
		S	22,76	24,30	24,00	40,22	17,86	21,70	23,08	14,02	17,03
		T	40,97	34,94	58,50	40,08	40,01	21,66	24,32	41,28	81,14
7	2004	p	35,99	40,43	15,35	19,53	42,91	56,35	52,94	44,40	1,81
		S	22,80	24,35	26,34	40,42	17,91	21,83	23,23	14,05	17,00
		T	41,21	35,22	58,31	40,05	39,18	21,82	23,83	41,55	81,19
8	2005	p	35,69	40,08	15,20	19,36	42,69	56,06	53,28	44,10	1,79
		S	22,85	24,40	24,68	40,62	17,96	21,96	23,38	14,08	16,97
		T	41,46	35,52	60,12	40,02	39,35	21,98	23,34	41,82	81,24

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Keterangan : P = Primer  
S = Sekunder  
T = Tersier



dengan indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Indikator ini menunjukkan kemampuan dan keterampilan teknis penduduk yang didapatkan dari lembaga pendidikan formal. Indikator ini sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin baik kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

**Tabel 5.5**  
**PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam Rp)**

No	Kab./Kota	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jembrina	2.187.678	2.186.841	2.246.027	2.290.012	2.320.124	2.263.946	5.188.821	5.429.657
2	Tabanan	1.910.396	1.912.117	1.953.975	1.987.170	2.020.044	1.979.765	4.413.338	4.655.258
3	Badung	5.414.083	5.307.016	5.436.383	5.591.291	5.591.291	5.681.923	9.908.607	10.248.648
4	Gianyar	2.169.079	2.188.584	2.276.993	2.344.959	2.392.143	2.380.492	5.704.075	5.939.335
5	Klungkung	2.330.001	2.339.888	2.391.679	2.450.910	2.499.592	2.480.254	5.846.698	6.162.649
6	Bangli	1.855.753	1.854.570	1.893.522	1.923.955	1.956.165	1.910.302	3.947.455	4.096.481
7	Karangasem	1.471.010	1.471.768	1.501.345	1.523.449	1.550.455	1.481.485	3.435.910	3.605.534
8	Buleleng	1.640.552	1.643.637	1.690.005	1.727.566	1.770.770	1.716.504	4.047.950	4.273.011
9	Denpasar	2.861.574	2.829.375	2.852.150	2.871.953	2.890.637	3.276.079	7.594.418	7.819.374
	Prov. Bali	2.383.343	2.370.351	2.417.509	2.453.287	2.492.314	2.472.456	5.876.262	6.139.852

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2004 dan 2006.

Program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah ternyata membawa dampak yang baik dan ini terlihat dari kecenderungan tingkat pendidikan di Provinsi Bali yang semakin meningkat. Tabel 5.6 di halaman 131, menggambarkan keadaan tingkat pendidikan masing-masing kabupaten/kota dengan kondisi yang berbeda. Pada tahun 2005 bila disusun berdasarkan ranking, maka Kabupaten Badung menduduki tempat yang pertama (10,3 tahun), kemudian Kabupaten Bangli dan Buleleng (9,9 tahun) dan Kota Denpasar (7,2 tahun).

Bila menyimak dari angka tersebut, hal ini menggambarkan komitmen pemerintah yang tinggi untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangan pendidikan di masing-masing daerah.

**Tabel 5.6**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005 (dalam Tahun)**

No	Kabupaten/ Kota	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jembrana	5,7	6,1	6,1	6,1	6,9	6,9	6,1	4,8
2	Tabanan	6,6	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	6,1	6,2
3	Badung	7,5	8,1	8,1	8,1	8,6	8,6	7,5	10,3
4	Gianyar	6,1	6,3	6,3	6,3	7,3	7,3	6,8	4,8
5	Klungkung	5,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,3
6	Bangli	5,5	5,5	5,5	5,5	8,0	8,0	4,6	9,9
7	Karangasem	3,8	4,1	4,1	4,1	4,6	4,6	6,8	7,1
8	Baleleng	5,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	9,9
9	Denpasar	9,1	9,7	9,7	9,7	10,3	10,3	6,2	7,2
	Prov. Bali	6,3	6,8	6,8	6,8	7,4	7,4	7,3	7,3

**Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Bali, 2006**

Selanjutnya jika didasarkan pada ranking yang terendah, maka Kabupaten Jembrana dan Gianyar menduduki urutan ini. Ketertinggalan kedua kabupaten ini dalam pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan ini lebih disebabkan oleh fasilitas pendidikan dan aksesibilitas yang masih terbatas.

### 5.2.7 Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh setiap kelompok penduduk (*Cohort*). Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan di masing-masing kabupaten/kota. Semakin tinggi derajat kesehatan yang dicapai suatu daerah, semakin tinggi angka harapan hidup yang dicapai. Berdasarkan konsep tersebut, Tabel 5.7 di halaman 132 akan menggambarkan angka harapan hidup menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Tabel 5.7**  
**ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1998 – 2005(dalam Tahun)**

No	Kabupaten /Kota	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Jembrana	68,4	69,8	69,8	69,8	71,33	71,33	68,30	67,00
2	Tabanan	71,2	72,6	72,6	72,6	73,21	73,21	71,14	67,50
3	Badung	69	70,5	70,5	70,5	72,24	72,24	71,80	72,33
4	Gianyar	69,3	70,7	70,7	70,7	72,65	72,65	68,50	67,60
5	Klungkung	65,7	67,1	67,1	67,1	68,93	68,93	71,20	68,20
6	Bangli	69	70,5	70,5	70,5	71,14	71,14	67,88	72,70
7	Karangasem	65	66,4	66,4	66,4	67,88	67,88	68,80	70,80
8	Buleleng	64,6	66	66	66	67,29	67,29	71,30	72,70
9	Denpasar	70,2	71,6	71,6	71,6	72,33	72,33	67,29	71,40
	Prov. Bali	68,10	69,50	69,50	69,50	71,54	71,54	70,20	70,40

**Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Bali, 2006**

Pada tahun 1998 Provinsi Bali mempunyai angka harapan hidup di atas 68 tahun dan semakin meningkat seiring dengan pergantian tahun hingga pada tahun 2005 angka harapan hidup mencapai 70,40 tahun. Makna dari angka tersebut menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan yang semakin baik, hingga mampu mencapai umur tertentu.

Bila dicermati menurut kabupaten/kota pada tahun 1998, Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar memiliki angka harapan hidup yang lebih besar bila dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Bali, bahkan pada tahun 2005 angka harapan hidup Kabupaten Bangli dan Buleleng melampaui seluruh kabupaten/kota lainnya. Artinya, pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangli dan Buleleng lebih baik bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kemudian di urutan kedua diduduki oleh Kabupaten

Badung, di urutan ketiga dan keempat, masing-masing diduduki oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem. Kemampuan daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup tersebut. Jika fasilitas dan layanan kesehatan daerah tinggi, maka tingkat kesehatan juga tinggi. Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali hanya lima kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup di atas 70, yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar. Sarana dan prasarana untuk menjangkau fasilitas kesehatan di kabupaten/kota tersebut relatif mudah, sehingga angka harapan hidup yang merupakan refleksi dari kesehatan masyarakat tersebut tinggi.

### **5.3 Deskripsi Variabel Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis statistik untuk masing-masing indikator variabel yang diobservasi dengan menggunakan nilai rata-rata, yaitu perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, seperti disajikan pada Lampiran 3 halaman 214.

#### **5.3.1 Indikator Variabel Perubahan Struktur Ekonomi**

Variabel perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali diidentifikasi berdasarkan dua indikator, yaitu kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor primer kabupaten/kota. Nilai rata-rata berdasarkan dari dua indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.8 di halaman 134.

Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali bergeser dari sektor primer ke sektor tersier dan sekunder. Rata-rata kontribusi sektor primer di Provinsi Bali dari tahun 1998-2005 sebesar 24,93% yang diikuti oleh rata-rata pertumbuhan sektor Primer sebesar 3,91%. Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata kontribusi sektor Primer

**Tabel 5.8**  
**NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL**  
**PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI**  
**BALI,TAHUN 1998-2005 ( dalam % )**

Tahun	Nilai Rata - Rata	
	Kontribusi Sektor Primer	Pertumbuhan Sektor Primer
1998	26,35	5,61
1999	25,60	4,54
2000	25,25	3,69
2001	24,93	4,87
2002	24,63	3,78
2003	24,53	3,11
2004	24,22	2,34
2005	23,96	3,35
Prov. Bali	24,93	3,91

Sumber : Lampiran 3.

dari tahun 1998-2005 di seluruh kabupaten/kota cenderung menurun yang diikuti oleh kecenderungan menurunnya pertumbuhan sektor Primer.

### 5.3.2 Indikator Variabel Struktur Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel struktur penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali diidentifikasi berdasarkan dua indikator, yaitu kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer kabupaten/kota. Nilai rata-rata berdasarkan dari dua indikator tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.9 di halaman 135.

Dari Tabel 5.9 dapat diketahui, bahwa akibat pembangunan yang dilaksanakan pada periode tahun 1998-2005, perekonomian Bali dari sisi kesempatan kerja telah mengalami perubahan struktur dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa atau terjadi perubahan struktur dari sektor Primer ke sektor Tersier dan Sekunder.

**Tabel 5.9**  
**NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL STRUKTUR PENYERAPAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**  
**TAHUN 1998-2005 ( dalam % )**

Tahun	Nilai Rata - Rata	
	Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer
1998	39,06	5,19
1999	37,81	3,70
2000	37,64	2,18
2001	36,17	-0,27
2002	34,78	-0,09
2003	34,46	0,14
2004	34,41	-0,50
2005	34,25	-2,36
Prov. Bali	36,07	1,00

Sumber : Lampiran 3.

Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dari tahun 1998-2005 di seluruh kabupaten/kota cenderung menurun yang diikuti oleh kecenderungan meningkatnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Tersier dan Sekunder. Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi Bali rata-rata sebesar 36,07%, kemudian diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer sebesar 1,00%.

### 5.3.3 Indikator Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Variabel kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup kabupaten/kota. Nilai rata-rata berdasarkan dari tiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10 di halaman 137.

Salah satu indikator yang kerap kali digunakan untuk mengukur kemakmuran/kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah dengan menggunakan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita merupakan refleksi dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan meningkatnya perekonomian dan melambatnya pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Demikian juga sebaliknya, jika perekonomian menurun dan pertumbuhan penduduk semakin cepat, maka pendapatan per kapita akan menurun.

Tabel 5.10 menunjukkan, bahwa selama periode tahun 1998-2005, kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali secara umum mengalami peningkatan. Indikator ini setidaknya dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai, apakah hasil pembangunan yang dilakukan selama ini, secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Kondisi ini ditunjukkan oleh rata-rata indikator pendapatan per kapita (Y/C) pada tahun 1998 sampai tahun 1999 di seluruh kabupaten/kota cenderung meningkat dari Rp 2.426.681 pada tahun 1998 menjadi Rp 5.803.328 pada tahun 2005. Dalam perkembangan suatu masyarakat, upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pendidikan masyarakat, semakin luas pengetahuan dan wawasan penduduk, sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru, terutama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Selanjutnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Bali mencapai 6,77 tahun. Kondisi pendidikan penduduk Provinsi Bali masih digolongkan sebagai berpendidikan rendah, dimana sebagian besar penduduk berpendidikan sekolah dasar.

**Tabel 5.10**  
**NILAI RATA-RATA INDIKATOR VARIABEL KESEJAHTERAAN**  
**MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**  
**TAHUN 1998 – 2005**

Tahun	Nilai Rata-Rata		
	Pendapatan Per Kapita (Rp)	Tingkat Pendidikan (Th)	Angka Harapan Hidup (Th)
1998	2.426.681	6,13	68,04
1999	2.414.866	6,13	69,33
2000	2.471.342	6,58	69,47
2001	2.523.474	6,58	69,62
2002	2.554.580	7,29	70,70
2003	2.574.528	7,06	70,71
2004	5.565.252	7,16	70,46
2005	5.803.328	7,20	70,82
Prov. Bali	3.291.756	6,77	69,89

Sumber : Lampiran 2

Penduduk yang berpendidikan SMU sudah lebih banyak dibandingkan yang berpendidikan SLTP. Hal ini dapat diartikan, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan di SLTP cenderung akan melanjutkan sampai ke tingkat SMU. Akan tetapi jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di atas SMU nampak semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ada (Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2002 : 33).

Dalam berbagai analisis demografi, angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Pada tingkat makro, angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup memberikan indikasi kompleks di



berbagai bidang, secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam suatu periode, akan berakibat penurunan angka harapan hidup.

Nilai rata-rata angka harapan hidup di Provinsi Bali dari tahun 1998 – 2005 cenderung meningkat dari 68,04 tahun menjadi 70,82 tahun. Kenaikan angka harapan hidup ini tentunya menjadi acuan sederhana tentang peningkatan secara relatif yang dicapai Bali dalam bidang kesehatan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **5.4 Analisis Faktor**

Seperti telah dijelaskan dalam metode penelitian, bahwa tujuan dari analisis faktor dalam studi ini adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap teori atau konsep dan untuk mendapatkan faktor skor, yaitu angka yang mewakili variabel laten perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan variabel indikatornya masing-masing. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis kelayakan data yang digunakan untuk masing-masing indikator dalam membentuk variabel latennya, yaitu dengan memperhatikan *measure of sampling adequacy* (MSA) menurut Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Bartlett's *test of sphericity*, serta memeriksa total varians yang dijelaskan (*total variance explained*) dan *eigenvalue* serta menghitung skor faktornya.

##### **5.4.1 Perubahan Struktur Ekonomi**

Hasil olahan data pada Lampiran 4 halaman 214, nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) *measure of sampling adequacy* (MSA) sebesar 0,500. Angka ini memenuhi syarat minimal 0,5 dan juga Bartlett's *test of sphericity* dengan nilai *chi square*

sebesar 7,783 dengan signifikansi 0,005. Hal ini berarti kumpulan variabel kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor primer dapat diproses untuk tahap analisis faktor lebih lanjut.

Pada tabel *Anti Image Matrices*, khususnya bagian bawah (*Anti Image Correlation*) dari Lampiran 4 terlihat angka-angka yang membentuk diagonal (bertanda 'a') merupakan MSA sebuah variabel. Oleh karena tidak ada variabel yang mempunyai MSA yang lebih kecil dari 0,50, maka semua variabel dapat dilibatkan dalam proses lebih lanjut.

Eerdasarkan Lampiran 4 yang disarikan pada Tabel 5.11, hasil total varians yang dijelaskan (*total variance explained*) menunjukkan, bahwa faktor yang membentuk variabel perubahan struktur ekonomi dibentuk dengan *eigenvalue* di atas 1,325 dengan persentase varians kumulatif sebesar 66,274 persen yang melebihi dari yang diisyaratkan minimal 60 persen. Oleh karena melebihi yang disyaratkan untuk analisis faktor, maka skor faktor yang terbentuk layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Tabel 5.11.**

**TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL  
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI**

Komponen	Eigenvalue Asal			Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading		
	Total	Persentase Varian	Persen Kumulatif	Total	Persentase Varian	Persen Kumulatif
1	1,325	66,274	66,274	1,325	66,274	66,274
2	0,675	33,726	100,000	-	-	-

Sumber : Lampiran 3

Kemampuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk oleh variabel indikator ditunjukkan oleh angka *communalities* seperti yang disajikan pada Tabel 5.12 di halaman 140.

**Tabel 5.12.**  
**RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL**  
**PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI**

Variabel	Loading Factor	Communalities
Kontribusi Sektor Primer	0,814	0,663
Pertumbuhan Sektor Primer	0,814	0,663

Sumber : Lampiran 3

Angka *communalities* untuk variabel kontribusi sektor Primer sebesar 0,663 menunjukkan sekitar 66,3 persen varians dari variabel kontribusi sektor Primer dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Angka *communalities* untuk variabel pertumbuhan sektor Primer sebesar 0,663 berarti sekitar 66,3 persen varians dari variabel pertumbuhan sektor Primer dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Hasil skor faktor yang dibentuk disajikan pada Lampiran 7 halaman 221.

#### 5.4.2 Struktur Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel struktur penyerapan tenaga kerja dengan indikator kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer berdasarkan Lampiran 5 halaman 218, mempunyai nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) *measure of sampling adequacy* (MSA) sebesar 0,500. Angka ini memenuhi syarat minimal 0,5 dan juga *Bartlett's test of sphericity* dengan nilai *chi square* sebesar 3,914 dengan signifikansi 0,048 berarti kumpulan variabel tersebut dapat di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Lampiran 5 pada tabel *Anti Image Matrices*, khususnya bagian bawah (*Anti Image Correlation*) tidak ada variabel yang mempunyai variabel yang lebih kecil dari 0,50. Oleh karena itu semua variabel dapat dilibatkan dalam proses lebih lanjut. Hasil total varians yang dijelaskan (*total variance explained*) dengan

persentase varians kumulatif sebesar 61,700 persen yang melebihi dari yang disyaratkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.13.

**Tabel 5.13.**  
**TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL**  
**STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Komponen	Eigenvalue Asal			Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading		
	Total	Persentase Varian	Persen Kumulatif	Total	Persentase Varian	Persen Kumulatif
1	1,234	61,700	61,700	1,234	61,700	61,700
2	0,766	38,300	100,000	-	-	-

Sumber : Lampiran 4

Kemampuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk ditunjukkan oleh angka *communalities* seperti yang disajikan pada Tabel 5.14.

**Tabel 5.14**  
**RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL**  
**STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Variabel	Loading Factor	Communalities
Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer	0,785	0,617
Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer	0,785	0,617

Sumber: Lampiran 4

Angka *communalities* untuk variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor primer adalah sebesar 0,617 menunjukkan sekitar 61,7 persen varians dari variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Angka *communalities* untuk variabel pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor primer sama dengan variabel kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer, karena faktor yang dibentuk hanya dengan 2 variabel. Hasil perhitungan skor faktor yang terbentuk disajikan pada Lampiran 7 halaman 221.

### 5.4.3 Kesejahteraan Masyarakat

Hasil analisis faktor variabel kesejahteraan masyarakat dengan indikator pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup mempunyai nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) *measure of sampling adequacy* (MSA) sebesar 0,594 dan Bartlett's *test of sphericity* dengan nilai *chi square* sebesar 93,140 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Selanjutnya pada tabel *Anti Image Correlation* dari Lampiran 6 di halaman 220, terlihat bahwa tidak ada variabel yang mempunyai MSA yang lebih kecil dari 0,50, sehingga tidak ada variabel yang dikeluarkan dalam himpunan tersebut dan dapat dilibatkan dalam proses lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 5.15 yang disarikan dari Lampiran 6, faktor yang terbentuk hanya satu dengan *eigenvalue* sebesar 2,219 dan total variansi kumulatif sebesar 73,953 persen. Angka-angka tersebut telah melebihi syarat minimal dalam pembentukan suatu faktor, sehingga skor faktor yang terbentuk layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Tabel 5.15**  
**TOTAL VARIAN YANG DIJELASKAN UNTUK VARIABEL**  
**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Komponen	Eigenvalue Asal			Ekstrasi Jumlah Kuadrat Loading		
	Total	Persentase Variansi	Persen Kumulatif	Total	Persentase Variansi	Persen Kumulatif
1	2,219	73,953	73,953	2,219	73,953	73,953
2	0,579	19,295	93,248	-	-	-
3	0,203	6,752	100,000	-	-	-

Sumber : Lampiran 6

Kemampuan menjelaskan dari faktor yang dibentuk terhadap variabel asal ditunjukkan oleh angka *communalities* seperti yang yang disajikan pada Tabel 5.16.

**Tabel 5.16.**  
**RINGKASAN ANALISIS KOMPONEN FAKTOR VARIABEL**  
**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Variabel	Loading Factor	Communalities
Pendapatan Per kapita (Y <sub>1</sub> )	0,825	0,681
Tingkat Pendidikan (Y <sub>2</sub> )	0,937	0,877
Angka Harapan Hidup (Y <sub>3</sub> )	0,813	0,660

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat dilihat, bahwa variabel tingkat pendidikan masyarakat memiliki angka *communalities* yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya, yaitu sebesar 0,877. Angka *communalities* sebesar 0,877 berarti, bahwa sekitar 87,7 persen varians dari tingkat pendidikan masyarakat mampu dijelaskan oleh faktor yang dibentuk. Angka *communalities* untuk variabel angka harapan hidup sebesar 0,660, sedangkan variabel pendapatan per kapita mempunyai angka *communalities* sebesar 0,681. Hasil skor faktor yang dibentuk disajikan pada Lampiran 7 halaman 221.

### **5.5 Analisis Jalur “ Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali ”**

Koefisien jalur dalam studi ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan paket program SPSS versi 13 terhadap model persamaan struktural mengenai pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Untuk mendapatkan koefisien

jalur, pada bagian ini secara bertahap diselesaikan melalui model persamaan regresi, yaitu :

1. Persamaan 1: Pengaruh variabel perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ) terhadap struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ).
2. Persamaan 2: Pengaruh perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ) dan struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

Model-model tersebut dengan klasifikasi variabel serta persamaan-persamaannya secara rinci disajikan pada Tabel 5.17.

**Tabel 5.17.**  
**KLASIFIKASI VARIABEL DAN PERSAMAAN JALUR**

<b>Model</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Persamaan</b>
1	Perubahan Struktur Ekonomi ( $X_1$ )	Struktur Penyerapan Tenaga Kerja ( $X_2$ )	$X_2 = b_1 X_1 + e_1$
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Struktur Ekonomi (<math>X_1</math>)</li> <li>• Struktur Penyerapan Tenaga Kerja (<math>X_2</math>)</li> </ul>	Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ )	$Y = b_2 X_1 + b_3 X_2 + e_2$

### **5.5.1 Pengaruh Variabel Perubahan Struktur Ekonomi ( $X_1$ ) Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja ( $X_2$ ).**

Berdasarkan hasil olahan data pada Lampiran 11 di halaman 229, diperoleh model struktur penyerapan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dengan bentuk persamaan regresi:

$$X_2 = 0,663 X_1$$

Di mana :

$X_1$  adalah perubahan struktur ekonomi

$X_2$  adalah struktur penyerapan tenaga kerja

### 5.5.2 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi ( $X_1$ ) dan Struktur Penyerapan Tenaga Kerja ( $X_2$ ) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ )

Pengaruh perubahan struktur ekonomi dan struktur penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil perhitungan Lampiran 12 di halaman 230 dapat dibuat model persamaan regresi :

$$Y = -0,504 X_1 - 0,390 X_2$$

Di mana :

- $X_1$  adalah perubahan struktur ekonomi
- $X_2$  adalah struktur penyerapan tenaga kerja
- $Y$  adalah kesejahteraan masyarakat

### 5.5.3 Evaluasi Terhadap Pemenuhan Asumsi Analisis Jalur

Pemeriksaan terhadap pemenuhan asumsi yang melandasi analisis jalur perlu dilakukan agar hasilnya memuaskan. Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah:

1. Di dalam model analisis jalur, hubungan antar variabel adalah linier dan aditif. Uji linieritas menggunakan *curve fit* dan menerapkan prinsip *parsimony*, yaitu bilamana menggunakan seluruh model signifikan atau nonsignifikan berarti dapat dikatakan model berbentuk linier. Berdasarkan hasil olahan data penelitian pada lampiran 8 – 10 di halaman 223 - 228 menunjukkan, bahwa semua hubungan antar variabel penelitian menunjukkan hubungan yang linier.. Oleh karena itu model analisis yang dibuat layak untuk diterapkan dalam studi ini.
2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan. Seperti yang disajikan pada Gambar 5.2 di halaman 147, bahwa model yang dibuat hanya sistem aliran kausal ke satu arah, tidak bolak-balik, sehingga analisis jalur layak diterapkan dalam studi ini.



3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval. Ukuran variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini semuanya berskala *ratio*, yang merupakan skor faktor hasil dari analisis faktor beberapa indikator yang membentuk variabel laten : perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis jalur layak digunakan dalam studi ini.
4. *Observed variables* diukur tanpa kesalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan, sehingga tidak diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dan asumsi ini tidak bersifat kritis dan dapat dipenuhi.

#### **5.5.4 Evaluasi Terhadap validitas Model**

Dengan menggunakan rumus 4.3 dan 4.4 di halaman 113, koefisien determinasi total persamaan struktural dari model penelitian sesuai perhitungan pada lampiran 10 diperoleh nilai  $R^2_m = 0,810$ . Koefisien determinasi total sebesar 0,810 mempunyai arti, bahwa sebesar 81 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan oleh model yang dibentuk, sedangkan sisanya 19 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang dibentuk.

#### **5.5.5 Koefisien Jalur**

Berdasarkan Lampiran 11 dan 12 di halaman 229 dan 230, dapat dibuat ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan pada Tabel 5.18 di halaman 147. Berdasarkan Tabel 5.18 dapat dijelaskan, bahwa pengaruh perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ) terhadap struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) dan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) signifikan, baik untuk taraf signifikan 1 persen maupun 5 persen,

Tabel 5.18.  
RINGKASAN KOEFISIEN JALUR VARIABEL PENELITIAN

Regresi	Koef. Regresi Standar	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow X_2$	0,663	0,000	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y$	-0,504	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y$	-0,390	0,000	Signifikan

Sumber : Lampiran 11 - 12.

Keterangan :  $X_1$  adalah perubahan struktur ekonomi

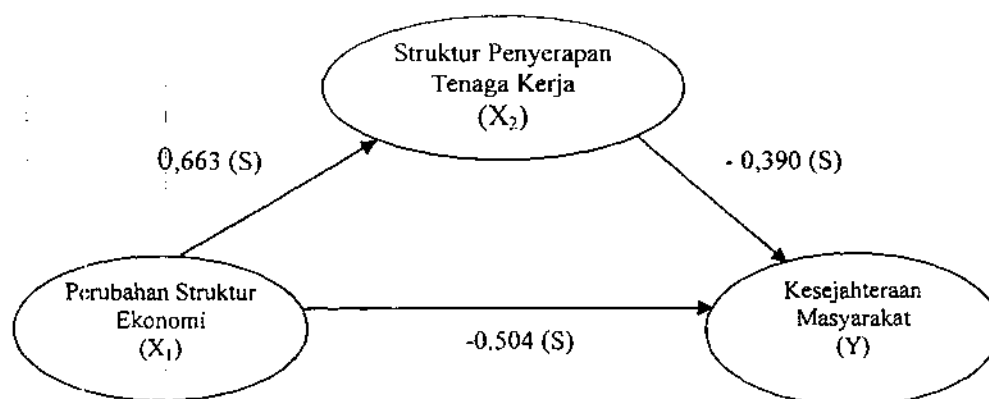
$X_2$  adalah struktur penyerapan tenaga kerja

$Y$  adalah kesejahteraan masyarakat

sedangkan variabel struktur penyerapan tenaga kerja yang diteliti menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hubungan kausal dari perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan Gambar

5.2.



Gambar 5.2. DIAGRAM JALUR PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TERHADAP STRUKTUR PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

## 5.6 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini yang diperhatikan adalah adanya pengaruh langsung dan signifikan yang ditunjukkan oleh arah anak panah antar variabel terukur, yaitu perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ), struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) dan kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ).

### 5.6.1 Pengujian Hipotesis 1 : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja.

Gambar 5.2 di halaman 147 menunjukkan pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Anak panah yang menghubungkan antara variabel perubahan struktur ekonomi dengan struktur penyerapan tenaga kerja dengan angka 0,663 menunjukkan hubungan langsung antara variabel perubahan struktur ekonomi dengan struktur penyerapan tenaga kerja (Hair *et al.*, 1995 : 630). Nilai absolut 0,663 tidak memberikan arti satuan pengaruh. Dengan *standard error* sebesar 0,089 hubungan kausal tersebut nyata pada taraf signifikansi 0,000. Hal ini berarti, bahwa perubahan struktur ekonomi dengan indikator kontribusi sektor primer dan pertumbuhan sektor Primer berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, bahwa kontribusi sektor Primer dan pertumbuhan sektor Primer secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur penyerapan tenaga kerja dengan indikator kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi Bali selama periode tahun 1998 – 2005.

### 5.6.2 Pengujian Hipotesis 2 : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil olahan data seperti yang disajikan pada Tabel 5.18 di halaman 147 menunjukkan, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada diagram jalur Gambar 5.2 di halaman 147. Dengan koefisien regresi sebesar  $-0,504$  dan *standard error* sebesar  $0,093$  atau pada tingkat signifikansi kurang dari 5 persen, maka variabel perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti, bahwa semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional (pertanian) ke modern menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

### **5.6.3 Pengujian Hipotesis 3 : Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.**

Pengaruh struktur penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat disajikan dalam diagram jalur seperti Gambar 5.2 di halaman 147. Variabel struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien regresi sebesar  $-0,390$  dengan *standard error* sebesar  $0,093$  berada pada tingkat signifikansi  $0,000$  atau kurang dari 5 persen. Hal ini berarti, bahwa semakin berubah struktur penyerapan tenaga kerja dari tradisional (pertanian) ke modern menyebabkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat di Provinsi Bali.

### **5.7 Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel**

Analisis pengaruh (dampak), baik langsung, tidak langsung serta dampak total dapat menjelaskan hubungan antar variabel penelitian (variabel laten) seperti perubahan struktur ekonomi, struktur penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan

masyarakat. Seperti yang dijelaskan Hughes *et al.*, dalam Hair *et al.* (1995:704), bahwa dengan ditemukan koefisien hubungan atau koefisien pengaruh, berarti pernyataan teori yang diuraikan akan semakin eksak (terukur dan terbandingkan), pengujian teori yang dikemukakan lebih teliti, dan yang terakhir komunikasi dan diskusi tentang perkembangan teori tersebut bisa lebih ditingkatkan.

Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam studi disertasi ini merupakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain, mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Di dalam analisis jalur di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien beta dinamakan koefisien jalur pengaruh langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung dilakukan dengan mengalikan koefisien beta dari variabel yang dilalui. Pengaruh total dihitung dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung (Sharma, 1996: 451) dan Ghozali (2001: 161).

Efek langsung dapat dilihat dari koefisien semua anak panah dengan satu ujung, seperti pengujian hipotesis-hipotesis sebelumnya. Sedangkan efek tidak langsung merupakan efek yang muncul melalui sebuah variabel antara, dan efek total merupakan efek dari berbagai hubungan. Menurut Sharma (1996:451), nilai pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) suatu variabel terhadap variabel tertentu merupakan nilai penjumlahan dari perkalian nilai pengaruh langsung (*loading factor*) terstandar dari variabel yang dilaluinya.

Berdasarkan Gambar 4.4 di halaman 110 dapat dihitung efek langsung, efek tidak langsung dan efek total antar variabel dalam penelitian ini, yaitu perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ), struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) dan kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) disarikan seperti yang disajikan pada Tabel 5.19.

**Tabel 5.19.**  
**RINGKASAN PENGARUH LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG**  
**DAN TOTAL ANTAR VARIABEL PENELITIAN**

Variabel	$X_1$			$X_2$		
	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT
$X_2$	0,663	-	0,663	-	-	-
$Y$	-0,504	-0,259	-0,763	-0,390	-	-0,390

Sumber : Lampiran 14

Keterangan : PL adalah pengaruh langsung

PTL adalah pengaruh tidak langsung

PT adalah pengaruh total

$X_1$  adalah perubahan struktur ekonomi

$X_2$  adalah struktur penyerapan tenaga kerja

$Y$  adalah kesejahteraan masyarakat

### **5.7.1 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan Tabel 5.19 dapat dijelaskan, bahwa perubahan struktur ekonomi ( $X_1$ ) berpengaruh langsung terhadap struktur penyerapan tenaga kerja ( $X_2$ ) sebesar 0,663 dan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) sebesar -0,504. Secara tidak langsung perubahan struktur ekonomi berpengaruh sebesar -0,259 terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sharma (1996:451), secara matematik angka tersebut berdasarkan Gambar 5.2 di halaman 147 diperoleh melalui jalur ( $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y$ ), yaitu dengan mengalikan 0,663 dengan -0,390, sehingga diperoleh angka -0,259. Pengaruh total perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,663 dan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar -0,763.

## BAB 6

### PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Berdasarkan hasil uji signifikansi akan dibahas, apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak sesuai dengan dukungan data dan kajian secara teoritis. Hasil analisis yang diperoleh dan telah dipaparkan pada Bab 5 akan dibahas mengenai makna dan mengapa hal itu terjadi, selanjutnya dikaitkan relevansinya dengan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Pada akhir pembahasan akan disampaikan temuan teoritis. Adanya pembahasan dan analisis studi secara lebih rinci sebagai berikut .

#### **6.1 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 di halaman 229 seperti tertera pada Tabel 5.18 di halaman 147 menunjukkan, bahwa variabel perubahan struktur ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur yang diperoleh sebesar 0,663 dan besarnya tingkat probabilitas 0,000. Hal ini berarti, semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional (pertanian) ke modern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor Primer akan merubah struktur penyerapan tenaga kerja dari tradisional (pertanian) ke modern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama, yakni perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap struktur



penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan perubahan struktur ekonomi terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Bali, menunjukkan, bahwa proses pembangunan yang telah berlangsung dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Struktur perekonomian daerah Bali ternyata sangat spesifik dan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini mengingat perekonomian Bali yang dibangun dengan mengandalkan sektor tersier (industri pariwisata) sebagai *leading sector* ternyata telah mampu menciptakan berbagai peluang yang dapat menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi sektor lain di luar pariwisata, dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat memperluas lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja. Peranannya cukup tinggi, walaupun sektor pariwisata cenderung menggunakan teknologi padat modal (*capital intensive*) yang ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya elastisitas kesempatan kerja dari tahun 1998-2005 (lampiran 22 di halaman 240). Kondisi ini juga di perkuat oleh koefisien elastisitas kesempatan kerja sektoral 4 sektor terakhir (Tersier) yang cenderung lebih kecil dan menurun dibandingkan dengan koefisien elastisitas kesempatan kerja 5 sektor lainnya (Primer dan Sekunder) dari tahun 1998 – 2005 (lampiran 23 di halaman 241).

Adanya kegiatan Pariwisata di Provinsi Bali menyebabkan terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berperan penting dalam menghasilkan *output*. Pendekatan terkini dalam teori pertumbuhan ekonomi menunjukkan, bahwa tenaga kerja yang berkualitas merupakan faktor penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi suatu

Negara. Tenaga kerja yang berkualitas, akan dapat menghasilkan nilai tambah *output* yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nilai tambah ini dapat tercipta karena tenaga kerja yang ada dapat melakukan berbagai inovasi dalam proses produksinya yang akhirnya dapat menghasilkan *output* dengan kualitas yang lebih baik.

Peningkatan laju pertumbuhan sektor tersier di Bali dari tahun 1998-2005 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian Daerah Bali. Bila dilihat dari segi nilai tambah, maka rata-rata kontribusi dan pertumbuhan sektor tersier dan sekunder dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan sektor primer terus mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada Tabel 5.8 di halaman 134. Jika ditinjau dari segi kesempatan kerja jangka panjangnya, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.9 di halaman 135, ternyata *trend* yang terjadi adalah semakin menurunnya persentase pekerja yang bekerja di sektor Primer. Di lain pihak ternyata persentase pekerja yang bekerja di sektor Sekunder dan Tersier mengalami peningkatan yang terus menerus. Penurunan kontribusi sektor Primer menurut Ghatak (1983 : 31) disebabkan oleh tiga efek, yaitu : 1) elastisitas permintaan akan komoditas pertanian atas pendapatan yang rendah dan malahan negatif yang disebut efek *Engel*, 2) untuk meningkatkan produksi pertanian menyebabkan meningkatnya sektor non pertanian yang disebut efek teknologi, dan 3) adanya perbedaan yang sangat tajam harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, karena proses pasca panen yang disebut efek urbanisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Tambunan (2001 : 75), bahwa perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan karena adanya perubahan dari sisi permintaan dan juga dari sisi penawaran. Dari segi permintaan, meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB

menyebabkan permintaan akan barang-barang dan jasa meningkat. Di samping memperbesar permintaan barang-barang yang ada juga memperbesar pasar bagi barang-barang baru non makanan. Perubahan ini akan menggairahkan pertumbuhan industri-industri baru disatu pihak dan dilain pihak meningkatkan laju pertumbuhan *output* sektor-sektor ekonomi.

Dari sisi penawaran, faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan struktur ekonomi diantaranya adalah peningkatan fasilitas dan prasarana pariwisata merupakan usaha pergeseran keunggulan komparatif, perubahan/kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan atau kualitas sumber daya manusia (SDM), dan akumulasi modal, terbukti semakin meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata yang dibangun seperti peningkatan jumlah hotel, kamar hotel dan juga jumlah restoran. Hal ini menunjukkan, walaupun transformasi tenaga kerja di Bali lebih lambat dibandingkan dengan pergeseran struktur ekonomi menurut nilai tambah dari sektor pertanian ke non pertanian, namun tidak menimbulkan masalah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Todaro (2000a :443) maupun Sulistyarningsih (1997:55), bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke non pertanian lebih cepat dari transformasi tenaga kerja, sehingga pergeseran struktur ekonomi tersebut akan cenderung menimbulkan masalah, seperti produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menjadi semakin rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Tambunan (2003:73), bahwa pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yang mengandalkan industrialisasi/jasa,

perkembangan dan laju pertumbuhan *output* di sektor jasa akan lebih pesat dibandingkan sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor sekunder dan tersier menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Penciptaan lapangan kerja akan tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya permintaan dari perusahaan/industri. Begitu pula dengan pendapat Arsyad (1999;122) tentang strategi pembangunan ekonomi daerah, bahwa pembangunan ekonomi daerah akan lancar dan meningkat apabila dilakukan berbagai upaya. Upaya yang dimaksud seperti pembangunan lingkungan fisik yang memadai pada berbagai sektor kegiatan ekonomi. Dengan adanya pembangunan fisik seperti pembangunan jalan raya, saluran telekomunikasi, saluran irigasi dan saluran listrik, maka akan dapat menarik investor untuk mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan ekonomi sektoral. Pada akhirnya kondisi ini dapat memperluas kesempatan kerja yang ada. Hasil penelitian ini memiliki argumentasi tentang alasan industrialisasi di suatu daerah. Argumentasi yang dimaksud adalah argumentasi keunggulan komparatif, argumentasi keterkaitan industrial, argumentasi penciptaan kesempatan kerja dan argumentasi loncatan teknologi (Esmara, 1982: 84).

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adika (2003) tentang dampak berkembangnya suatu wilayah terhadap kesempatan kerja yang tersedia dan mobilitas penduduk. Hasil penelitian oleh Adika tersebut menunjukkan, bahwa semakin berkembangnya suatu wilayah, menyebabkan penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan dan semakin tinggi mobilitas penduduk.

Perubahan struktur ekonomi daerah kabupaten/kota disebabkan karena dioperasionalkan perbedaan tingkat pembangunan daerah yang terjadi karena

perbedaan dalam faktor kepemilikan awal (*intial endowment factor*) dan kemampuan untuk membangun. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya alam yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997;128).

Temuan ini juga menguatkan teori Lewis dan Ranis-Fei, dalam Sukirno (1994 : 65) dan Hakim (2002 : 95), tentang teori dua sektornya yang mengatakan, bahwa secara historis proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di berbagai belahan dunia bertumpu pada pengalihan aktivitas ekonomi secara berkesinambungan, baik itu terjadi antar negara maupun dalam satu wilayah tertentu. Kesempatan kerja terbuka pada saat industri mulai berkembang. Jika sektor pertanian mengalami kemunduran, surplus tenaga kerja yang tidak produktif yang terjadi di sektor pertanian berpindah ke sektor industri dimana mereka menjadi tenaga kerja yang produktif.

Sebagai pembanding dalam kajian empirik hasil temuan ini tidak sesuai dengan penelitian Santoso (2000 : 147) di Jawa Timur, bahwa pembangunan yang berlangsung dengan pendekatan pergeseran struktur ekonomi ternyata tidak diikuti pergeseran tenaga kerja sektoral, menyebabkan menumpuknya tenaga kerja di sektor primer, sehingga tingkat pengangguran tinggi dan tingkat efisiensi tenaga kerja sektor ini semakin rendah.

Meskipun tidak secara khusus kepada penyerapan tenaga kerja, penelitian ini menguatkan konsep Todaro (2000b:20), bahwa hal-hal dalam pembangunan harus

ada kenaikan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan, penambahan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Temuan dalam studi ini juga menguatkan temuan Cahyono (2004 : 94) yang menemukan, bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya dalam penyerapan tenaga kerja telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Namun demikian sektor primer masih merupakan sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja.

Temuan ini juga sejalan dengan kajian BPS Provinsi Bali (2000), bahwa pembangunan di Provinsi Bali ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi dimana tingkat pendapatan per kapita rendah, sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi pada tahap akhir tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, sektor sekunder menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah dipicu dari proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, tenaga kerja dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Menurut Myrdal dalam Arsyad (1999:133) dan Abipraja (2002:59), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Di samping itu, di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, sebaliknya

pada daerah-daerah yang kurang berkembang permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat rendah.

Perubahan struktur ekonomi lebih ditentukan oleh indikator kontribusi sektor Primer dan pertumbuhan sektor Primer. Kontribusi dan pertumbuhan sektor menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga menjadi suatu proses produksi yang menciptakan nilai tambah. Oleh sebab itu besaran yang dihasilkan setiap daerah sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Perbedaan perekonomian daerah di Provinsi Bali ditunjukkan oleh peranan sektor tersier (industri pariwisata) yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB masing-masing kabupaten/kota, disamping sumber lainnya, sehingga kontribusi PDRB masing-masing daerah akan berbeda satu dengan lainnya.

Bertitik tolak dari kenyataan itu, disparitas struktur ekonomi suatu yang logis. Perbedaan pembangunan antar daerah secara alami memang berbeda namun demikian disparitas pembangunan tidak boleh dibiarkan terlalu besar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adam Smith dalam Hakim (2002:64), Lewis dalam Jhingan (1999:96), bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan perekonomian adalah sumberdaya alam sebagai bahan baku utama dalam kegiatan produksi. Dalam beberapa literatur, sumberdaya alam sering diidentikkan dengan tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam, seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan dan mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya.

Selain tanah, faktor produksi lainnya juga memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap kebijakan makro, maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam suatu perekonomian. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan, apabila dikaitkan dengan tingkat ekonomi suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya. Pertumbuhan suatu perekonomian yang baik, yaitu perekonomian yang mampu memberikan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

Implikasi kebijakan yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan hasil temuan studi ini, adalah dalam mengambil kebijakan pembangunan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan aspek spasial dengan mensinergikan antara percepatan pertumbuhan dengan pemerataan pendapatan antar daerah, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi. Selain aspek spasial, kebijakan pembangunan sektoral perekonomian daerah hendaknya diprioritaskan kepada penciptaan kesempatan kerja dengan penyerapan yang lebih banyak, dan disesuaikan dengan paradigma baru pembangunan daerah, yakni menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah.

Faktor penduduk menjadi penting, karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai orang atau penduduk dengan keseluruhan pengetahuan, kecakapan, perilaku dan kemampuan nyata atau potensial yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting dalam



pembangunan suatu bangsa dan mutunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi dan lingkungan hidup serta kemampuan ekonomi keluarga (Heny, 2004).

Dari sisi analisis jender, gambaran penduduk akan memperlihatkan besaran potensi yang dimiliki kaum perempuan dalam kedudukannya dibandingkan kaum laki-laki. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan proporsi penduduk yang terserap dalam pasar kerja. Tabel 6.1 menunjukkan, bahwa penduduk perempuan yang terserap dalam pasar kerja selalu cenderung lebih rendah dari penduduk laki-laki. Dari tahun 1999 penduduk perempuan yang terserap dalam pasar kerja cenderung menurun sampai tahun 2003 dan meningkat sampai tahun 2005. Walaupun demikian, secara umum penduduk perempuan yang terserap dalam pasar kerja pada periode tahun 1999-2005 sudah mencapai di atas 30,00 %, bahkan pada tahun 1999, 2000, 2004 dan 2005 penduduk perempuan yang sudah terserap di pasar kerja telah lebih dari 40,00%. Lebih rendahnya penduduk perempuan yang terserap di pasar kerja dibandingkan penduduk laki-laki, karena dipengaruhi oleh

**Tabel 6.1**  
**PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN**  
**DI PROVINSI BALI, TAHUN 1999-2005 (dalam %)**

Tahun	Tenaga Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1999	55,55	44,45	100
2000	45,34	54,66	100
2001	60,02	39,98	100
2002	60,07	39,93	100
2003	60,79	39,21	100
2004	56,20	43,80	100
2005	55,02	44,98	100

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2006.

anggapan, bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan BAPPENAS dan UNDP, peranan tenaga kerja perempuan di Provinsi Bali cenderung semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh semakin besarnya Indeks Pembangunan Jender (IPJ) dari 60,4 pada tahun 1999 menjadi 61,2 pada tahun 2002. Walaupun demikian, pemberdayaan tenaga kerja perempuan di Provinsi Bali cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan oleh semakin kecilnya Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dari 50,5 pada tahun 1999 menjadi 42,3 pada tahun 2002.

Pola pengambilan keputusan yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, baik yang berupa norma-norma dalam masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perorangan. Pudjiwati Sajogyo (1984) dalam Wiasti (2005) mengungkapkan, ada 5 tingkatan atau pola pengambilan keputusan untuk setiap jenis keputusan dalam rumah tangga, yaitu (1) keputusan dibuat oleh istri sendiri tanpa melibatkan suami, (2) keputusan dibuat bersama oleh suami-istri, tetapi pengaruh istri yang dominan, (3) keputusan dibuat bersama oleh suami-istri dan tidak ada pengaruh yang dominan (setara), (4) keputusan dibuat bersama oleh suami-istri, tetapi dengan pengaruh suami yang dominan dan (5) keputusan yang dibuat oleh suami sendiri.

Di Bali dengan pengaruh sistem *patrilinial* dan ajaran agama *Hindu* menimbulkan adanya perbedaan kekuasaan suami istri dalam pengambilan keputusan. Pola pengambilan keputusan ini dalam berbagai aktivitas rumah tangga

dikelompokkan menjadi 6 bidang, yaitu : (1) bidang konsumsi, (2) bidang produksi, (3) bidang keagamaan, (4) bidang pendidikan anak, (5) pembelian barang-barang berharga dan (6) bidang kemasyarakatan/kegiatan sosial (Wiasti,2005).

Kegiatan yang termasuk dalam bidang produksi atau pekerjaan nafkah adalah semua jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, seperti bertani, berdagang, pegawai dan sebagainya. Di Bali kekuasaan istri di dalam memutuskan untuk bekerja nafkah cukup tinggi, bahkan dapat dikatakan setara dengan suami, karena di Bali tidak dikenal dengan adanya perbedaan atau pembagian tugas dalam bekerja nafkah. Perempuan wajib melakukan pekerjaan apapun yang bersifat halal, tidak peduli pekerjaan itu kasar atau halus, berat atau ringan. Anggapan tersebut di samping dipengaruhi oleh sistem *patrilinial*, juga karena agama *Hindu* yang mengajarkan, bahwa kerja adalah *dharma* atau kebajikan, sehingga manusia (laki-laki maupun perempuan) lebih baik bekerja apapun, yang penting halal daripada tidak melakukan apa-apa (Wiasti, 2005). Hal ini dapat dibuktikan, bahwa secara historis keterlibatan perempuan Bali sudah dimulai semenjak manusia menguasai alam atau mengenal sistem bercocok tanam, yaitu dengan bertani di sawah maupun di ladang. Pekerjaan ini dilakukan oleh suami-istri, karena di Bali pekerjaan nafkah apapun yang dilakukan oleh suami pasti selalu bersama-sama dengan istrinya. Di samping itu, istri selain ibu rumah tangga, perempuan Bali sejak dulu sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu dengan membuat minyak kelapa, menenun, menganyam tikar pandan dan sebagainya dan sampai saat ini pun keterlibatan perempuan Bali dalam industri rumah tangga semakin banyak.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan itu meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh arus globalisasi yang membawa perubahan yang sangat besar dan menyeluruh.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perempuan sebagai asset bangsa tidak lagi hanya melakukan aktivitas di dalam rumah tangga atau melakukan pekerjaan domestik seperti mengurus anak, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Pekerjaan perempuan dalam sektor domestik tersebut secara ekonomis dipandang tidak menghasilkan uang. Akan tetapi, dengan adanya pengaruh arus global yang melanda Bali khususnya, perempuan tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau sektor domestik, melainkan sudah merambah pekerjaan ke sektor publik.

Dengan masuknya perempuan ke dunia kerja publik menghapus pandangan, bahwa perempuan hanya cocok untuk melakukan pekerjaan pada sektor domestik. Masuknya perempuan ke dunia kerja publik menunjukkan, bahwa perempuan juga mampu setara dengan laki-laki. Setara di sini tidak berarti sama, tetapi apa yang dilakukan oleh laki-laki dapat juga dilakukan oleh perempuan, seperti direktur perusahaan, ikut sertanya perempuan dalam organisasi politik, adanya perempuan yang menjadi anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat pusat.

## **6.2 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Perubahan struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 di halaman 230 seperti tertera pada Tabel 5.18 di halaman 147 menunjukkan, bahwa variabel perubahan struktur ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,504 dan tingkat probabilitasnya sebesar 0,000. Hal ini berarti, semakin berubah struktur ekonomi dari tradisional (pertanian) ke modern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor Primer akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup masyarakat. Hasil ini mendukung hipotesis kedua, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan mengkaji kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor primer di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 1998-2005. Perubahan struktur ekonomi di Provinsi Bali bergeser dari sektor Primer ke sektor Tersier dan Sekunder. Rata-rata kontribusi sektor Primer di Provinsi Bali dari tahun 1998-2005 sebesar 24,93% dan rata-rata pertumbuhan sektor primer sebesar 3,91 %.

Kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan dalam pembangunan manusia melalui kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketerampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Rata-rata pendapatan per kapita di Provinsi Bali dari tahun 1998-2005, sebesar Rp 3.291.756,- sedangkan tingkat pendidikan dan Angka Harapan Hidup Masyarakat di Provinsi Bali, masing-masing rata-rata sebesar 6,77 tahun dan 69,89 tahun.

Dalam studi ini juga diperoleh koefisien jalur pengaruh tidak langsung antara perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Artinya, bila struktur ekonomi menuju ke struktur non Primer, maka struktur penyerapan tenaga kerja daerah akan menuju ke struktur non Primer dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Proses tersebut terjadi disebabkan oleh peningkatan pembangunan ekonomi di setiap daerah, selanjutnya perubahan tersebut akan menciptakan sejumlah kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja terjadi, kemudian produktivitas meningkat diiringi dengan peningkatan pendapatan. Semakin tinggi balas jasa yang diperoleh tenaga kerja dalam proses produksi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan dalam studi ini telah menjawab permasalahan ketiga, yaitu apakah perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Signifikansi pengaruh perubahan struktur ekonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut mengindikasikan, bahwa kemampuan masing-masing daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan pembangunannya yang dicerminkan oleh menurunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor primer akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, bila pembangunan di daerah ditingkatkan dan struktur ekonomi menuju ke struktur non primer, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Hasil studi ini mendukung temuan Brata (2002), bahwa pembangunan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan yang diindikasikan oleh pembangunan manusia. Selain itu hasil studi ini juga menguatkan temuan Mubyarto (1993:64), yang meneliti perbedaan pembangunan ekonomi Kalimantan Timur dengan Riau, dan ditemukan, bahwa kemakmuran yang didasarkan pada tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah rendah, sehingga kesejahteraannya lebih baik bila dibandingkan dengan Riau.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harmini (1997), yang menyimpulkan bahwa semakin bersifat industrial struktur ekonomi suatu daerah maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Hal ini dimungkinkan, karena terbuka peluang yang lebih luas untuk bekerja di sektor non Primer yang memberikan tingkat upah yang lebih tinggi.

Hasil studi ini tidak sejalan dengan pendapat Todaro (2000a:433), bahwa pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di negara-negara sedang berkembang tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan, karena turunnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang seimbang atau lebih cepat.

Perbedaan tingkat pembangunan daerah telah mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan berbeda pula. Temuan ini menguatkan penelitian Meier (1976:7), bahwa pembangunan ekonomi suatu proses di mana pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam kurun waktu tertentu dengan didasarkan pada kondisi jumlah kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak

memburuk. Berdasarkan temuan tersebut juga mengindikasikan, bahwa hipotesis dampak merembes ke bawah (*trickle down effect*) telah terjadi di Provinsi Bali, artinya peningkatan pembangunan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil analisis faktor terhadap variabel kesejahteraan masyarakat pada Tabel 5.16 di halaman 143 menunjukkan, bahwa variabel kesejahteraan masyarakat secara signifikan ditentukan oleh indikator terbesar, yaitu tingkat pendidikan dengan *loading* faktor 0,937 diikuti oleh pendapatan per kapita dan Angka Harapan Hidup dengan *loading* faktor masing-masing 0,825 dan 0,813. Berdasarkan hasil analisis tersebut tingkat pendidikan menempati posisi terdepan sebagai penentu utama dari variabel kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pendidikan merupakan indikator dampak di bidang pendidikan. Dikatakan indikator dampak, karena angkanya mencerminkan dari suatu investasi atau program pada tingkat masyarakat. Investasi yang dilakukan dapat berupa penyediaan sarana sekolah atau tenaga pengajar, selain juga program peningkatan partisipasi pendidikan usia sekolah. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berdasarkan pada hasil analisis tersebut, maka jika tingkat pendidikan ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

Pendapatan per kapita merupakan dimensi pengukur urutan kedua dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan ini mempunyai makna, bahwa pendapatan per kapita bukan penentu utama keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Telah lama disadari, bahwa pengukuran pendapatan per kapita mempunyai kelemahan tersendiri, karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya,



mengingat sebagian besar penduduk menerima pendapatan riil jauh di bawah pendapatan per kapita.

Berdasarkan dimensi harapan hidup yang merupakan urutan ketiga/terkecil sebagai penentu kesejahteraan masyarakat juga merupakan indikator dampak dari perbaikan tingkat kesehatan di kabupaten/kota. Artinya, semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi tingkat kesehatan di daerah tersebut. Dengan munculnya dua indikator sosial sebagai penentu terbesar variabel kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali menunjukkan, bahwa perhatian pemerintah terhadap indikator kesejahteraan non ekonomi juga mendapat porsi seimbang. Temuan ini mendukung temuan Sukirno (1976:20), bahwa perhitungan tingkat kesejahteraan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan per kapita semata, tetapi juga didasarkan pada data yang tidak bersifat moneter.

Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama. Bila dilihat dari PDRB per kapita menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun ukuran ini mempunyai bias tersendiri, karena disinyalir terjadi pelarian modal (*capital flight*) keluar Bali. Hal ini diindikasikan dari perusahaan-perusahaan besar yang beraktivitas di Provinsi ini adalah perusahaan Multi Nasional, oleh karenanya pelarian modal akan mudah terjadi.

Implikasinya adalah dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hendaknya diprioritaskan pada peningkatan pendidikan penduduk. Dengan maningkatnya pendidikan akan dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas dan potensi yang dimiliki untuk pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah hendaknya dapat dimanfaatkan

guna pengembangan lebih lanjut. Di bidang ekonomi, penetapan upah minimum kabupaten/kota hendaknya mencerminkan pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya, di samping juga mempertahankan kemampuan pengusaha untuk tetap dapat memproduksi.

### **6.3 Pengaruh Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.**

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 di halaman 230 seperti tertera pada Tabel 5.18 di halaman 147 menunjukkan, bahwa variabel struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur yang diperoleh sebesar  $-0,390$  dan tingkat probabilitasnya sebesar  $0,000$ . Hal ini berarti, semakin berubah struktur penyerapan tenaga kerja dari tradisional (pertanian) ke modern dengan indikator menurunnya kontribusi dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator semakin meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup masyarakat. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga, bahwa struktur penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan, bahwa menurunnya kontribusi dan pertumbuhan penyerapan dan tenaga kerja sektor primer di Provinsi Bali telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya sektor primer dan sekunder peningkatannya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor tersier. Akibatnya tenaga kerja sektor primer pindah ke

sektor tersier dengan harapan upah yang mereka terima lebih besar dibandingkan dengan upah di sektor primer. Kondisi ini membawa konsekuensi pada kesejahteraan hidup mereka yang lebih baik. Pada akhirnya *multiplier* yang ditimbulkan dari kegiatan tenaga kerja dalam perekonomian menjadi besar. Akibatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dapat dicapai secara maksimal.

Pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum (KHM), kemampuan perusahaan, upah minimum periode lalu dan tingkat inflasi. Berdasarkan acuan penetapan upah minimum tersebut, maka daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menentukan upah minimum kabupaten/kota seperti terlihat pada Tabel 6.2. Tabel 6.2 menunjukkan, bahwa upah minimum tahun 2005 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Upah minimum tertinggi di Bali pada tahun 2005 terdapat di Kabupaten Badung, diikuti oleh Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten lainnya sebesar Rp 447.500,- Kondisi tersebut sesuai dengan aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Badung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah lainnya mengingat kabupaten ini merupakan pusat pariwisata di Bali. Dengan demikian, bergesernya penyerapan tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier, mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali secara signifikan.

Dalam era kemajuan teknologi dewasa ini, peran sumber daya berkualitas Sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Pack, 1994).

**Tabel 6.2**  
**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA**  
**DI PROVINSI BALI TAHUN 2002-2005 (dalam Rp/Bln)**

No.	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
1	Jembrana	309.750	341.000	432.650	455.300
2	Tabanan	309.750	341.000	425.000	447.500
3	Badung	345.000	385.000	469.000	506.500
4	Gianyar	320.000	345.000	446.265	475.000
5	Klungkung	309.750	341.000	425.000	447.500
6	Bangli	309.750	341.000	425.000	450.000
7	Karangasem	309.750	341.000	425.000	447.500
8	Buleleng	309.750	341.000	425.000	447.500
9	Denpasar	345.000	385.000	465.000	500.000
	Prov. Bali	309.750	341.000	425.000	447.500

**Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, 2006**

Hal ini juga diperjelas dengan skema yang diuraikan oleh Thomas (2000;XXVII) di halaman 70 tentang alur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai melalui peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui interaksi dari faktor-faktor produksi. Terkait dengan faktor produksi tenaga kerja, maka tenaga kerja yang berkualitas merupakan faktor penting guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2003:73), bahwa tingkat pembangunan/industrialisasi yang lebih tinggi menyebabkan laju pertumbuhan *output* di sektor jasa akan lebih pesat dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya yang selanjutnya mendorong pendapatan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat diindikasikan, bahwa selama kurun waktu penelitian (1998-2005) di Provinsi Bali, jika terjadi perubahan struktur penyerapan tenaga kerja menuju ke struktur yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non Primer, maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, demikian pula sebaliknya jika struktur penyerapan tenaga kerja menuju ke struktur Primer, maka kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

Berdasarkan hasil temuan studi tersebut, pembangunan ekonomi harus dapat menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Kemampuan setiap daerah dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja akan memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di setiap daerah. Angkatan kerja yang bekerja akan mendapatkan upah, di mana upah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Temuan ini mendukung temuan Todaro (2000a : 280), bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan hal tersebut hasil studi ini juga menguatkan temuan Sumodiningrat (2001 : 13) yang mengatakan, bahwa kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Sarwoprasodjo (1995) yang menunjukkan, bahwa provinsi dengan persentase penyerapan tenaga kerja sektor pertanian rendah cenderung mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan persentase serapan tenaga kerja sektor pertanian tinggi. Hal ini berarti, bahwa semakin kecil persentase penduduk yang

bekerja di sektor pertanian, semakin meningkat kesejahteraan penduduk di provinsi tersebut.

Hasil studi ini sejalan dengan hasil penelitian BPS Provinsi Bali yang bekerja sama dengan BAPPEDA Provinsi Bali (1999) menyimpulkan, bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat yang selanjutnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Di samping itu, perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kegiatan masyarakat dari sektor tradisional ke sektor modern, cenderung meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang selanjutnya dapat berpengaruh pada kesehatan mereka.

Hasil studi ini menolak pendapat Todaro (2000a:433), bahwa pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di negara-negara yang sedang berkembang akan menimbulkan masalah, karena turunnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang seimbang atau lebih cepat.

Mengingat adanya disparitas pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Bali, maka penentuan upah akan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah agar pengupayaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dapat terpenuhi. Kontribusi dari dimensi upah minimum kabupaten/kota sebagai penentu tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mempunyai makna, bahwa bila upah minimum kabupaten/kota ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat meningkat pula.

Proses peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang dikaitkan dengan upah minimum kabupaten/kota adalah, bahwa pada prinsipnya sistem pengupahan

haruslah mencakup fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial mempunyai makna bahwa upah yang diberikan mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, sedangkan fungsi ekonomi adalah mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari upah yang diterima oleh pekerja, maka kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan menjadi lebih tinggi.

Permintaan terhadap faktor produksi tenaga kerja yang semakin meningkat di setiap daerah, sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, sehingga dapat menampung banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur akan terserap di seluruh sektor ekonomi.

Kontribusi penyerapan tenaga kerja di daerah yang tinggi menggambarkan, bahwa angkatan kerja di tiap kabupaten/kota yang dilibatkan dalam kegiatan produksi pada setiap sektor. Keterlibatan angkatan kerja akan menambah kemampuan produksi dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Demikian pula sebaliknya, bila kontribusi penyerapan tenaga kerja daerah rendah mengindikasikan, bahwa keterlibatan angkatan kerja kurang dalam aktivitas ekonomi, sehingga tingkat pengangguran tinggi. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja daerah diindikasikan pula sebagai salah satu penentu dari struktur penyerapan tenaga kerja, artinya bila pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor non primer meningkat, maka struktur penyerapan tenaga kerja akan berubah menuju ke struktur non Primer dan selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan upah/pendapatan.

Secara teoritis permintaan pengusaha atas tenaga kerja, karena seseorang tersebut membantu untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan demikian, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Sejalan dengan hal tersebut, Bellante dan Jackson (1983 : 25) menjelaskan, bahwa sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan secara khusus. Selain itu berdasarkan fungsi permintaan perusahaan akan tenaga kerja dengan asumsi, bahwa setiap produsen selalu berusaha memaksimalkan profit, maka dasar pertimbangan yang dipergunakan seorang pengusaha untuk menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja adalah bila *marginal revenue* lebih besar dari *marginal cost*. Hal ini akan terus berlangsung selama *marginal revenue* lebih besar dari upah yang diberikan kepada tenaga kerja (*marginal cost*). Artinya permintaan akan tenaga kerja terjadi bila permintaan akan barang dan jasa meningkat atau *marginal revenue* pengusaha lebih besar dari *marginal cost*.

Dalam kerangka makro ekonomi, laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Nilai pertumbuhan tenaga kerja sektor Primer relatif kecil, bahkan negatif. Hal ini mempunyai makna, bahwa laju pertumbuhan sektor primer belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih



luas, sehingga penyerapan tenaga kerja juga kecil. Kondisi ini memberikan indikasi, bahwa perluasan usaha lebih mengarah pada padat modal (*capital intensive*), bukan padat karya (*labor intensive*).

Implikasi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang perlu dilaksanakan, hendaknya lebih diprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan adanya perluasan kesempatan kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja, di samping itu penentuan upah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, agar kebutuhan dasar penduduk dapat terpenuhi

#### **6.4 Pengaruh Perubahan Peruntukan Lahan Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja.**

Lahan atau tanah merupakan komoditi yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan. Peruntukan lahan yang sesuai dengan konsep tata ruang wilayah akan berdampak pada kelangsungan pembangunan itu sendiri. Sebaliknya peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan konsep tata ruang wilayah akan berdampak pada ketidakseimbangan alam dan lingkungan. Secara ekonomis, persediaan lahan bersifat tetap, sedangkan permintaannya terus tumbuh dengan cepat terutama di sekitar wilayah perkotaan. Pertumbuhan kebutuhan lahan tersebut didorong oleh penambahan penduduk, pendapatan dan tingkat migrasi penduduk yang berasal dari wilayah lain maupun wilayah *hinterland* kota-kota sekitarnya. Interaksi antara permintaan dan penawaran lahan akan menghasilkan pola tata guna lahan yang mengarah pada aktivitas paling menguntungkan yang menyebabkan harga lahan makin meningkat (Anwar, 1993).

Selama setahun (2004-2005) terdapat beberapa perubahan peruntukan lahan di Bali, seperti disajikan pada Tabel 6.3. Lahan pertanian (primer) secara keseluruhan mengalami pengurangan seluas 4.571,54 ha. atau 1,36 %. Lahan sawah berkurang seluas 4.772,92 ha. atau sebesar 5,35% dan lahan perkebunan berkurang seluas 24.941,33 ha , sedangkan lahan kebun campuran dan tegalan mengalami peningkatan, masing-masing seluas 10.685,13 ha dan 14.457,58 ha. Sedangkan peruntukan lahan yang mengalami peningkatan dari tahun 2004-2005 adalah pemukiman seluas 8.003,97 ha (23,89%), bahkan alih fungsi lahan untuk industri meningkat tajam seluas 234,63 ha. (10.113,36%). Kondisi ini akan menyebabkan kontribusi penyerapan tenaga kerja akan bergeser dari sektor pertanian (primer) mengarah ke sektor tersier dan sekunder. Rata-rata kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer dari tahun 2004-2005 turun dari 34,41% menjadi 34,25% dan

**Tabel 6.3**  
**PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN DI BALI**  
**TAHUN 2004-2005**

No.	Penggunaan Lahan	2004	2005	Perubahan	
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(%)
1.	Lahan Pertanian	336.172,73	331.601,19	-4.571,54	-1,36
	a. Persawahan	89.165,92	84.393,00	-4.772,92	-5,35
	b. Perkebunan	131.948,53	107.007,20	-24.941,33	-18,90
	c. Kebun Campuran	35.314,72	45.999,85	10.685,13	30,26
	d. Tanah Kering/Tegalan	79.743,56	94.201,14	14.457,58	18,13
2.	Permukiman	33.503,40	41.507,37	8.003,97	23,89
3.	Industri	2,32	236,95	234,63	10.113,36
4.	Hutan	125.149,00	116.204,37	-8.944,63	-7,15
5.	Semak Belukar/Alang-Alang Padang Rumput	7.936,86	37.250,57	29.313,71	369,34
6.	Tanah Kosong,Rusak/Tandus	43.070,00	28.522,04	-14.547,96	-33,78
7.	Perairan Darat, Lain-Lain	17.831,69	8.343,51	-9.488,18	-53,21
	Jumlah	563.666,00	563.666,00	0,00	0,00

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, 2006.

bahkan rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor Primer negatif dan menurun dari -0,50% menjadi -2,36%, seperti tampak pada Tabel 5.9 di halaman 135.

Hasil studi ini menguatkan teori dua sektor Lewis dan Ranis-Fei (Sukirno, 1994:65) dan Hakim (2002:95), bahwa pada saat sektor pertanian (primer) mengalami kemunduran akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi *subsistence* akibat perekonomian yang sifatnya juga *subsistence*. Kelebihan suplai tenaga kerja ini ditandai dengan produk marginalnya nilainya nol dan tingkat upah riil rendah. Dengan adanya perbedaan upah di pertanian/di pedesaan dengan industri/perkotaan, kemudian dipicu oleh alih fungsi lahan secara besar-besaran dari pertanian ke non pertanian, khususnya industri dalam arti luas, maka tenaga kerja sektor Primer yang tidak produktif akan beralih ke sektor industri (sekunder) menjadi tenaga kerja yang lebih produktif, maka terjadilah suatu proses migrasi dan urbanisasi. Dalam jangka panjang, dengan terjadinya alih fungsi lahan secara terus menerus, akan mendorong bergesernya struktur penyerapan tenaga kerja dari sektor Primer ke sektor Tersier dan Sekunder.

#### **6.5 Jenis Teknologi yang Dipakai Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi**

Dalam perekonomian modern, setiap produsen selalu berusaha mengembangkan teknologi. Untuk memastikan agar usahanya selalu dapat bersaing dengan perusahaan lain, maka setiap produsen selalu berusaha mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi produksi dan ini akan meningkatkan produktivitas kegiatan produksi secara agregat.

Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang mendua terhadap permintaan faktor produksi. Dalam arti, kemajuan teknologi dapat menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Jika kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas, maka permintaan terhadap faktor produksi meningkat. Kemajuan teknologi yang bersifat padat modal akan meningkatkan produktivitas barang modal sehingga permintaan barang modal meningkat. Sebaliknya kemajuan tersebut menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja, bila hubungan keduanya substitutif.

Sektor modern tidak sedikit yang mengimpor teknologi dari luar negeri. Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*), dimana secara relatif modal lebih banyak digunakan. Artinya, rasio *output* per tenaga kerja merupakan fungsi dari rasio modal per tenaga kerja. Sedangkan di negara yang sedang berkembang yang lebih bertumpu di sektor tradisional terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh rasio modal-tenaga kerja relatif rendah akibat bertambahnya penduduk dan angkatan kerja dan sulitnya mendapatkan tabungan yang cukup untuk memperoleh sejumlah investasi akibat rendahnya pendapatan per kapita yang membuat kecenderungan marginal menabung rendah (Jhingan, 1999:421).

Hicks dalam Lindauer (1971:152), mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal cenderung menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal (*capital using* atau *capital intensive*). Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja cenderung menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya (*labor using* atau *labor*

*intensive*). Jika tidak mengubah porsi (rasio faktor produksi tetap), disebut teknologi netral (*neutral technology*).

Periode tahun 1985 hingga tahun 2005 perbandingan modal-tenaga kerja (C/L) dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali cenderung meningkat (Lampiran 21 halaman 238). Pada tahun 1985 rasio modal-tenaga kerja (C/L) sebesar Rp 0,00018 milyar dan meningkat pada tahun 2005 menjadi Rp 0,00111 milyar. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali pada umumnya cenderung menggunakan teknologi kearah padat modal (*capital intensive*). Kondisi ini disebabkan, karena sangat dominannya peran sektor pariwisata dalam perekonomian Bali, sehingga investasi sangat terkonsentrasi di sektor pariwisata yang cenderung menggunakan teknologi padat modal (*capital intensive*). Hal ini terjadi mengingat perekonomian Bali dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector*. Perbandingan C/L di Provinsi Bali dari tahun 1985, 1990, 1995, 2000 dan 2005 seperti tampak pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4**  
**PERBANDINGAN C/L DI PROVINSI BALI**  
**TAHUN 1985, 1990, 1995, 2000 DAN 2005**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kapital (C) (Rp Milyar)</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja (L) (Orang)</b>	<b>C/L (Rp Milyar)</b>
1985	228,76	1.240.915	0.00018
1990	710,56	1.352.057	0.00053
1995	1.038,20	1.603.993	0.00065
2000	1.132,77	1.712.944	0.00066
2005	2.164,02	1.945.595	0.00111

Sumber : Lampiran 21.

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan struktur ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Hasil studi ini telah menjawab rumusan masalah pertama dan membuktikan hipotesis pertama yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pergeseran struktur ekonomi menurut nilai tambah dari sektor primer ke sektor tersier dan sekunder akan menyebabkan pergeseran penyerapan tenaga kerja manganut pola yang sama. Semakin cepat perubahan struktur ekonomi daerah menuju ke struktur non primer, akan menyebabkan pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja sektoral semakin cepat menuju ke struktur non primer. Temuan studi ini sejalan dengan teori dua sektor Lewis dan Ranis-Fei dalam Sukirno (1994:65) dan Hakim (2002:95), bahwa secara historis proses pembangunan ekonomi diberbagai belahan dunia bertumpu pada pengalihan aktivitas ekonomi secara berkesinambungan, baik itu terjadi antar negara, antar wilayah, maupun antar sektor. Kesempatan kerja terbuka pada saat sektor tersier dan sektor sekunder mulai berkembang, sementara sektor primer mengalami kemunduran. Surplus tenaga kerja yang tidak produktif di sektor primer berpindah ke sektor tersier dan sekunder, dimana mereka menjadi tenaga kerja yang lebih produktif.

2. Perubahan struktur ekonomi tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil studi telah menjawab rumusan masalah kedua dan membuktikan hasil hipotesis kedua yang telah dikemukakan sebelumnya. Kenyataan ini membuktikan, bahwa cepat tidaknya perubahan struktur ekonomi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh negatif menunjukkan, bila perubahan struktur ekonomi menurut nilai tambah menuju ke struktur ekonomi non primer, maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Temuan ini sesuai dengan redefinisi pembangunan pada tahun 70-an, dimana dalam pembangunan ekonomi berupaya meniadakan atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Dalam kaitannya dengan hal ini Seers (1973:112) merujuk pada tiga sasaran pembangunan, yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.
3. Struktur penyerapan tenaga kerja daerah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini telah menjawab rumusan masalah ketiga dan membuktikan hipotesis ketiga yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa struktur penyerapan tenaga kerja yang menuju ke struktur non primer dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Temuan studi ini sejalan dengan pendapat Todaro (2000a:20), bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kesejahteraan tersebut ingin terus ditingkatkan, maka setiap daerah di Provinsi Bali harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan kaitannya dengan struktur penyerapan tenaga kerja daerah.

4. Perubahan peruntukan lahan berpengaruh positif terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Hasil studi ini telah menjawab rumusan masalah ke empat. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dalam peruntukan lahan dari sektor primer mengarah ke sektor tersier dan sekunder. Temuan studi ini menguatkan teori dua sektor Lewis dan Ranis-Fei (Sukirno, 1994:65) dan Hakim (2002:95), bahwa pada saat sektor non primer mulai berkembang (sektor sekunder) yang membawa konsekwensi logis terjadinya alih fungsi lahan, maka sektor primer akan mengalami kelebihan tenaga kerja yang tidak produktif yang selanjutnya berpindah ke sektor industri (sekunder), dimana mereka menjadi tenaga kerja yang lebih produktif.
5. Dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali, terjadi kecenderungan meningkatnya perbandingan modal/tenaga kerja (*capital/labor ratio*). Kondisi ini menunjukkan, bahwa teknologi yang dipakai dalam kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali, termasuk jenis teknologi padat modal (*capital intensive*). Kondisi ini disebabkan, karena sangat dominannya peran sektor pariwisata dalam perekonomian Bali, sehingga investasi sangat terkonsentrasi di sektor pariwisata yang cenderung menggunakan teknologi padat modal (*capital intensive*). Hal ini terjadi mengingat perekonomian Bali dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector*.
6. Kondisi di Provinsi Bali tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fisher dan Clark (Miernyk, 1971:555-557), tentang transformasi sektoral berdasarkan penyerapan tenaga kerja. Menurut teori Fisher dan Clark, seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses pembangunan akan diikuti dengan penurunan



jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor primer dan terjadinya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier. Sedangkan yang terjadi di Provinsi Bali, berdasarkan transisi/perubahan ekonomi pada kelompok sektoral telah terjadi lompatan yang sama dengan yang terjadi di Jawa Timur (Zadjuli, 1986). Hal ini ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja sektor primer terus menurun yang diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor tersier dan sekunder. Hasil studi ini tidak sejalan dengan pendapat Todaro (2000a 433), bahwa pergeseran struktur ekonomi dari sektor Primer ke sektor Sekunder dan Tersier di negara-negara yang sedang berkembang akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, karena turunnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah sektor Primer tidak diikuti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor Primer yang seimbang atau lebih cepat. Kondisi di Provinsi Bali terjadi sebaliknya, dimana dengan pesatnya pembangunan di daerah Bali yang diindikasikan oleh bergesernya struktur ekonominya menuju ke struktur non Primer, maka kesejahteraan masyarakat Bali semakin meningkat. Berdasarkan hasil studi dapat dijelaskan, bahwa walaupun menurunnya kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor Primer di Provinsi Bali lebih lambat dibandingkan menurunnya kontribusi sektor Primer, namun telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan, bahwa dari sudut pandang makro, sifat usaha dari sektor non Primer, khususnya sektor Tersier secara umum bersifat padat modal (*capital intensive*). Hal ini dapat dimengerti, karena di Provinsi Bali dalam kenyataannya sektor Primer dan Sekunder peningkatannya

sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor Tersier. Akibatnya, tenaga kerja sektor Primer pindah ke sektor Tersier dengan upah yang mereka terima lebih besar dibandingkan dengan upah di sektor Primer. Kondisi ini membawa konsekuensi pada kesejahteraan hidup mereka yang lebih baik. Pada akhirnya, *multiplier* yang ditimbulkan dari kegiatan tenaga kerja dalam perekonomian menjadi besar. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan temuan tersebut juga mengindikasikan, bahwa hipotesis dampak merembes ke bawah (*trickle down effect*) telah terjadi di Provinsi Bali. Artinya, peningkatan pembangunan di Provinsi Bali telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

7. Temuan studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan pemerintah, khususnya Pemda Bali untuk mengelola perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini sangat strategis, mengingat pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata didasarkan atas paradigma pembangunan yang *growth oriented* yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan membenahi secara proporsional kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota belum sepenuhnya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya lokal dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Belum

ada pemahaman dan penerapan konsep jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menunjukkan keadilan dan kesetaraan jender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Kondisi ini ditunjukkan oleh kebijakan perencanaan pembangunan daerah provinsi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam upaya mengurangi ketimpangan struktur ekonomi antar daerah.

8. Kesimpulan umum dari studi ini adalah secara simultan perubahan struktur ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja sektoral dan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh secara tidak langsung. Dengan analisis jalur dapat diketahui, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui struktur penyerapan tenaga kerja sektoral.

## 7.2 Saran

Berdasarkan hasil studi yang diperoleh, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan perbaikan, terutama untuk studi dalam kajian dan permasalahan yang sama, sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor, antar wilayah di Provinsi Bali hendaknya dikembangkan potensi ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam era globalisasi dengan melakukan perubahan fundamental dalam arah pengembangan ekonomi Bali. Strategi pembangunan sektoral tidak lagi menempatkan pariwisata sebagai *leading sector* dalam arah

permbangunan Bali ke depan, tetapi menempatkan pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor yang perlu dikembangkan secara lebih seimbang dan lebih terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

2. Secara umum kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Bali akan makin bersifat menangani peralatan produksi yang terus mengalami kemajuan di bidang teknologi tersebut. Untuk itu, sistem pendidikan ke arah itu perlu segera memperoleh penangan.
3. Diperlukan kebijakan yang mengarah kepada penyebaran industri kecil dan kerajinan, khususnya yang memproses hasil pertanian yang mendukung perkembangan sektor pertanian lebih lanjut secara lebih merata di semua kabupaten/kota, sehingga akan memungkinkan dipakainya teknologi yang dapat dikendalikan oleh masyarakat setempat sesuai dengan sumber daya dan potensi bahan baku yang tersedia di lingkungan sekelilingnya. Selain itu, migrasi dari desa ke kota (*rural-urban migration*) juga akan terhambat laju perkembangannya.
4. Peningkatan investasi modal dalam berbagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perlu mendapatkan perhatian. Khusus untuk daerah kabupaten/kota, implikasi kebijakan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor primer, karena berdasarkan data yang ada sektor ini masih dominan menyerap tenaga kerja. Dalam upaya mengembangkan sektor primer, maka harus terkait dengan pembangunan pedesaan, yang selama ini cukup ketinggalan dibandingkan dengan pembangunan perkotaan. Ini kemudian harus didukung oleh pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian, agar mampu menarik

kelebihan tenaga kerja di sektor primer, atau menciptakan *off-farm employment*. Insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah yang ramah pasar dan lingkungan. Dalam pengembangan industri ke depan, harus sudah direncanakan pola pengembangannya, yakni di kawasan tradisional tetap didukung pengembangan industri kecil dan kerajinan yang berbasis ekonomi kerakyatan, sedangkan di kawasan industri yang dicanangkan oleh Tata Ruang, dikembangkan industri menengah dan besar yang berteknologi madya ramah lingkungan, dan terlebih dahulu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung. Pengembangan pariwisata ke depan harus lebih menekankan pada peningkatan kualitas dibandingkan kuantitas, dan bersifat partisipatif melalui paradigma Pembangunan Pariwisata Kerakyatan Berkelanjutan (*Sustainable Community Tourism Development*). Di samping itu, penggunaan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa hendaknya dapat disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali.

5. Strategi eksogen diperlukan dalam kaitan menciptakan iklim yang kondusif agar investasi di bidang infrastruktur ekonomi, yaitu transportasi darat, laut dan udara, listrik, air minum dan telepon dapat ditingkatkan. Pengkajian interregional provinsi dalam negeri maupun luar negeri perlu dilakukan dalam upaya mencari keterkaitan kedepan dan atau kebelakang secara terpadu, baik untuk aspek produksi dan konsumsi secara lintas regional maupun lintas negara. Hendaknya pembangunan sosial juga perlu ditingkatkan seiring dengan pembangunan ekonomi. Hal tersebut meliputi pembangunan sarana pendidikan, ketersediaan

guru dan sarana kesehatan. Semuanya perlu ditingkatkan, baik pembangunan fisiknya maupun kualitas pelayanannya.

... (iii) merupakan suatu strategi yang tepat untuk mempermudah dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Dengan pengarusutamaan gender itu pemerintah dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan strategi itu juga, program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender. Selanjutnya hal ini pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan atas kesempatan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

7. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambahkan variabel dan menggunakan indikator lain, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono. 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Konsep, Model, Kebijakan, Instrumen serta Strategi*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Adika, I Nyoman, 2003, "Perkembangan Wilayah Pinggiran Kota Metropolitan Surabaya dan Mobilitas Tenaga Kerja : Kasus Kabupaten Sidoarjo", *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Yogyakarta : Program Pascasarjana UGM.
- Agung, I.N., 2003. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi : Kiat-kiat Untuk Mempersingkat Waktu Penulisan Karya Ilmiah yang Bermutu*. Jakarta : UI Pres.
- Akbar, Bahrulah dan Nurbaya, 2000. "Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaan Dalam Rangka Otonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 01, No. 01, hal. 5-14.
- Ardani, Amirudin, dan Iswara, IG Lanang, 1996. *Perencanaan Ekonomi I*. Jakarta : Kurnia, LPFE – UI.
- Arsyad, Lincoln, 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YPKN.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Albert, Michael and Robin Hahnel, 2005, *Traditional Welfare Theory*, [www.zmag.Org/books/1/html](http://www.zmag.Org/books/1/html), diakses tanggal 2 Februari 2005, hal. 1-8.
- Avrom Bendavid Val, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. , New York : Praeger publisher.
- Adi, Wijaya. 2000. *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa*. Jakarta : Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Anwar, Affendi, 1993. "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian di Sekitar Wilayah Perkotaan ," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, No.10/Desember, ITB, Bandung, hal. 27-35.
- Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 1994-2006. *Bali Dalam Angka 1993-2005*. Denpasar.

- \_\_\_\_\_, 1979. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1975-1978*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1979-1982*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1987. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1983-1986*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1988-1992*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1993-1997*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Tabel Input Output Pariwisata 2000*, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2002 dan 2005, *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2002 dan 2005*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 1998-2002*. Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2003 – 2005*. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. 1999-2006. *Statistik Indonesia 1998-2005*. Jakarta.
- Barbie, Earl, 1978, *Social Research Method*. New York : Prentice Hall Inc.
- Bellante, Don and Mark Jackson, 1983. *Labor Economics, Choice in Labor Markets*, Chicago : Mc Graw-Hill, Inc.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2002. "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol.7 No. 2, FE. UII, Yogyakarta, hal. 54-62.
- Baswi:, Revrisond, 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Boedono, 1988. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*. Yogyakarta : BPFE.



- Blakely, Edward J. 1989. *Planing Local Economic Development : Theory and Practice*. Sage Library of Social Research 168, Washington : Sage Publication.
- Beatly, Timothy, 1994, *Ethical Land Use, Principles of Policy and Planning*, Baltimor : John Hopkins University Press.
- Boediono dan Abbas Gozali, 1991. "Pendidikan dan Pergeseran Struktural Dalam Periode Tinggal Landas". *Prisma*, No.2, Tahun XX, LP3ES, Jakarta, hal. 37-45.
- Barlowe, Raleigh, 1972. *Land Resources Economic*, New Jersey: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs
- Branch, Melville C., 1995. *Comprehensive City Planning : Introduction & Explanation*, terjemahan oleh Bambang Hari W dan achmad Djunaedi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cahyono, Sutri, 2004. "Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Kalimantan Timur", *Tesis*, Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Conyers, Hollis and Peter Hils, 1991. *An Introduction to Development Planning in the Third World*, New York : John Wiley & Sons.
- Chopra, P.N, 1981, *Micro Economics: Walfare Economics*, New Dellhi : Kalyani Publisher.
- Christensen, 1992. *Population and Sample*. New York : Mc Graw Hill Bool Company.
- Chenery, H.B. dan P.G. Clark, 1974. *Interindustry Economics*. Second Printing, New York : John Willy & Sons, Inc.
- Chakravarty, Sukhamoy, 1987. "The State of Development Economics", *The Manchester School*, No. 2, Juni.
- Djodjohadikusumo, Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kedua, Jakarta : LP3ES.
- Dhyana, K, Tri Arya, 2001. "Pengaruh Tingkat Perubahan Stock Kapital, Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali". *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

- Dinc, Mustafa, 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools, Prepared for the Public Finance, Decentralization and Poverty Reduction Program*. World Bank Institute, Washington D.C., The World Bank.
- Dodoo, Robert, 1997, "Performance Standar and Measuring Performance in Ghana", *Public Administration and Development*, Vol. 7, hal. 115-121.
- Edison, L., 1994. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 2 (1), Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta, hal. 52-61.
- Emerson, M.J., 1975. *Urban and Regional Economics*. Boston : Allyman Bacon Inc.
- Esmara, Hendra, 1982. *Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Padang : Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Andalas.
- Friedman and William Alonso (Ed.), 1975. *Regional Policy Reading in Theory and Application*. London : The MIT Press.
- Firman, Tommy, 1985. *Perspektif Neo Klasik, Dependensi dan Humaniora dalam Teori-teori Pembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung : Jurusan Teknik Planologi ITB.
- Ferdinand, Augsty, 2002. *Aplikasi SEM-AMOS 4.0 Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang : BP Undip.
- Firdausy, Carunia Mulya, 2000, "Tantangan dan Peluang Globalisasi Bagi Perekonomian Nasional ", *Kajian Ekonomi Politik*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, hal. 1-26.
- Fadjarajani, Siti, 2001. "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung : Implikasi pada Perencanaan Pengembangan Wilayah". *Tesis*, Pascasarjana ITB, Bandung.
- Glasson, John, 1974. *An Introduction to Regional Planning : Concep, Theory and Practice*, 1<sup>st</sup> Edition, London : Hutchinsen and Co (Publishers) Ltd.
- Ghatak, Subrata dan Kent Ingersent, 1983. *Agriculture and Economics Development*. Baltimore : The Johns Hopkins University Press.
- Goldberg, Michael, Peter Chinloy, 1984. *Urban Land Economics*. New York : John Wiley & Sons, Inc.

- Gounder, Hukmani, 2002. "Political and Economic Freedom, Fiscal Policy and Growth Nexus : Some Empirical Results For Fiji", *Contemporary Economic Policy*. Vol. 20, No. 3, July 2002. hal. 75-85.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Josep F. Anderson, Tatham, 1995. *Multivariate Data Analysis With Readings*. 3<sup>rd</sup> Edition, New York : Macmilan Publishing Company.
- Hanham, Robert, Q and Banasick, 2000. " Shift-Share Analysis and Changes in Japanese Manufacturing Employment," *Growth and Change*, Vol.31, hal. 108-123.
- Harmini. 1997. *Hubungan Struktur Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat*, Bogor : Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Hakim, Abdul, 2002. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta :Ekonesia.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Heny Urmila Dewi, Made, 2004, "Sumber Daya Manusia (SDM) Wanita Indonesia : Kendala dan Hambatan Pengembangan Kemandirian", *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, Vol IV No. 2, Kerjasama Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana dengan Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Bali, Denpasar, hal. 40-52.
- Haynes, Michael, and Romy Husan, 2000. "National Inequality and The Catch-Up Period : Some Growth Alone Scenarios". *Journal of Economic Issues*, Vol. XXXIV No. 3, September., hal. 35-43.
- Hoover, Edgar M. 1948 *The Location of Economic Activity*. New York : McGraw Hill Book Company, Inc.
- Hardjomartojo, A.S, 1993, "Analisis Pembangunan Wilayah Jabotabek". *Tesis*, Bandung : Pascasarjana ITB, tidak dipublikasikan.
- Harun, Uton Rustan, 1992, "Dinamika Penggunaan Sumberdaya Lahan di Jawa Barat , 1970-1990 ". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*, No. 3 Februari, Bandung, hal. 45-53.
- Insukindro, 1992. "Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984 – 1987". *Buletin Studi Indonesia*, No. 2. Yogyakarta, hal. 20-28.

- Gounder, Hukmani, 2002. "Political and Economic Freedom, Fiscal Policy and Growth Nexus : Some Empirical Results For Fiji", *Contemporary Economic Policy*. Vol. 20, No. 3, July 2002. hal. 75-85.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Josep F. Anderson, Tatham, 1995. *Multivariate Data Analysis With Readings*. 3<sup>rd</sup> Edition, New York : Macmilan Publishing Company.
- Hanham, Robert, Q and Banasick, 2000. " Shift-Share Analysis and Changes in Japanese Manufacturing Employment," *Growth and Change*, Vol.31, hal. 108-123.
- Harmini. 1997. *Hubungan Struktur Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat*, Bogor : Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Hakim, Abdul, 2002. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta :Ekonesia.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Heny Urmila Dewi, Made, 2004, "Sumber Daya Manusia (SDM) Wanita Indonesia : Kendala dan Hambatan Pengembangan Kemandirian", *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, Vol IV No. 2, Kerjasama Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana dengan Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Bali, Denpasar, hal. 40-52.
- Haynes, Michael, and Rummy Husan, 2000. "National Inequality and The Catch-Up Period : Some Growth Alone Scenarios". *Journal of Economic Issues*, Vol. XXXIV No. 3, September., hal. 35-43.
- Hoover, Edgar M. 1948 *The Location of Economic Activity*. New York : McGraw Hill Book Company, Inc.
- Hardjomartojo, A.S, 1993, "Analisis Pembangunan Wilayah Jabotabek". *Tesis*, Bandung : Pascasarjana ITB, tidak dipublikasikan.
- Harun, Uton Rustan, 1992, "Dinamika Penggunaan Sumberdaya Lahan di Jawa Barat , 1970-1990 ". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*, No. 3 Februari, Bandung, hal. 45-53.
- Insukindro, 1992. "Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984 – 1987". *Buletin Studi Indonesia*, No. 2. Yogyakarta, hal. 20-28.

- Isard, Walter, 1998. *Methods of Interregional and Regional Analysis*. London : Ashgate Publishing Limited.
- Irawan dan M. Suparmoko, 1990 *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Irawan, Andi dan Perry Warjiyo, 2005, " Analisis Prilaku Instabilitas Perekonomian Indonesia : Pendekatan Keterkaitan Ekonomi Makro, Perdagangan International dan Sektor Pertanian", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.8, No.3, hal. 291-330.
- Jhingan, M.L., 1999. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto, H.M. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE.
- Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) Tahun 1999-2004*. Jakarta : Bina Pustaka Tama.
- Kerlinger, Fred N., 1990 *Foundation of Behavioral Research*, 3<sup>rd</sup> edition, New York : Prentice Hall Inc.
- Kelly Allen and Schmidt, 1995, "Aggregate Population and Economic Growth Corporation, The Role of Component of Demographic Change". *Journal of Demografic*, Vol.32, No.4, hal. 28-51.
- Koswara, E., 2000, "Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya", *CSIS*, XXIX, No. 1, hal. 51-52.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Teori Ekonomi Pembangunan, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuznets, Simon, 1993. *Modern Economic Growth : Structure and Spread*. London : Yale University Press.
- Kadariah, 1982. *Ekonomi Perencanaan*. Jakarta: LPFE – UI.
- Kindleberger, C.P. and B. Herrick, 1976 *Economic Development*. Tokyo: Mc.Graw – Hill.

- Kim, S.T., 1997. "The Role of Local Public Sectors in Regional Economic Growth in Korea," *Asean Economic Journal*, Vol. II, No.21, hal. 55-168.
- Lasam, Ellyano S., 2002. "Analisis Pengaruh Disparitas Produksi dan Pendapatan Pekerja Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur". *Disertasi*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Lindauer, John, 1971. *Macroeconomics*. New York : John Wiley & Sons Inc.
- Lumbuun, T. Gayus, 2005. "Permasalahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bisnis dan Birokrasi," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.XIII, No.2, Mei, hal. 188-194.
- Mc Kee D.L., et.al., 1969. *Regional Economics : Theory and Practice*. New York : The Free Press.
- Meier, G.M., 1976. *Leading Issues in Economic Development*. New York : Oxford University Press.
- Miernyk, William H., 1971. *Economics*. New York : Random House Inc.
- McGee, Terry G. 1996. "On The Utility of Dualism : The Informal Sector and Mega-Urbanization in Developing Countries". *Regional Development Dialogue*, Vol 17, No 1, hal. 38-47.
- Mubyarto, 1993. "Perbandingan Ekonomi Kalimantan Timur dan Riau", *Populasi* Vo. 2, Juni, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, hal. 64-73.
- Muliyadi, Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pack, Howard, 1994. "Endogenous Growth Theory, Intellectual Appeal and Emprical Short Comings", *Journal of Economic Perspetives*, Vol.8, No.1 Winter, hal. 55-72.
- Pancawati Neni, 2000." Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)*, Vol.15, No.2, hal. 179-188.
- Parr, John B. 1987. "The Development of Spatial Structure and Regional Economic Growth". *Land Economic*. Vol 63. No. 2. May 1987. Published ; The Board of Regents of The University of Wisconsin System, hal. 45-55.

- Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana, 2006, *Status Lingkungan Hidup Kota Denpasar*, Denpasar.
- Radianto, Elia, 2000. "Studi Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas SDM Untuk Sektor-Sektor Unggulan di Kapet Seram-Maluku". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.15, No.2, hal. 201-212.
- Ramaria D.V., 1978. *A Glossary of Some Terms Used in Development and Planning*. Bangkok | United Nations Asia and Pacific Development Institute.
- Ram, Hati, 1992. "Pemikiran Tentang Kemiskinan di Indonesia". *Prisma*, Nomor 3, Jakarta, hal. 10-17.
- Raey, D., 1995. "Paradigma New Growth, Teori dan Implikasinya Terhadap Kebijakan". *Prisma*, No.3, hal. 63-76.
- Richardson, W, Harry, 1978. *Regional and Urban Economics*. Penguin Books. Britain : The Chausess Press Ltd.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Tjiptoherijanto, Prijono, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Romer, Paul, 1994. "The Origin of Endogeneous Growth", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.8. hal. 3-22.
- Seers, Dudley, 1973, The Meaning of Development, in C.K. Waber (Ed.), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, New York: Random House.
- Sen, Amartya, 1983. "Real National Income.". *Review of Economoc Studies*, Vol.93, No. 372, hal. 32-42.
- Stern, Nocholas, 1991. "The Determinants of Growth". *Economic Journal*, No. 101, Januari , hal. 122-133.
- Sjafrizal, 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat ", *Prisma*, No.3, LP3ES, Jakarta, hal. 7-16.
- Solimun, 2002. *Structural Equation Modelling (SEM): Lisrel dan Amos*, Malang : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Soepoano, P., 1993, " Analisis Shift-Share, Perkembangan dan Penerapan ", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, No.1, Tahun III, hal. 43-54.

- \_\_\_\_\_. 2001. "Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Eksport) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional ", *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No.1, Januari, FE. UGM, Yogyakarta, hal. 22-30.
- Sriyasa, I, 1999, "Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, hal. 102-114.
- Sarwoprasodjo, S., N.W. Prasodjo dan Harmini. 1995. *Hubungan Tingkat Kesejahteraan sosial Dengan struktur Ekonomi wilayah*, Penelitian Terapan, Bogor : Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Sulistyaningsih, Endang. 1997. "Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia, 1980-1993". *Disertasi Bogor* : Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Stohrn, Walter (ed)., 1981. *Development From Above or Below : The Dialectics of Regional Planning in Development Countries*. New York: John Wiley and Sons.
- Soedarsono, 1999. "Penetapan Sasaran Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No.2, Tahun III, hal. 35-45.
- Sumodiningrat, Goenawan, 2001. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi : Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Per Prod.
- Susanti, H, Ikhsan, M., Widnyanti, 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta : LPFE-UI.
- Sharma, Subah, 1996. *Applied Multivariate Techniques*. New York : John Wiley & Son, Inc.
- Simanjuntak, Payaman J, 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2002. "Masalah Upah dan Jaminan Sosial", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume X (1) 2002*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (P2E – LIPI), Jakarta., hal. 8-15.
- Sumardi, 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Rajawali Press.



- Salampassy, Djalaludin, 2001. "Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Tingkat II di Propinsi Maluku Tahun 1984-1998". *Tesis*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Salim, Emil, 1976. *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Cetakan Ketiga, Jakarta : LPFE – UI.
- Suwardjoko Warpani, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung: ITB.
- Soelistyo, 1995. *Pemerataan dan Pertumbuhan Dilema Yang Tak Kunjung Selesai, Study Kasus Propinsi DIY dan Daerah-Daerah Tingkat Duanya selama PELITA V*. Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Strategi Pengembangan Industrialisasi Dalam Upaya Menghadapi Era Perdagangan Bebas*. Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia Tahun 2001*. Surabaya.
- Sitohang, Paul, 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta : LPFE-UI.
- Spiegel, Henry William, 1991. *The Growth of Economic Thought*, Third Edition, London. : Duke University Press.
- Sukirno, Sadono, 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Bina Grafika.
- Santoso, Ismanto Hadi, 2000. "Keterkaitan Antar Sektor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Jawa Timur". *Disertasi*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Syrquin, Moshe, 1988. "Pattern of Structural Change". (Hollis B. Chenery and T.N. Srinivasan (ed). *Handbook of Development Economics*, Vol. 1 Elsevier Science Publishers B.V, Amsterdam, hal. 203-273.
- Swasono, Sri Edi, 1988. "Demokrasi Ekonomi : Komitmen dan Pembangunan Indonesia", *Makalah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Juli.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualisme & Brotherhood*, Jakarta : UNJ Press.

- \_\_\_\_\_, 2005a. *Menegakkan Idiologi Pancasila, Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, The Real War : Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- \_\_\_\_\_, 2005b. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Perkumpulan Prakarsa.
- Swasono Y., Endang Sulistyaningsih. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat Nasional, Regional dan Perusahaan*, Yogyakarta : BPFEE-UGM.
- Soeroto, 1983. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Thoman. R.S. et.al., 1968. *The Geography of Economic Activity*. New York : Mc Graw-Hill Book Co.
- Thomas, 2000 *World Bank Report*. New York : World Bank Publisher.
- Thomas, Vinod and Wang Yan, 1996. "Distortion, Interventions and Productivity Growth, Is East Asia Different", *Journal Economic Development and Culture Change*, Vol.44, No.12, hal. 265-288.
- Todaro, Michael P., 2000a. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (terjemahan) Jilid I & II Edisi Ketujuh, Jakarta : Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2000b. *Economic Development*. Seventh Edition, New York : Addison – Wesley.
- Tambunan, T.T.H ., 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Priyono, 1999. "Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia", *Populasi*, Vol.10, No.2, hal. 57-72.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- The Group of Lisbon, 1995, *Limits to Competition*, Cambridge, MA : The MIT Press.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999, 2000*. Bandung : Kuraiko Pratama.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, 2005*. Bandung : Kuraiko Pratama.
- Undang-Undang Otonomi daerah No. 25 Tahun 1999, 2000*. Bandung : Kuraiko Pratama.
- Undang-Undang Otonomi daerah No. 33 Tahun 2004, 2005*. Bandung : Kuraiko Pratama.
- Ulhaq Mahtub, 1995. *Tirai Kemiskinan : Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Uppal, JS dan Handoko, Budiono Sri, 1986. "Regional Income Disparity in Indonesia". *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Yogyakarta, hal. 18-26.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990. *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Wie, The Kian, 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Alternatif Pendekatan*. Jakarta : LP3S.
- Wisana, I Dewa Karma, 2001. "Kesehatan Sebagai Suatu Investasi", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.11, hal. 42-51.
- Wiasti, Ni Made, 2001, "Peluang dan Pergeseran Kerja : Analisis Tentang Tenaga Kerja Wanita di Bali", *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, Vol .I No. 1, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana bekerjasama dengan Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Bali, Denpasar, hal. 23-29.
- \_\_\_\_\_. 2005, "Distribusi dan Dinamika Alokasi Kekuasaan Pada Keluarga Patrilineal di Bali", *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, Vol. V, No. 2, Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Udayana bekerjasama dengan Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Bali, Denpasar, hal. 1-8.

- Yotopoulos, Pan A. and Jeffrey B. Nugent, 1976. *Economics of Development : Empirical Investigations*. New York : Harper & Row Publisher.
- Yongzheng Yang, 2006. " China's In`tegration into the World Economic : innplication for developping countries", *Asian-Facific Economic Literature*, Vol.20, No.1, May , hal. 40-56.
- Yusuf, Maulana, 1999. "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model : Wilayah Bangka-Belitung". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, XLVII(2), Yogyakarta, hal. 1-9.
- Yasa, Mahaendra, 1996. "Dampak Deregulasi Moneter-Perbankan Terhadap Alokasi Investasi dan Distribusi Pendapatan Antar Sektor dan Daerah", *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, FE. Unud, Denpasar, hal. 5-12.
- Zadjuli, Suroso Imam, 1986. "Pola Pembangunan Berimbang dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur". *Disertasi*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.